

# UMULOLO

MEDIA INFORMASI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

**ANCAMAN TERHADAP  
BANGUNAN KOLONIAL  
RUMAH JABATAN GUBERNUR  
SULAWESI SELATAN  
DAN SEKITARNYA**

**CERITA MUMI  
DI LEMBAH BALIEM**



9 772089 391003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA GORONTALO**

Wilayah Kerja Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo

# Pengantar Redaksj

Salam Redaktur,

Pembaca Buletin Umulolo yang terhormat, cagar budaya merupakan warisan budaya sangat penting bagi karakter identitas budaya bangsa yang mengandung nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan agama. Sudah sewajibnya pelestarian terhadap cagar budaya ditingkatkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat sebagai pewaris dan ujung tombak pelestarian cagar budaya.

Hasil kebudayaan secara bendawi di Indonesia sangat beragam. Pembabakan dalam disiplin ilmu arkeologi diawali dari masa prasejarah hingga masa kemerdekaan. Periodeisasi ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Semua itu merupakan potensi sumber budaya yang mesti dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Cagar budaya merupakan karya adiluhung yang sangat sulit diperbaharui. Kemusnahannya seakan menjadi bom waktu bagi para arkeolog, penggiat kebudayaan dan pemerhati cagar budaya. Cagar budaya bukanlah pemanis didalam pembangunan yang semata-mata untuk meningkatkan destinasi wisata, tetapi seharusnya menjadi sarana edukasi yang mendorong kualitas pengetahuan dan industri kreatif di masyarakat secara luas.

Melalui Buletin Umulolo, seluruh masyarakat dapat menggali informasi, memahami bahkan mempelajari berbagai informasi secara populer dan ilmiah.

Semoga kehadiran Buletin Umulolo memberikan manfaat sekaligus mitra pelestarian dengan menciptakan investasi manusia berkebudayaan di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk.

Salam lestari cagar budaya Indonesia.  
Kunjungi, lindungi dan lestarikan cagar budaya.

Redaktur

# SAMBUTAN KEPALA BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA GORONTALO



Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo dengan wilayah kerja Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo memiliki peran untuk mewujudkan pengelolaan yang meliputi Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya, serta meningkatkan pendokumentasian untuk mutu informasi tentang sumberdaya manusia yang berkualitas.

Melalui Visi “Terwujudnya Pelestarian Berupa Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dalam Rangka Memperkukuh Karakter dan Jati Diri Bangsa” serta Misi Meningkatkan Pengelolaan yang meliputi Pelindungan, Pemeliharaan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya/ Situs; Meningkatkan Pendokumentasian dan Peningkatan Mutu Informasi tentang Cagar Budaya kepada Masyarakat; dan Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas. Dalam rangka mewujudkan capaian tersebut, melalui Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo diperlukan langkah-langkah sinkronisasi dalam pembangunan lintas sektoral melalui:

1. Pelaksanaan dokumentasi dan publikasi cagar budaya
2. Pelaksanaan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya
3. Pelaksanaan zonasi cagar budaya
4. Pelaksanaan pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya
5. Pelaksanaan pengembangan cagar budaya melalui kajian revitalisasi dan adaptasi
6. Pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya
7. Pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya
8. Fasilitasi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan tenaga teknis di bidang pelestarian cagar budaya
9. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Kebudayaan yang tugasnya melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan pelestarian cagar budaya di wilayah kerjanya dalam program kerjanya saat ini masih dan memfokuskan pada berbagai kegiatan yang berkaitan dengan eksistensi kantor terutama sosialisasi kepada masyarakat luas, pendataan cagar budaya, serta melakukan berbagai kegiatan teknis lainnya termasuk penyampaian informasi kepada Dinas terkait.

Buletin Umulolo dimaksudkan untuk memperkenalkan dan menambah khasanah pengetahuan masyarakat terhadap nilai penting cagar budaya dan bentuk-bentuk kegiatan teknis pelestarian. Memasuki penerbitan Volume VIII Nomor 01 Tahun 2019, Buletin Umulolo menampilkan beberapa tulisan yang dirangkum oleh redaksi dari Unit Dokumentasi dan Publikasi. Untuk itu, saya memberikan apresiasi kepada para penulis yang memberikan dedikasinya dalam upaya pelestarian cagar budaya.

Kami berharap dari penerbitan buletin ini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat serta dapat menjadi salah satu media dalam pengenalan dan penyebaran informasi tentang pelestarian cagar budaya. Sangat disadari bahwa penerbitan Buletin Umulolo masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan menjadi sesuatu yang sangat diharapkan agar penerbitan di masa datang akan lebih baik.

Kepala BPCB Gorontalo

Drs. Zakaria Kasimin

BPCB GORONTALO  
**DAFTAR ISI 2019**  
 BULLETIN CAGAR BUDAYA



**CERITA MUMI DI LEMBAH BALIEM** 81



**PRASASTI BATU TULIS DALAM PERSPEKTIF NILAI BUDAYA** 1



**PEMUGARAN MAKAM BLONGKOD (BAGIAN II)** 69

**PENGANTAR REDAKSI** i

**ANCAMAN TERHADAP BANGUNAN KOLONIAL RUMAH JABATAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN DAN SEKITARNYA** 17

**PROBLEMA MENDASAR KONSERVASI SITUS BUDAYA BENTENG PUTRI HIJAU, DELITUA, PROVINSI SUMATERA UTARA** 37

**SAMBUTAN KEPALA BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA GORONTALO** ii

**KOTA MAKASSAR TAHUN 1950 DALAM IMAJINASI GAGAKLODRA** 87

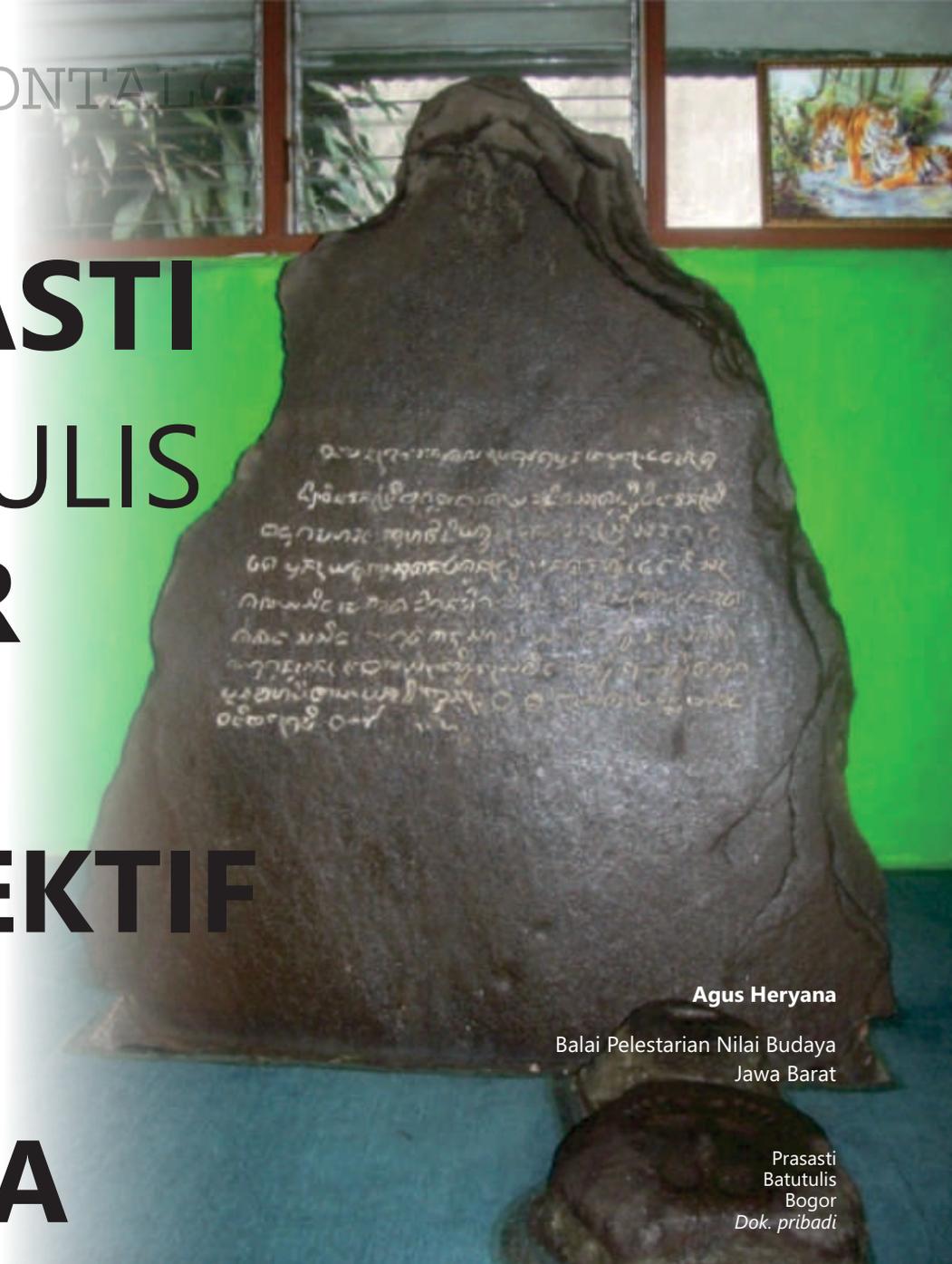
**MERIAM - MERIAM KOTA DENPASAR: TINJAUAN PENGANTAR** 115

**SEKOLAH KEBANGSAAN: MENUMBUHKAN NASIOANLISME, MENGENALKAN CAGAR BUDAYA** 127



**Cover Umololo Vol III 2019**  
 Pulau Lampa, Gorontalo Utara  
 Sumber Foto : Faiz, M.Hum  
 Desain: Mayrosis, S.Sn

# PRASASTI BATU TULIS BOGOR DALAM PERSPEKTIF NILAI BUDAYA



Agus Heryana

Balai Pelestarian Nilai Budaya  
Jawa Barat

Prasasti  
Batutulis  
Bogor  
Dok. pribadi

*Prasasti Batutulis telah membuka tabir keberadaan kerajaan Pajajaran dengan rajanya bernama Sri Baduga Maharaja. Kandungan inskripsinya memberitakan swakaryanya yang monumental pada masanya, yaitu: membuat parit, mengeraskan jalan, membangun telaga warna Mahawijaya, dan gunung. Dibalik itu semua, kebanggaan atas karya agungnya menyadarkan generasi penerus untuk mengintrospeksi diri melalaui tinggalannya. Tinggalan Sri Baduga Maharaja dalam bentuk prasasti menimbulkan keinginan untuk mengkaji nilai budaya yang terdapat di dalamnya. Nilai adalah sesuatu yang berharga bagi diri dan orang lain. Prasasti Batutulis sebagai tinggalan budaya dipastikan memiliki nilai budaya. Pengkajian nilai budaya Prasasti Batutulis bertujuan untuk mengetahui makna nilai (budaya) pada setiap peristiwa yang melingkupinya. Dalam pada itu, untuk mengkaji nilai budaya yang dimaksud digunakan metode deskripsi analisis dengan menitikberatkan pada teori semiotik sebagai alat analisisnya.*

Kata kunci: **Prasasti Batutulis, Sri Baduga Maharaja, nilai budaya.**

## A. PENDAHULUAN

Dalam sebuah percakapan informal pada sebuah acara *Kaliwonan*<sup>1</sup> utusan dari Bogor menyatakan bahwa masyarakat Bogor, terutama generasi muda tidak lagi mengetahui prasasti Batutulis. Termasuk dirinya pun mengatakan dengan jujur bahwa ia tidak tahu isi dari prasasti Batutulis itu. Sontak pernyataan ini menyadarkan pada kita ada sesuatu yang "hilang". Berbagai ragam pertanyaan muncul bercampur dengan kemasgulan hati atau perasaan yang penuh tanda tanya. Mengapa? Padahal prasasti batutulis begitu jelas dalam sebuah plang nama berukuran besar dan terletak di pinggir jalan raya yang cukup padat dan ramai.

Berita informal di atas seyogyanya disikapi dengan kedewasaan berfikir (Positive thinking). Tidak berkekuat pada jastifikasi benar-atau salahnya, apalagi dengan

permintaan pembuktian kuantitas yang jelas-jelas bukan pada tempatnya.

Penulis memandang - dalam tinjauan budaya- ada sesuatu yang salah yang menyebabkan kekacauan pewarisan budaya. Dalam pengertian, informasi para

### **Pada akhirnya "ketidaktahuan" generasi muda Bogor terhadap eksistensi prasasti Batutulis secara tidak langsung menggelitik penulis untuk membuka kembali ingatan saat berkunjung ke lokasi yang dimaksud.**

ahli mengenai hasil penelitian dan kajian tentang Batutulis selama ini tidak menyentuh masyarakat bawah. Beberapa alasan dapat dijadikan legitimasi sebagai berikut: (1) Hasil peneliti prasasti Batutulis yang telah dilakukan para ahli dari berbagai bidang ilmu itu tampaknya beredar dari ruang seminar dan perpustakaan

belaka; (2) peran dinas terkait tidak optimal dalam mensosialisasikan keberadaan prasasti; (3) kerusakan ekosistem budaya telah melahirkan generasi "autis" tak peduli dengan lingkungan sekitar; (4) pendidikan sejarah dan budaya lokal yang kehilangan ruh karena dianggap tidak penting; (5) adanya peralihan fungsi prasasti sebagai bagian dari kegiatan mistis. Alasan-alasan tersebut tidaklah mutlak, bahkan bisa saja bertambah atau malahan berkurang.

Pada akhirnya "ketidaktahuan" generasi muda Bogor terhadap eksistensi prasasti Batutulis secara tidak langsung menggelitik penulis untuk membuka kembali ingatan saat berkunjung ke lokasi yang dimaksud.

Lokasi prasasti Batutulis terletak di Jalan Batutulis, Kelurahan Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sebagai benda cagar budaya yang

<sup>1</sup>Kegiatan Kaliwonan berlangsung setiap malam Jumat Kaliwon hingga tengah malam atau menjelang waktu subuh. Umumnya dilakukan oleh komunitas tertentu yang bertujuan untuk saling bersilaturahmi diantara anggotanya. Para anggotanya tersebar di beberapa wilayah yang merupakan cabang-cabangnya. Materi pokok kegiatannya di samping berziarah pada mending tokoh-tokoh leluhurnya juga saling bertukar informasi bahkan saling memberi ilmu, terutama kanuragan.

dilindungi negara, Batutulis menempati tanah seluas 17 x 15 meter. Adapun prasasti Batutulis itu sendiri berada di ruang tengah “rumah” yang sengaja dibangun untuk melindunginya dari berbagai kerusakan alam. Menurut informasi prasasti Batutulis masih terletak di lokasi aslinya saat prasasti ditemukan.

Bentuk fisik Prasasti Batu Tulis adalah segi tiga pipih menyerupai gunung (Sunda: gugunungan) berukuran tinggi 1,82 m, lebar atas 27 cm, lebar bawah 1,52 m, dan tebal 15 cm. Adapun tulisannya bermodel aksara Jawa Kuna dengan menggunakan Bahasa Sunda Kuna dalam 9 baris. Untaian tulisannya disusun secara simetris dengan mempertimbangan keseimbangan ruang-tulis.

Dalam hal pembacaan inskripsinya terdapat perbedaan yang sangat berpengaruh pada penarikan simpulannya. Hal itu

didasarkan pada ketidakjelasan aksara atau kerusakan prasasti yang kemudian menyebabkan kesalahan dalam pembacaannya. Kesalahan pembacaan akan mrembet pula pada penafsiran atau interpretasi yang salah. Menurut keterangan Danasasmita (2003: 29)

**Untaian tulisannya disusun secara simetris dengan mempertimbangan keseimbangan ruang-tulis.**

beberapa sarjana yang telah mengalihaksarakan adalah : Friedrich (1853), J Noorduyn (1957), KF

Holle (1869), CM Pleyte (1911), RNg Poerbatjaraka (1921), dan Saleh Danasasmita (1981- 1984).

Selanjutnya, Djafar (2011, hlm 5-6) membaca ulang dan memperbaiki kata yang salah karena ketidaktelitian peneliti. Misalnya kata talaga (w)arna [talaga warëna] dibaca talaga rena. Hasil pembacaan ulang ini ternyata membawa konsekuensi logis dalam titimangsanya yang memunculkan angka 1255 Saka sebagaimana hasil bacaan Poerbatjaraka. Kesalahan dalam

menentukan tahun akan merembet pada peristiwa lain sehingga membuat rangkaian perjalanan sejarah menjadi semrawut dan kaau. Pada akhirnya kunci masalahnya terdapat pada penafsiran kalimat candrasangkala panyca pandawa nge(m)ban bumi. Lebih khusus lagi pada pembacaan kata emban atau ngemban.

Selanjutnya, guna kepentingan analisis inskripsi Prasasti Batutulis digunakan hasil pembacaan Danasasmita (2011).

Berikut adalah inskripsi Batutulis

### **Alih aksara**

1. *ΘΘ wang na pun ini sakakala, præbu ratu puranë pun, diwastu*
2. *diya wingaran præbu guru dëwatapranadiwastu diya wingaran sri*
3. *baduga maharaja ratu haji di pakwan pajajaran sri sang ratu de*
4. *wata pun ya nu nyusukna pakwandiya anak rahiyang nis*
5. *kala sang sida mokta di gunatiga. i(ny)cu rahiyang niskala wastu*

6. *ka(ny)cana sang sida mokta ka nusalarang ya siya nu nyiyan sakaka*
7. *la, gugunungan ngabalay, nyiyan samida,nyiyan sang hiyang talaga*
8. *rena mahawijaya, ya siya, pun. : ΘΘ i saka, panca panda*
9. *wa (m)ban bumi ΘΘ*  
(Danasasmita,2011: 29)

## Terjemahan

1. ΘΘOng na pun ! Inilah tanda peringatan untuk Prëbu Ratu yang telahmending (mangkat). Dinobatkan
2. beliau dengan nama Prëbu Guru DewataPrana. Beliau dinobatkan lagi dengan nama Sri
3. Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu De
4. wata. Beliaulah yang memariti [Pakuan](#).Beliau anak Rahiyang Dewa Nis
5. kala yang telah mangkat di Gunatiga, cucu Rahiyang Niskala Wastu-
6. kancana yang mending di Nusalarang.Beliaulah yang membuat tanda peringatan
7. (berupa) *gugunungan*, memperkeras jalan, membuat *samida*, membuat Sang Hiyang Telaga
8. rena Mahawijaya.

Beliaulah itu ΘΘ pada tahun Saka, panca panda  
9. wa (m)ban bumi ΘΘ

Pemaknaan atas sejumlah benda budaya - apa pun bentuknya- sangat bergan tung pada sudut pandang masing-masing orang. Sejumlah pakar arkeologi dan sejarawan telah

meneliti prasasti Batutulis dengan mendalam dan detail sehingga mengerucut pada simpulan bahwa prasasti Batutulis adalah peringatan atas jasa mending Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Hal tersebut disebabkan jasa-jasanya yang membuat parit di Pakuan, membuat tanda peringatan(berupa) gugunungan, memperkeras jalan, membuat samida, dan membuat Sang Hiyang Telagarena Mahawijaya. Dalam kalimat lain prasasti

Batutulis atau Prasasti Pakwan Pajajaran dibuat untuk mengenang kebesaran Sri Baduga Maharaja (Ayathohaedi, 2015b : 81).

Dalam pada itu sebagai orang yang berkecim pung dalam bidang kebudayaan ada hal lain yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, yaitu nilai budayanya Kajian

arkeologi dan sejarah telah membuka tabir kehidupan sejarah masa silam (kerajaan) Sunda. Apa yang dapat diambil manfaatnya dari keberadaan prasasti tersebut untuk dewasa ini. Cukupkah kita hanya membangga-banggakan diri saja ? Oleh karena itu, titik telaah tulisan ini adalah mengungkap nilai budaya yang terkandung pada prasasti Batutulis Bogor.

## Metode Penelitian

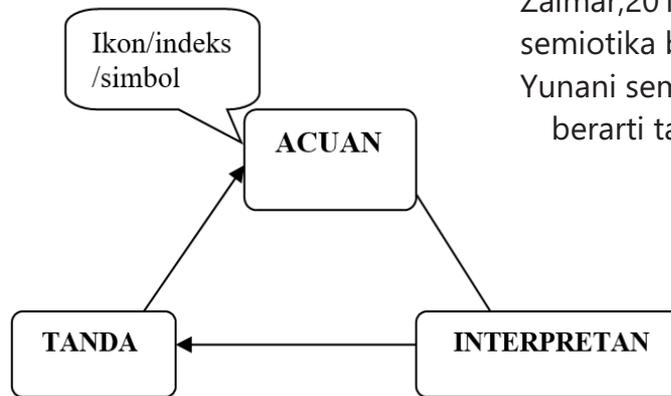
Prasasti Batutulis dalam persepsi nilai budaya menggunakan

**Dalam kalimat lain prasasti Batutulis atau Prasasti Pakwan Pajajaran dibuat untuk mengenang kebesaran Sri Baduga Maharaja (Ayathohaedi, 2015b : 81).**

metodologi kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif (Surakhmad, 1982: 147; Kutha Ratna, 2007: 53; Sugiyono, 2017: 8) merupakan cara yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasinya, menganalisis dan menginterpretasinya. Di samping itu dicobakan untuk membedah prasasti Batu Tulis adalah teori semiotik (budaya). Sebuah metode yang jarang dilakukan para arkeolog, mengingat semiotik memberi peluang interpretasi lebih luas dan tanpa batas. Namun demikian untuk mengkaji nilai budaya yang terdapat dalam sebuah tinggalan tidaklah cukup hanya meneliti dan mengkaji *an sich* prasasti saja. Faktor eksternal dalam hal-hal tertentu tidak saja berguna sebagai

**Sekecil apapun data budaya yang melingkupinya sangat berharga untuk mengungkap nilai budaya**

data dukung, namun untuk mengkaji nilai



budaya –dalam hal ini prasasti Batu Tulis- semua aspek budaya yang berhubungan dengan objek kajian perlu menjadi perhatian. Sekecil apapun data budaya yang melingkupinya sangat berharga untuk mengungkap nilai budaya. Oleh karena itu, (teori) semiotik sebagai sistem tanda budaya akan memberikan pandangan lain

Semiotik adalah ilmu yang mengkaji tanda dalam kehidupan manusia.

Artinya, semua yang hadir dalam kehidupan manusia dilihat sebagai tanda, yakni sesuatu yang harus

diberi makna (Hoed, 2011: 3; Zaimar, 2014: 3). Kata semiotika berasal dari kata Yunani *semeion* yang berarti tanda. Maka semiotika berarti ilmu tanda. Semiotika adalah cabang ilmu yang

berurusan dengan pengkajian tanda dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanda, seperti system tanda dan proses yang berlaku bagi penggunaan tanda (van Zoest, 1993: 1; Teeuw, 1984: 47).

Menurut Peirce, tanda adalah sesuatu yang mewakili seseorang atau sesuatu yang lain, dalam hal-hal dan kapasitas tertentu (Zaimar, 2014: 2 cf Noth, 1990: 42). Peirce menjelaskan tentang adanya tiga unsur dalam tanda, yaitu: representamen, objek, dan interpretan. Hubungan ketiga unsur membentuk hubungan segitiga (Zaimar, 2014: 3). Ada tiga unsur yang menentukan tanda: tanda yang dapat



Plang penunjuk lokasi situs Prasasti Batutulis

ditangkap itu sendiri, yang ditunjuknya, dan tanda baru dalam benak si penerima tanda. Antara tanda dan yang ditunjuknya terdapat relasi: tanda mempunyai sifat representatif. Tanda dan representasi mengahkan pada interpretasi; tanda mempunyai sifat interpretatif. Dengan perkataan lain, representasi dan

**Dengan perkataan lain, representasi dan interpretasi merupakan ciri khas tanda (van Zoest, 1993:14-15).**

interpretasi merupakan ciri khas tanda (van Zoest, 1993:14-15). Dalam hubungan representamen dengan objek dikenal sebutan trikotomi, pemilahan tanda yang paling fundamental, yaitu: ikon, indeks, dan simbol (Zaimar, 2014: 6-7). Teori semiotik yang dikemukakan Charles Sanders Peirce mengemukakan 3 (tiga)

relasi/ hubungan antara tanda (sign), acuan (referent), dan interpretan (interpretant). Hubungan ketiga hal itu terjadi dalam tiga tahap. Tahap pertama, manusia mempersepsi tanda (sign) yang disebut juga representamen, tahap kedua ia mengaitkan hal itu dengan suatu penalaran yang disebut object (hal yang mewakilinya atau referent), dan tahap ketiga, ia menafsirkannya –pemahaman makna timbul dalam dirinya– yang disebut interpretan.

Hubungan antara sign, referent, dan interpretant disebut trikotomi Peirce (Mu'jizah, 2005: 13).

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pemuliaan Tinggalan

Petunjuk awal menuju prasasti adalah plang pemerintah yang bertuliskan "Situs Prasasti Batutulis". Letaknya di tepi jalan yang ramai dan dikelilingi pagar besi dan tiang tembok. Arena parkir tidak tersedia, kecuali dipinggir jalan.

Suasannya sepi; tidak banyak pengunjung yang datang, kecuali pada waktu tertentu, yaitu liburan sekolah, muludan, dan menjelang Lebaran. Setiap tamu diharuskan mengisi buku tamu yang berisi kolom nama, asal dan tanda tangan sebagai prosedur bertamu.

Deskripsi di atas menunjukkan sebuah pertanda "birokrasi"

pemerintah yang terstruktur dalam kerangka menjaga tinggalan budaya. Plang

sebagai penunjuk objek yang berisi informasi keberadaan prasasti belum cukup mengge-

rakkan hati publik untuk berkunjung. Hal ini digambarkan dengan suasana lokasi

yang sepi serta daftar pengunjung dalam buku tamu yang relatif sedikit. Fungsi buku tamu di samping alat pengukur ketertarikan publik atas situs juga berfungsi sebagai pengaman atau pelindungan atas benda tinggalan

**Pembuatan bangunan berupa cungkup permanen dalam sebuah kompleks situs Prasasti Batutulis disertai fasilitas lain berupa juru pelihara (jupel) ditengarai mampu melestarikan tinggalan yang maha penting ini.**

budaya. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bogor telah berupaya

memelihara dan melindungi tinggalan budaya sebagaimana diamanati

undang-undang. Pembuatan bangunan berupa cungkup permanen dalam sebuah kompleks situs

Prasasti Batutulis disertai fasilitas lain berupa juru pelihara (jupel) ditengarai mampu melestarikan

tinggalan yang maha penting ini. Tidaklah semata-mata pemerintah daerah Kota Bogor bersusah payah memelihara dan melindungi prasasti apabila tidak disadari dengan kepentingan yang lebih luas lagi, yaitu identitas jatidiri bangsa, khususnya peninggalan Kerajaan Padjajaran yang pernah berkuasa di tanah Bogor.

Perlakuan negara atas prasasti Batutulis tidaklah diragukan lagi. Namun, yang perlu digalakkan adalah minat dan ketertarikan masyarakat terhadap prasasti tersebut. Sepinya pengunjung pertanda ketidaktarikan

atau ketidaktahuan publik atas keberadaan prasasti. Oleh karena itu perlu upaya-upaya konkret untuk menarik minat berkunjung. Misalnya, mengadakan kegiatan "BukaSajarah" sebagaimana dilakukan komunitas penca tradisi Cimande Kabupaten Bogor pada setiap bulan Mulud (rabiul awal). Pada pertengahan bulan tersebut semua

anak murid Cimande hadir dalam acara *Ngabungbang*. Di sini mereka mengadakan ritual tertentu dan mengurai kembali sejarah atau silsilah perguruan pencak silat aliran Cimande.

## 2. Pemuliaan Leluhur

Pada saat memasuki pintu yang tertutup tirai akan tercium wewangian. Tirai pintu berfungsi untuk menghalangi pandangan agar tidak langsung tertuju pada prasasti. Di hampari karpet warna biru gelap nan bersih terselip dibagian pojok sajadah lusuh. Sesekali ada juga yang melakukan ritual

untuk sesuatu maksud sebagaimana petunjuk jurukunci. Menurutnya apabila telapak kaki bisa pas dengan telapak kaki terletak di bawah Batutulis, berarti keinginan akan terkabul. Begitu juga saat memeluk batu Lingga dengan cara membelakanginya. Bila ujung jari saling menempel, maka keinginan akan terkabul.

**Menurutnya apabila telapak kaki bisa pas dengan telapak kaki di terletak di bawah Batutulis, berarti keinginan akan terkabul.**

*Ada tiga tanda yang menjadi kunci bahasan yaitu: wewangian, sajadah lusuh dan ritual. Di hampir setiap petilasan yang banyak diziarahi*

wewangian menjadi "makanan utama". Dalam pada itu tempat ibadah muslim di Mesjidil Haram – Mekah dan mesjid Nabawi -Madinah pun wewangian menjadi "wajib" karena mewangian membawa kegairahan dan kenyamanan dalam beribadah. Wewangian dengan keharuman yang khas masing-masing tempat menyiratkan sebuah simbol

ketenangan dan kedamaian bukan saja bagi peziarah sendiri, tetapi juga bagi "penghuni"nya. Masyarakat awam menganggap "penghuni" Batutulis itu adalah Prabu Siliwangi yang berjasa dalam memajukan kerajaan Pajajaran. Siliwangi itu sendiri adalah gelar bukan nama (Danasmita,2003b: 135). Siliwangi berasal dari kata *sili* dan *wangi*. *Sili* artinya saling dan *wangi* berarti harum. Prabu Siliwangi secara arti kata berarti Raja atau prabu yang harum namanya. Keharuman itu direfleksikan dengan mewangian melalui berbagai cara. Baik dengan penyuluitan dupa (parukuyan) atau dengan sejenis minyak wangi. Diharapkan dengan wewangian itu peziarah dapat mengambil pelajaran untuk dapat hidup seperti Prabu Siliwangi dengan keharuman namanya melalui amal perbuatannya.

Hal menarik adalah tanda yang kedua adalah sajadah lusuh. Sajadah

adalah alat beribadahnya muslim untuk berhubungan langsung dengan Tuhan-nya. Kelusuhan sajadah menunjukkan keseringan digunakan dalam beribadah. Intensitas beribadah di ruang prasasti Batutulis akan membangun kesan berbeda dengan di mesjid. Mau tidak mau memiliki kesan (1) pemujaan berlebihan; (2) membangun opini pro-kontra yang bermuara pada “kegaduhan budaya” apalagi dikaitkan dengan tanda ketiga yaitu ritual permohonan. (3) melegetimasikan Prabu Siliwangi penganut Islam.

Ketiga kesan tersebut pada dasarnya ekspresi budaya masyarakat Sunda atas kiprah Prabu Siliwangi yang dianggap sebagai leluhurnya. Islam adalah agama yang dianut sebagian besar orang Sunda. Identitas ke-Islaman ditunjukkan melalui perilaku beribadah di situs prasasti Batutulis walau ia menyadari bahwa Prabu Siliwangi bukanlah penganut Islam. Namun setidaknya, perilakunya yang membebaskan

rakyatnya untuk memeluk agama Islam patut dihormati yang menunjukkan kebesaran jiwa dan toleransinya yang tinggi

**Lepas dari semua itu ketiga tanda budaya (semiotik budaya) di atas pada dasarnya membangun pemuliaan atas leluhur orang Sunda sebagai ekspresi kecintaan, penghormatan, kesetiaan kepada rajanya.**

(Ayatrohaedi,2005:133; Danasasmita,1983-1984a: 39-44) . Jasa-jasa inilah yang secara tidak langsung melegitimasi Prabu Siliwangi milik orang Islam, khususnya masyarakat muslim Sunda.

Tanda ketiga adanya ritual tertentu dengan menggunakan sebagian perangkat situs menunjukkan refleksi/perwujudan diri dengan yang bersangkutan. Telapak kaki dan lingga sebagai tanda yang menunjukkan kepemilikan menyiratkan

peniruan diridengan tokoh yang dimaksud. Sebagai seorang raja yang berkedudukan terhormat dan berwenang atas seluruh kerajaan sudah tentu memiliki kekuasaan. Kekuasaan inilah yang memudahkan segala keinginannya dapat terkabul. Kecocokan kaki menjadi dasar atau pertanda semua keinginan dapat terkabul. Namun demikian, jangan dilupakan perilaku yang bersangkutan pun turut mempengaruhinya perkabulan keinginannya. Prabu Siliwangi memiliki perilaku yang baik dan agung; tanpa disertai akhlak yang baik tidak mungkin terkabul. Lepas dari semua itu ketiga tanda budaya (semiotik budaya) di atas pada dasarnya membangun pemuliaan atas leluhur orang Sunda sebagai ekspresi kecintaan, penghormatan, kesetiaan kepada rajanya. Dalam hal ini adalah Prabu Siliwangi yang memiliki nama nobat Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata.

### 3. Pertalian Darah Membangun Persatuan dan Persaudaraan

Sebagai indeks, petunjuk, inkripsi Batutulis menginformasikan adanya dua kali penobatan raja. Perta nyaan sederhana adalah siapa dan mengapa? Perebutan kekuasaan dalam sebuah kerajaan atau pemerintahan merupakan persoalan klasik hingga dewasa ini. Demikian pula terjadi persengketaan antara Susuktunggal yang berkuasa di Pakuan (1382-1482) dengan Dewa Niskala di Galuh (1475-1482). Persengketaan kedua kerajaan ini telah selesai dengan sendirinya, manakala Sri Baduga Maharaja bertahta (1482-1521).

Naskah *Pustaka Negara Kertabhumi* 1/2, h. 20/21 memberitakan :

*Hana pwa putra nira Sang Prabhu Dewa Niskala, Sang Ratu Jayadewata gumanyakna ta manira dumadi raja Sunda lawan nama sidham Prabhuguru Dewataprana, atéhér sinangaskara lawan nama sidham ÇriBhaduga Maharaja ing Pakwan Pajajaran Çri Sang Ratu*

*Dewata. Rasikalungguh singgasana çriman çriwacana. Kedatwan nira makaran Çri Bima-Punta-Narayana-Madura-Suradipati.*

(Adapun putera Sang Prabu Dewa Niskala yaitu Sang Ratu Jayadewata menggantikannya menjadi raja Sunda dengan nama nobat Prabu guru Dewataprana, lalu dinobatkan lagi dengan gelar Sri Baduga Maharaja di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Ia duduk di atas tahta yang bernama Sriman Sriwacana. Keratonnya bernama Sri Bima-Punta-Narayana-Madura-Suradipati).

Berita sejenis, diungkapkan pula, dalam *Carita Parahiyangan*.

*Sang Susuktunggal inyana nu nyieunna palangka sriman sriwacanaSri Baduga Maharajadiraja Ratu Haji di Pakwan Pajajaran nu mikadatwanSri Bima-Punta-Narayana-Madura-Suradipati, inyana pakwan SanghiyangSri Ratu Dewata*(Atja, 1968: bagian XVI).

(Sang Susuktunggal ialah yang membuat tahta

Sriman Sriwacana untuk Sri Baduga Maharajadiraja ratu penguasa di Pakuan Pajajaran yang bersemayam di keraton Sri Bima-Punta-Narayana-Madura-Suradipati, yaitu istana Sanghiyang Sri Ratu Dewata).

Kedua sumber berita di atas (sebagai *indeks*) telah membuka tabir (sebagai *referent*) dari inkripsi "Prëbu Ratu yang

**Perebutan kekuasaan dalam sebuah kerajaan atau pemerintahan merupakan persoalan klasik hingga dewasa ini. Demikian pula terjadi persengketaan antara Susuktunggal yang berkuasa di Pakuan (1382-1482) dengan Dewa Niskala di Galuh (1475-1482).**

telah mendiang (mangkat). Dinobatkan beliau dengan nama Prëbu Guru Dewata Prana. Beliau dinobatkan lagi dengan nama Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata".

Jayadewata mula-mula menerima tahta Galuh dari ayahnya, Dewa Niskala. Ia bergelar Prabu Guru Dewata prana. Setelah itu, ia berangkat ke Pakuan untuk menerima penyerahan tahta Sunda dari mertuanya, Prabu Susuktunggal. Peristiwa itu sekaligus menjadikan dirinya penguasa Sunda dan Galuh. Ia menjadi seorang maharaja. Prabu Susuktunggal sebagai mertuanya karena ia (Jayadewata) menikahi putrinya yang bernama Kentring Manik Mayang Sunda (Danasmita, 1983-1984: 1; Ayatrohaedi, 2005a:129).

Sri Baduga Maharaja secara tidak langsung menghentikan persengketaan dan sekaligus mempersatu dua kerajaan (Sunda/Pakuan dan Galuh). Alhasil terah atau darah-keturunan dan hubungan persaudaraan melalui pernikahan,

mampu meredam gejolak "politik". Hal itu disebabkan pertalian darah melahirkan cinta, kasih sayang kepada keluarga, kerabat dan menimbulkannya rasa bantu-membantu serta gotong-royong sekaligus memperbesar rasa

takut dalam diri musuh (Ibnu khaldun,1986: 151). Jayadewata sebagai pewaris tahta Galuh berhak menggantikan ayahandanya, Dewa Niskala, sebagai raja Galuh karena berdasarkan pertalian darah. Demikian pula ia berhak mewarisi Pakuan dari mertuanya, karena perkawinannya dengan putrinya, Kentring Manik. Apabila dua kekuatan darah telah bergabung dalam tubuh seseorang, musuh mana yang berani melawan kekuatannya. Dan ternyata hubungan pertalian darah memiliki kemuliaan tersendiri, yaitu keberanian, kebangsawanan atau

popularitas. (Ibnukhaldun,1986: 157).

#### 4. Nilai Ketuhanan

Indeks ketuhanan dalam inskripsi terdapat pada kalimat *wang na pun atau ong na pun !*

Kata *wangsama* dengan *ong*. Dalam kata *kalwang*, *balwang*, *barwang* dan *katwang* yang berubah menjadi *kalong* (kelelawar), *balong* (kolam), *barong* (kedok/topeng) dan *katong*(raja). Dalam etimologi kata *wang* berasal dari (wa+ng); *wa ngaraning maruhur hyang ngaraning Batara*. Artinya "wa nama yang berada di atas, *hyang* nama Batara" (Danasmita,2003: 26, 135). *Wang* atau *ong* fungsinya untuk menyeru Batara yang berada di atas, maksudnya Tuhan Yang Maha Esa. Dalam keseharian orang Sunda disebut *Pangeran* (Tuhan) (Danasmita,2003:135). Jadi kata *wang* merupakan kata pembuka/penyeru kepada Tuhan agar memberkahi apa yang akan dilakukan makhluknya. Dalam bahasa muslim mirip dengan *basmalah*. Prasasti lain selain Batutulis adalah

Prasasti Kabantenan I-III diawali dengan ungkapan *Ong awignam astuyang* berarti semoga selamat.

Proses perubahan kata *wang* dan *ong* terus bergulir menjadi *hung* atau *ahung* sebagaimana tersurat pada rajah carita pantun. Dalam pemakaian bahasa Sunda

sehari-hari, bunyi nasal (baca: dengung) selalu dihubungkan dengan sesuatu yang besar, tinggi, sakral dan agung. Beberapa contoh kata yang mengandung bunyi dengung adalah: *panggung*, *manggung* (terkenal), *degung* (nama gamelan), *gung* atau *keung* (bunyi suara gong yang ditabuh), *indung*(ibu) dan seterusnya. Lepas dari masalah tersebut, prasasti-prasasti yang ditemukan di Tatar Sunda pun ada yang menggunakan kata yang senada dengan kata *Ahung*. Apakah tidak mustahil kata *Ahung* dianalogikan menjadi *agung* dan berarti Yang

Agung. Perkataan Yang Agung biasanya dinisbahkan atau ditujukan kepada

“sesuatu” yang maha dalam segala hal, dalam hal ini adalah Tuhan pencipta alam. Jadi, *Ahung* diidentikkan dengan Tuhan (Heryana,

2007 : 25)

Prasasti Batutulis adalah sesuatu yang penting. Sebuah refleksi, cerminan, dari kerajaan besar yang pernah ada di Jawa Barat yaitu Pajajaran dengan ibukotanya Pakuan. Sudah seyogya-

nya diawali dengan seruan kepada Tuhan, *Ong* atau *Ahung* sebagai

ungkapan suka cita dan keberkahan yang dilimpahkannya kepada negeri Pajajaran.

Seruan kepada Tuhan

secara tidak langsung menandai keberadaannya dan kekuasaannya.

Tidaklah semata-mata frase *Ong* dipahatkan pada batu kalau tidak mengandung makna apa-apa. Negara tanpa keyakinan pada kekuasaan Tuhan tidaklah akan sebesar negeri Pajajaran. Jangan lupakan dan jangan tinggalkan Tuhan. Sebab Tuhan yang akan memberi anugrah kepada makhluk (raja), melalui pembangunan yang berguna bagi rakyatnya. Buktinya adalah membuat parit (yang berfungsi lain sebagai benteng pertahanan), mengeraskan jalan untuk mempermudah transportasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, membuat

telaga warna Mahawijaya yang berguna untuk kehidupan rakyatnya.

Dalam pada itu

tindakan atau perilaku seseorang sangat bergantung pada cara pandang terhadap sesuatu. Misalnya, cara

**Prasasti Batutulis adalah sesuatu yang penting. Sebuah refleksi, cerminan, dari kerajaan besar yang pernah ada di Jawa Barat yaitu Pajajaran dengan ibukotanya Pakuan.**

**Negara tanpa keyakinan pada kekuasaan Tuhan tidaklah akan sebesar negeri Pajajaran. Jangan lupakan dan jangan tinggalkan Tuhan.**

pandang dalam kebaikan biasanya dilandasi oleh ajaran yang yakininya. Frase /Ong/ adalah pengejawantahan dari ajaran yang berkembang pada waktu kerajaan Pajajaran berdiri. Ajaran yang berkembang pada waktu itu adalah ajaran *Sanghyang Siksa*. Dalam naskah CP itu tercatat empat orang raja yang dikatakan berpegang pada ajaran *Sanghyang Siksa*, yaitu Rahyang Sanjaya, Rahyang Manisri, Prabu Darmasiksa, dan Prabu Jayadewata (Heryana,2014:172). Prabu Jayadewata, berkuasa selama 39 tahun dan dikenal sebagai Prabu Siliwangi diberitakan dalam naskah *Carita Parahyangan/19/ tan krêtaja laki-bi dina urang reya, ja loba disanghyang siksa* 'Tidak sejahtera (bahagia) kehidupan keluarga orang banyak karenamereka banyak (yang) melanggar (ajaran)Sanghyang Siksa' (Ayatroehaedi, 1995:70). Salah satu contoh ajaran yang dimaksud adalah berkenaan dengan fungsi *dasaindria*, yaitu sepuluh indra utama yang dimiliki

setiap orang., /1/ ( ... ) *ini byakta: beuli ulah barang denge mo ma nu sieup didenge kenanadora bancana, sangkan ulah riemu malana lunas papa naraka; hengan lamun kapahayu ma sinengguh utama ti pangreungeu. mata ulah barang deulo mo ma nu sieup dideuleu kenana dora bancana, sangkan ulah nemu mala na lunas papa naraka;*

**Prabu Siliwangi bagi masyarakat Sunda, khususnya, memiliki makna tersendiri. Ia merupakan sosok pemimpin ideal dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya.**

*hengan lamun kapahayu ma sinengguh utama ning deuleu ( ... )* 'Inilah kenyataannya: Telinga jangan mendengarkan (sesuatu) yang tidak layak didengar karena menjadi pintu bencana, penyebab kita mendapat celaka di dasar kenistaan neraka; namun kalau telinga terpelihara, kita akan mendapat keutamaan dalam pendengaran. Mata

jangan sembarang melihat (sesuatu) yang tidak layak dilihat karena menjadi pintu bencana, penyebab kita mendapat celaka di dasar kenistaan neraka, namun bila mata terpelihara, kita akan mendapat keutamaan dalam penglihatan (Atja,dkk.1981: 1-2; 27-28)

## **5. Keteladanan**

Nilai keteladanan berada pada sosok raja Pajajaran itu sendiri yaitu Sri Baduga Maharaja atau dikenal dengan nama gelar Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi bagi masyarakat Sunda, khususnya, memiliki makna tersendiri. Ia merupakan sosok pemimpin ideal dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Kegagahan, kewibawaan seolah-olah tertuju pada sosok tersebut. Namun demikian, dalam taraf penentuan identitas Siliwangi terjadi perdebatan dengan berbagai argumen hingga ditemukannya naskah karya Wangsakerta dari Cirebon. Salah satu karyanya yaitu *Pustaka*

*Kertabumi 1 / 4 h. 51* terdapat keterangan, "*Rahyang Dewa Niskala manak ta Sri Baduga Maharaja Pajajaran kang amituhu wwang Sunda sinebut Prabhu Siliwangiya ta Raden Pamanah Rasa ngaran nira waneh*" (Rahiyang Dewa Niskala berputera Sri Baduga Maharaja Pajajaran yang menurut orang-orang Sunda disebut *Prabu Siliwangi* alias Raden Pamanah Rasa). Jadi, dengan keterangan ini jelas Prabu Siliwangi bukanlah nama bawaan, melainkan nama gelar atau nama pengganti.

Mengapa Sri Baduga disebut Siliwangi? Dalam *Kertabumi 1/ 5 h. 22/23* ditegaskan, "*Çri Baduga Mahārāja atyantākweh yasa nira ring nagara Sunda. Swabhawanira sanyāsanya tan beda lawan Sang Prabhu. Mahārājamokteng Bubat. Matangyan sira pramānāran Prabhu Çiliwangi māpan sira sumilihakén kaca-krawartyan Sang Prabhu Wangi ya ta sang mokteng Bubat lawan Sang Prabhu Wangisutah ya ta*

*sang mokteng Nusalarang*" (Sri Baduga Maharaja sangat banyak jasanya terhadap negeri Sunda. Kekuasaannya seolah-olah tidak berbeda dengan Sang Prabu Maharaja yang gugur di Bubat. Itulah sebabnya ia digelari Prabu Siliwangi karena menggantikan pemerintahan Sang Prabu Wangi yaitu yang gugur di Bubat dan Sang Prabu Wangisuta (Wastu Kancana) yaitu yang mendiang di Nusa Larang).

Jasa-jasa Sri Baduga terabadikan diantaranya dalam prasasti Kabantenan, yaitu penetapan batas *lêmah dewasana* (tanah kabuyutan) di Sunda Sêmbawa, di Gunung Samaya dan pembebasan pajak (Prasasti Kabantenan I, II dan III). Dan yang dianggap monumental adalah sebagaimana dipahatkan pada Prasasti Batutulis.

Keteladanan merupakan contoh konkret dari seorang pemimpin. Pemimpin, pada konteks ini adalah Sri Baduga, telah memberikan keteladanan

melalui karya dan darma (amal) kepada rakyatnya. Ia pantas dicintai dan dihormati sekaligus kebanggaan orang Sunda. Oleh karena jasa-jasanya itulah nama Sri Baduga dikenal rakyatnya dengan sebutan (Prabu) Siliwangi yang berarti harum namanya. Harum dalam bahasa Sunda adalah *wangi*.

Keteladanan bersumber pada amal perbuatan yang berguna, baik untuk diri maupun untuk orang lain. Para pendahulu telah memberikan keteladanan kepada anak cucu (Sunda: *seke seler* Siliwangi) dengan karya. Bagaimana dengan generasi sekarang? Akankah berkuat pada kebesaran masa lampau atau berlindung pada nama besar sebagai pewaris Pajajaran (Prabu Siliwangi), tanpa karya apa-apa? Ataukah cukup dituliskan dalam buku dan wacana sebagai pengetahuan semata untuk kepentingan siswa sekolah? Ataukah menjadi cermin dan arsip untuk bekal menatap masa depan yang lebih baik?

## 6. Sesal dan Bangga

Sesal merupakan luapan emosi jiwa yang tidak mampu dicapai. Ketidakberdayaan untuk menyelesaikan sesuatu karena kebodohan dan kelemahannya merupakan "siksaan" yang menyakitkan. Ketidakmampuan mempertahankan capaian yang telah dimiliki pendahulu berbuah pada rasa sesal diri. Kondisi inilah yang terjadi pada penerus Sri Baduga Maharaja, yakni Surawisesa.

Sebongkah batu besar bertulis menjadi saksi bisu kepiluan hati Surawisesa. Segala daya upaya mempertahankan karya ayahandanya berbuah pahit. Peperangan yang mesti dilalui untuk melindungi seluruh wilayah kerajaannya berakhir pahit pula. Rasa sesal itu yang dirasakannya.

*Sesal dan bangga* adalah dua kata yang bertolak belakang yang mesti dirasakan oleh pembuat Prasasti Batutulis. Prasasti ini tentu dibuat setelah Sri Baduga meninggal dunia.

Siapa pembuatnya ? Pasca meninggalnya Sri Baduga tahun 1521 M, setahun kemudian Surawisesa naik tahta sebagai Susuhunan Pajajaran. Pada masa pemerintahannya terjadi peperangan dengan Banten dan Cirebon. Dalam menghadapi kedua Negara tersebut Surawisesa menjalin perjanjian internasional dengan Portugis. Perjanjian pertama antara Pajajaran dengan Portugis berlangsung tanggal 21 Agustus 1522 yang mengizinkan Portugis membangun benteng di Banten dan Kalapa. Namun demikian serbuan Demak-Cirebon terjadi sebelum benteng terwujud, maka separuh wilayah kerajaan yang diwarisi dari ayahnya telah hilang. Dalam situasi demikian ia menyadari betapa kecil dirinya dibandingkan dengan almarhum ayahnya. Rasa hormat dan kagum terhadap pribadi Sri Baduga makin menjulang karena ditingkah oleh rasa penyesalan bahwa dirinya tidak mampu membela amanat yang telah diwarisinya.

Demikianlah tepat 12 tahun setelah Sri Baduga wafat Surawisesa menunaikan tugas terakhir yang masih mungkin dilakukannya sebagai tanda bakti seorang anak. Ia mengadakan upacara *srada* yaitu upacara penyempurnaan sukma yang harus dilaksanakan 12 tahun setelah seorang raja wafat. Dalam kesempatan inilah ia membuat *sakakala* untuk mengenang riwayat dan jasa serta kebesaran ayahandanya. Itulah Prasasti Batutulis. (Danasasmita, 1983-1984a : 25).

Sesal dalam hal-hal tertentu menjadi energi positif untuk terus berupaya mencapai tujuan. Rasa sesal untuk mempertahankan cita-cita yang telah dicapai pendahulunya akan berubah menjadi kebanggaan tersendiri. Sesal dan bangga seolah-olah obat penawar ketidakberdayaan manusia dalam menghadapi ketentuan Yang Maha Kuasa.

## C. SIMPULAN

Keberadaan Prasasti Batutulis secara legal

formal dikuasai negara. Hal tersebut menunjukkan sebuah bentuk perlindungan negara atas kehidupan rohani rakyatnya. Negara hadir dengan segala kemampuannya yang ada untuk melindungi, memelihara, dan mengembangkan tinggalan masa lampau; khususnya tinggalan yang memiliki nilai budaya tinggi. Ketinggian nilai budaya dalam hal ini berkorelasi dengan validitas sumber berita yang diperoleh.

Dalam pada itu Prasasti Batutulis sebagai objek penelitian memiliki nilai budaya yang patut diamankan. Sekurangnya menjadi inspirasi generasi muda pada zaman milenial ini. Nilai budaya yang dimaksud adalah : pemuliaan tinggalan, pemuliaan leluhur; pertalian darah membangun persatuan dan persaudaraan, nilai Ketuhanan, keteladanan, dan penyesalan sekaligus kebanggaan. 🏠🏠🏠🏠

- Atja. *Carita Parahiyangan: Naskah Titilar Karuhun Urang Sunda*. Bandung: Jajasan Kebudayaan Nusalarang, 1968.
- Atja dan Saleh Danasasmita. *Sanghyang Siksakanda Ng Karesian*. Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat, 1981.
- Ayatroehaedidan Sri Saadah. *Janiniskala: Kehidupan Kerohanian Masyarakat Sunda Sebelum Islam*. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Pusat Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995.
- Ayatrohaedi. *Sundakala*. Jakarta: Pustaka Jaya, 2005a.
- Ayatrohaedi. *Politik Agraria dan Pakuan Pajajaran*. 'Sunda, Pajajaran, Pakuan'. Bandung: Pusat Studi Sunda Hal. 78-92, 2005a.
- Danasasmita, Saleh, Yoseph Iskandar, dan Enoch Atmadibrata. *Rintisan penelusuran masa silam Sejarah Jawa Barat, jilid keempat*. Proyek Penerbitan Sejarah Jawa Barat Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, 1983-1984a.
- Danasasmita, Saleh. *Pajajaran jeung Prabu Siliwangi*. Bandung: Kiblat, 2003b.
- Djafar, Hasan. "Prasasti Batutulis Bogor." *AMERTA* Volume 29: No. 1 Juni 2011: 1-13.
- Heryana, Agus. *Rajah: Gambaran Kosmologi Sunda Dalam Carita Pantun Di Provinsi Banten*. Bandung: Balai Pelestarian Sejarah Dan Nilai Tradisional Bandung, 2007.
- Heryana, Agus. "Jejak Kepemimpinan Orang Sunda". "PATANJALA" Vol. 6 No. 2, Juni 2014: 163-178.
- Hoed, Benny H. *Semiotik dan Dinamika Sosial Budaya*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2011.
- Ibnu Khaldun. *Mukaddimah*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986.
- Kutha Ratna, Nyoman. *Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Mu'jizah. *Martbat Tujuh*. Jakarta: Djembatan, 2005.
- Nooth, Wienfried. *Handbook of Semiotics*. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1990.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1982.
- Teeuw, A. *Sastra dan Ilmu Sastra*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.
- van Zoest, Aart. *Semiotika*. Jakarta: Yayasan Sumber Agung, 1993.
- Zaimar, Okke Kusuma Sumantri. *Semiotika dalam Analisis Karya Sastra*. Depok: Komodo Books, 2014.
- Naskah *Pustaka Negara Kertabhumi 1 / 2 (Parwa I sarga 2)*, Museum Negeri Jawa Barat
- Naskah *Pustaka Negara Kertabhumi 1 / 4 (Parwa I sarga 4)*, Museum Negeri Jawa Barat
- Naskah *Pustaka Negara Kertabhumi 1 / 5 (Parwa I sarga 5)*, Museum Negeri Jawa Barat

# ANCAMAN TERHADAP BANGUNAN KOLONIAL RUMAH JABATAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN DAN SEKITARNYA

**A**ncaman yang terjadi pada kawasan Rumah Jabatan Gubernur dan bangunan sekitarnya sangat besar dan menimbulkan dampak negatif terhadap kawasan dan bangunan kolonial yang ada di kawasan tersebut. Tingkat ancaman yang terjadi cukup bervariasi mulai dari 1) perubahan struktur ruang kota yang meliputi tingginya pertumbuhan penduduk, masalah ekonomi, dan sosial budaya masyarakatnya, 2) pemanfaatan/penggunaan Cagar Budaya yang meliputi perubahan fungsi ruang, serta penambahan bangunan baru. 3) perubahan jaringan jalan.

**Dewi Susanti**

Staf Unit Maros-Pangkep  
Balai Pelestarian Cagar Budaya  
Sulawesi Selatan

---

**Kata Kunci:** Rumah Jabatan Gubernur, bangunan kolonial, ancaman.

## **A. Latar Belakang**

Kota Makassar merupakan kota yang memiliki sejarah panjang hingga terbentuk dan bisa kita saksikan hingga saat ini. Selain itu, kota Makassar juga sangat kaya dalam hal tinggalan

sumberdaya arkeologi. Kekayaan tinggalan tersebut dapat kita lihat pada tinggalan bangunan kolonial yang bervariasi seperti bangunan sekolah, rumah tinggal, rumah sakit, gedung perkantoran dan sarana ibadah.

Tinggalan sumberdaya arkeologi tersebut sampai saat ini masih dimanfaatkan. Dimana kita ketahui bahwa pemanfaatan sumberdaya arkeologi merupakan bagian dari pengelolaan sumberdaya arkeologi

atau biasa disebut Cultural Resources Management (CRM), CRM sering dikaitkan dengan upaya perlindungan dan pelestarian, konservasi (McGimsey dan Davis, 1977). Ketiga macam pengelolaan sumberdaya budaya yang meliputi pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan, sayangnya usaha-usaha pengelolaan tersebut tidak dibarengi dengan usaha evaluasi dari dampak yang ditimbulkan terutama dari aspek pemanfaatannya. Pemanfaatan bangunan kolonial pada Rumah Jabatan Gubernur dan beberapa bangunan kolonial yang ada disekitarnya sebagai tempat tinggal, perkantoran dan rumah makan telah mengakibatkan dampak negatif maupun positif terhadap tinggalan bangunan kolonial serta masyarakat di sekitarnya. Dimensi ancaman dan gangguan keamanan dari waktu ke waktu yang semakin berkembang dan modern sehingga dapat

menimbulkan berbagai macam ragam resiko dan dampaknya. Salah satunya adalah dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatnya kompleksitas persoalan masyarakat (social

**Tanpa adanya warisan budaya yang terpelihara masyarakat akan merasa terasing dari asal-usul lingkungannya, tidak punya orientasi pada masa lampau.**

exclusion) telah melahirkan beragam bentuk ancaman dan gangguan keamanan terhadap cagar budaya khususnya pada tinggalan Rumah Jabatan Gubernur, dan beberapa bangunan kolonial yang ada disekitarnya. Keberadaan bangunan kolonial tidak dapat dilepaskan dari konteks kota lama, karena merupakan salah satu bagian penting dalam perkembangan dan dapat juga menggambarkan perkembangan kota Makassar dari masa ke masa. Keberadaan rumah Jabatan Gubernur dan beberapa bangunan

kolonial yang ada disekitarnya, termasuk bangunan-bangunan bernilai historis dan arsitektonis yang ada di Kota Makassar, menampilkan cerita visual yang menunjukkan sejarah dari Kota Makassar, mencerminkan

perubahan-perubahan waktu, tata cara kehidupan dan budaya dari penduduknya. Tanpa adanya warisan budaya yang terpelihara masyarakat akan merasa terasing dari asal-usul lingkungannya, tidak punya orientasi pada masa lampau. Warisan budaya kota atau yang disebut dengan urban heritage adalah objek-objek dan kegiatan di perkotaan yang memberi karakter budaya yang khas bagi kota yang bersangkutan (Kota Makassar). Di sisi lain, pembangunan di sekitar Rumah Jabatan Gubernur dan beberapa bangunan kolonial yang ada disekitarnya berlangsung tanpa terkendali, sehingga menenggelamkan makna dari bangunan kolonial

tersebut.

Dengan demikian sumberdaya arkeologi membutuhkan pengelolaan yang tepat, sesuai dengan jenis dan kondisi keberadaannya. Hal tersebut dimaksudkan agar aset tersebut dapat terlindungi dan terjaga kelestariannya. Upaya pelestarian ini sangat dianggap penting mengingat bahwa sumberdaya arkeologi adalah bukti-bukti fisik atau sisa budaya yang ditinggal akan oleh manusia masa lampau pada bentang alam tertentu. Bukti-bukti ini akan sangat berguna untuk menggambarkan, menjelaskan serta memahami tingkah laku dan interaksi manusia sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perubahan sistem budaya dan alamnya (Tanudirdjo dan Nayati dalam Munandar, 2008: 17).

## **B. Metode**

Metode yang digunakan untuk mengetahui ancaman yang terjadi pada kawasan Rumah Jabatan Gubernur dan sekitarnya adalah hal

pertama yang dilakukan pengumpulan berbagai data baik dalam bentukpeta, buku, majalah, artikel, ataupun media cetak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan objek kajian. Data yang telah diperoleh kemudian diklasifikasi berdasarkan peruntukannya. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah observasi dan dari hasil observasi yang dilakukan dapat diperoleh data mengenai tingkat ancaman yang terjadi pada setiap bangunan baik dari segi pemanfaatan, penambahan bangunan, perubahan bentuk bangunan, dan jenis-jenis kerusakan yang terjadi pada bangunan dan lingkungannya. Selain itu juga dilakukan wawancara, hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat memperoleh informasi mengenai fungsi-fungsi awal dari bangunan dan mengenai perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisi lingkungan disekitar kawasan Rumah Jabatan Gubernur dan sekitarnya.

## **C. Pembahasan**

Bangunan Kolonial yang ada disekitar jalan Sudirman, Sungai Tangka dan Gunung Klabat, sampai saat ini masih dapat kita temukan namun lama kelamaan bangunan tersebut akan terkikis seiring dengan perkembangan waktu dan jaman apabila tidak segera mungkin dilakukan penanganan. Oleh sebab itu, melalui tulisan ini mencoba untuk mengetahui ancaman apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan atau perubahan pada bangunan kolonial tersebut. Hal lain yang ingin diketahui adalah pembabakan, perkembangan bangunan

**Kota adalah tujuan dan kenangan terakhir dari perjuangan dalam hal ini menjadi kebanggaan dari masa lalu untuk dipamerkan serta harapan masa depan untuk dicapai (Kostof, 1991).**

dari masa ke masa dan sebagai gambaran

**Tabel No.1, Daftar Bangunan Cagar Budaya**

NO	NO INV	NAMA SITUS	JALAN	KEL/DESA	KEC
1	327	Kantor Dinas Pariwisata(Mulo)	Jl. Jenderal Sudirman No. 23	Mangkura	Ujung Pandang
2	376	Rumah Jabatan Gubernur	Jl. Jenderal Sudirman No. 33	Sawerigading	Ujung Pandang
3	568	Kantor Polisi Militer Kota Makassar	Jl. Jenderal Sudirman No 40	Sawerigading	Ujung Pandang
4	575	SMU Kartika VII -I Chandra Kirana	Jl. Sungai Tangka No.13	Sawerigading	Ujung Pandang
5	580	Queenhead Sungai Tangka 17 A	Jl. Sungai Tangka No.17 A	Sawerigading	Ujung Pandang
6	581	Queenshead Sungai Tangka 17B	Jl. Sungai Tangka No. 17B	Sawerigading	Ujung Pandang
7	582	Queenshead Sungai Tangka 17C	Jl. Sungai Tangka No. 17C	Sawerigading	Ujung Pandang
8	583	Queenshead Sungai Tangka 17D	Jl. Sungai Tangka No. 17D	Sawerigading	Ujung Pandang
9	599	Rumah Jabatan Asisten Logistik Kodam VII Wirabuana	Jl. Sungai Tangka No. 11	Sawerigading	Ujung Pandang
10	603	Rumah Jabatan Asisten Operasional Kodam VII Wirabuana	Jl. Sungai Tangka No. 15 D	Sawerigading	Ujung Pandang
11	604	Rumah Jabatan Asisten Teritorial Kodam VII Wirabuana	Jl. Sungai Tangka No. E7/9	Sawerigading	Ujung Pandang
12	605	Persit Kartika Chandra Kirana Kodam VII Wirabuana	Jl. Sungai Tangka No. 1	Sawerigading	Ujung Pandang
13	606	Kantor Dharma Peristiwa Unit Kodam VII Wirabuana	Jl. Sungai Tangka No. 3	Sawerigading	Ujung Pandang
14	607	Rumah Jabatan Panglima Kodam VII Wirabuana	Jl. Sungai Tangka No. 5	Sawerigading	Ujung Pandang
15	608	Rumah Jabatan Kepala Staf Kodam VII Wirabuana	Jl. Sungai Tangka No. 7	Sawerigading	Ujung Pandang
16	624	Rumah Dinas Kepala Kesdam VII Wirabuana	Jl. Gunung Klaton No. E17	Sawerigading	Ujung Pandang
17	626	Rumah Dinas Staf TNI AU Wilayah Timur	Jl. Sungai Tangka No. D6	Sawerigading	Ujung Pandang
18	627	Paviliun	Jl. Sungai Tangka No. D6	Sawerigading	Ujung Pandang
19	628	Rumah Pangkosek Humas	Jl. Sungai Tangka No. D17	Sawerigading	Ujung Pandang
20	629	Rumah Asisten Personil Kesdam VII Wirabuana	Jl. Sungai Tangka No. D19	Sawerigading	Ujung Pandang
21	630	Rumah Dinas Ka. Pomdam VII Wirabuana	Jl. Sungai Tangka No. 21	Sawerigading	Ujung Pandang
22	631	Rumah Dinas Kesehatan Kodam XIV Hasanuddin	Jl. Gunung Klaton No. 1	Sawerigading	Ujung Pandang
23	632	Rumah Dinas Perwira Kodam XIV Hasanuddin	Jl. Gunung Klaton No. 3	Sawerigading	Ujung Pandang
24	633	Rumah Wakil Kepala Staf Kodam XIV Hasanuddin	Jl. Gunung Klaton No. 5	Sawerigading	Ujung Pandang
25	634	Rumah Dinas Perwira Kowilhan Gunung Klaton E18	Jl. Gunung Klaton No. E18	Sawerigading	Ujung Pandang
26	635	Rumah Dinas Perwira Kowilhan Gunung Klaton E19	Jl. Gunung Klaton No. E19	Sawerigading	Ujung Pandang
27	636	Rumah Dinas Komandan Kodim 1408 BS UP	Jl. Gunung Klaton No. E16	Sawerigading	Ujung Pandang
28	642	Rumah Dinas Kodam (IRDAM XIV Hasanuddin)	Jl. Sungai Tangka No. 23	Sawerigading	Ujung Pandang
29	643	Wisma Kodam VII Wirabuana	Jl. Sungai Tangka No. 27	Sawerigading	Ujung Pandang
30	644	Rumah Dinas Bank Indonesia	Jl. Sungai Tangka No. 39	Sawerigading	Ujung Pandang
31	645	Rumah Tinggal Sungai Tangka	Jl. Sungai Tangka No. 29	Sawerigading	Ujung Pandang
32	646	Rumah Tinggal Sungai Tangka 31	Jl. Sungai Tangka No. 31	Sawerigading	Ujung Pandang
33	647	Rumah Dinas Sungai Tangka 35	Jl. Sungai Tangka No. 35	Sawerigading	Ujung Pandang
34	648	Rumah Tinggal Sungai Tangka 33	Jl. Sungai Tangka No. 33	Sawerigading	Ujung Pandang

**Tabel No. 2 Daftar Bangunan Cagar Budaya dan Peruntukannya**

NO	NO INV	NAMA SITUS		Peruntukan Bangunan
		Nama Sekarang	Nama Lama	
1	327	Kantor Dinas Pariwisata	MULO	Bangunan Pemerintahan
2	376	Rumah Jabatan Gubernur	Gouverneur Woning	Bangunan Perumahan
3	568	Kantor Polisi Militer Kota Makassar		Bangunan Pemerintahan
4	575	SMU Kartika VII -I Chandra Kirana	Hollandsche Inlandsche School	Bangunan Pendidikan
5	580	Queenhead Sungai Tangka 17 F	Rumah Tinggal Perwira Belanda	Bangunan Militer
6	581	Queenshead Sungai Tangka 17B	Rumah Tinggal Perwira Belanda	Bangunan Militer
7	582	Queenshead Sungai Tangka 17C	Rumah Tinggal Perwira Belanda	Bangunan Militer
8	583	Queenshead Sungai Tangka 17D2	Rumah Tinggal Perwira Belanda	Bangunan Militer
9	599	Rumah Jabatan Asisten Logistik Kodam VII Wirabuana E -8/11	Rumah Tinggal Perwira Belanda	Bangunan Militer
10	603	Rumah Jabatan Asisten Operasional Kodam VII Wirabuana D15	Rumah Tinggal Perwira Belanda	Bangunan Militer
11	604	Rumah Jabatan Asisten Teritorial Kodam VII Wirabuana No. 9	Rumah Tinggal Perwira Belanda	Bangunan Militer
12	605	Persit Kartika Chandra Kirana Kodam VII Wirabuana No. 1	Rumah Tinggal Perwira Belanda	Bangunan Militer
13	606	Kantor Dharma Peristiwa Unit Kodam VII Wirabuana No. 1A	Rumah Tinggal Perwira Belanda	Bangunan Militer
14	607	Rumah Jabatan Panglima Kodam VII Wirabuana	Rumah Tinggal Perwira Belanda	Bangunan Militer
15	608	Rumah Jabatan Kepala Staf Kodam VII Wirabuana	Rumah Tinggal Perwira Belanda	Bangunan Militer
16	624	Rumah Dinas Ka.Kesdam VII Wirabuana	Rumah Sakit Militer	Bangunan Militer
17	626	Rumah Jabatan KAS Koopsau II	Rumah Tinggal Perwira Belanda	Bangunan Militer
18	628	Rumah Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara	Rumah Tinggal Perwira Belanda	Bangunan Militer
19	629	Rumah Jabatan Asisten Personil Kesdam VII Wirabuana	Rumah Tinggal Perwira Belanda	Bangunan Militer
20	630	Rumah Tinggal Adjaradji	Rumah Tinggal	Bangunan Perumahan
21	631	Rumah Dinas Ka.Kesehatan Kodam XIV Hasanuddin	Rumah Tinggal Perwira Belanda	Bangunan Militer
22	632	Rumah Dinas Perwira Kodam XIV Hasanuddin	Rumah Tinggal Perwira Belanda	Bangunan Militer
23	633	Rumah Wakil Kepala Staf Kodam XIV Hasanuddin	Rumah Tinggal Perwira Belanda	Bangunan Militer
24	634	Rumah Dinas Perwira Kowilhan Gunung Klaton E18	Rumah Tinggal Perwira Belanda	Bangunan Militer
25	635	Rumah Jabatan IRDAM VII Wirabuana NO E 19	Rumah Tinggal Perwira Belanda	Bangunan Militer
26	636	Rumah Dinas Komandan Kodim 1408 BS UP	Rumah Tinggal Perwira Belanda	Bangunan Militer
27	643	Rumah Jabatan AS Intelkasdam VII Wirabuana	Jl. Sungai Tangka No. 27	Bangunan Militer
28	644	Rumah Dinas Bank Indonesia	Rumah Tinggal	Bangunan Perumahan
29	645	Rumah Tinggal Sungai Tangka 29	Rumah Tinggal	Bangunan Perumahan
30	646	Rumah Tinggal Sungai Tangka 31	Rumah Tinggal	Bangunan Perumahan
31	647	Rumah Dinas Sungai Tangka 35	Rumah Tinggal	Bangunan Perumahan
32	648	Rumah Tinggal Sungai Tangka 33	Rumah Tinggal	Bangunan Perumahan
33		Rumah Tinggal Sungai Tangka	Rumah Tinggal	Bangunan Perumahan
34		Rumah makan kaisar	Wisma Corimac	Bangunan Perumahan
35	625	Rumah Sakit Sentosa	Hospitalweg	Bangunan Kesehatan

**Sumber (Laporan zonasi Rumah jabatan Gubernur dan sekitar**

perubahan Kota Makassar dari masa ke masa. Namun, sebelum menguraikan mengenai ancaman yang terjadi pada bangunan tersebut maka terlebih dahulu akan diuraikan secara tabelaris nama dan keletakan bangunan tersebut. Hasil pengamatan lapangan dan penelusuran pustaka diketahui bahwa pada

Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan dan beberapa bangunan tinggalan kolonial yang ada disekitarnya dapat mengungkap beberapa aspek terutama mengenai aspek fisik dan aspek sosial budaya dari sebuah kota. Kota adalah tujuan dan kenangan terakhir dari perjuangan dalam hal ini menjadi kebanggan dari masa lalu untuk

dipamerkan serta harapan masa depan untuk dicapai (Kostof, 1991). Hal ini mengakibatkan masyarakat memiliki keinginan untuk ke kota dengan harapan agar dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik, semangat tersebut dapat mengubah bentuk kota melalui beberapa kegiatan yang dilakukan dalam kehidupannya. Bentuk

kota selalu berubah dan akhirnya dapat mencerminkan karakter budaya, politik, sosial budaya, dan ekonomi yang dianut oleh masyarakat. Aspek perubahan yang terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pemanfaatan/ penggunaan bangunan cagar budaya, penambahan bangunan baru disekitar cagar budaya, perubahan struktur ruang kota serta

kerusakan dan pelapukan yang terjadi pada bangunan cagar budaya. Untuk mengetahui aspek-aspek yang terjadi pada bangunan cagar budaya maka akan diuraikan sebagai berikut

## 1. Perubahan Struktur Ruang Kota

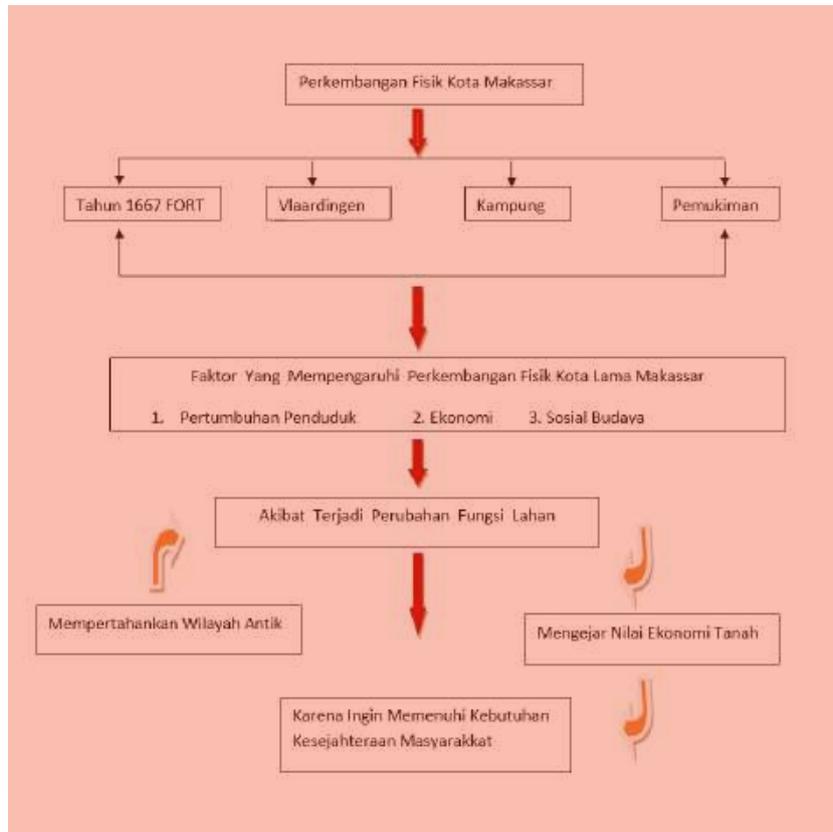
Pertambahan jumlah penduduk sangat berperan dalam dinamika

perkembangan kota. Pertambahan penduduk dalam wilayah perkotaan selalu diikuti oleh

mengakibatkan tumbuhnya beberapa bangunan baru seperti rumah toko (ruko) dan rumah kantor (rukan), hotel, kantor swasta, dan rumah makan serta beberapa fasilitas lainnya. Hal ini akan sangat berpotensi menggantikan fungsi bangunan, rumah tinggal masyarakat lokal,

peningkatan kebutuhan akan ruang, untuk menunjang kenyamanan kehidupan warganya. Fenomena ini mengakibatkan terjadinya perubahan struktur ruang sebuah kota, perubahan struktur kota ini dapat diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk, ekonomi, politik dan sosial dan hal ini dapat

mengganggu eksistensi bangunan kuna bersejarah dan berdampak negatif pada usaha-usaha pelestarian bangunan kuna bersejarah dan kawasan kota lama yang merupakan sumberdaya arkeologi. Hal ini harus disadari bahwa bangunan kuna beserta kawasannya merupakan hasil proses sejarah budaya bangsa



Skema 1, Alur Perkembangan Fisik Makassar

yang merupakan aset budaya. Aset budaya adalah bukti nyata warisan dan kekayaan budaya bangsa yang sangat penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan bagi masyarakat. Posisi Kota Makassar sebagai pusat kegiatan ekonomi dan menjadi satelit (hub) bagi wilayah Indonesia bagian timur menjadi daya tarik yang kuat bagi para pendatang sehingga memper cepat status Kota Makassar sebagai kota metropolitan. Pusat Kota Makassar menjadi tempat akumulasi penduduk dan aktivitas manusia yang sangat kompleks, sehingga muncul fenomena keterancaman bangunan kuno. Harus

**Sisi yang lain, banyak masyarakat etnis Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja yang ke luar wilayah Sulawesi Selatan untuk sementara di luar wilayah kelompoknya seperti menempuh pendidikan di Pulau Jawa.**

disadari bahwa mobilitas penduduk ke Kota Makassar hingga sekarang menunjukan hal signifikan. Hal ini dilihat dari banyaknya perusahaan swasta yang berkembang dengan menggunakan sumberdaya manusia lokal dan dari luar Kota Makassar. Sisi yang lain, banyak masyarakat etnis Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja yang ke luar wilayah Sulawesi Selatan untuk sementara di luar wilayah kelompoknya seperti menempuh pendidikan di Pulau Jawa. Sirkulasi keluar-masuknya penduduk sangat banyak mempengaruhi kebudayaan yang telah

**sebab kota tidak hanya menyangkut fisik dan visual bangunan namun juga menyangkut sosial budaya masyarakat yang bermukim di dalamnya.**

ada sebelumnya di Kota Makassar. Penduduk yang masuk Kota Makassar akan membawa identitas budaya tempatnya berasal, demikian pula penduduk yang keluar dari Kota Makassar. Kenyataan ini membuat identitas dan nilai-nilai budaya banyak yang terkikis, termodifikasi, berubah dan hilang. Agar hal ini tidak terjadi diperlukan sebuah bentuk pengelolaan kota, khususnya kota kuno secara menyeluruh termasuk menghidupkan kembali identitas-identitas budaya Kota Makassar, sebab kota tidak hanya menyangkut fisik dan visual bangunan namun juga menyangkut sosial budaya masyarakat yang bermukim di dalamnya. Berikut akan diuraikan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan



Pemukiman penduduk disekitar bangunan cagar budaya (dok. BPCB. Makassar)

struktur ruang kota yaitu.

### a. Pertumbuhan Penduduk

Akselerasi pembangunan dan perkembangan berbagai sarana dan prasarana kota, mengakibatkan jumlah penduduk terus meningkat. Jika pada akhir abad ke 19 jumlah

**Menurut hasil sensus tahun 1930 penduduk Kota Makassar mencapai sekitar 85.00014 jiwa dan membuat Kota Makassar menjadi kota terbesar kedua di luar Pulau Jawa setelah Kota Palembang.**

penduduk Kota Makassar sekitar 20 ribuan jiwa, maka setelah penaklukan penguasa - penguasa lokal di Sulawesi Selatan oleh Pemerintah Hindia Belanda di tahun 1905 -1906, jumlah penduduknya terus berlipat. Di

tahun 1905 jumlah penduduk Makassar menjadi 26 ribu jiwa (Harvey 1989; Sarkawi 1997; Pradadimara, 2005). Menurut hasil sensus tahun 1930 penduduk Kota Makassar mencapai sekitar 85.00014 jiwa dan membuat Kota Makassar menjadi kota terbesar kedua di luar Pulau Jawa setelah Kota Palembang. Sekitar tahun 1961, penduduk Makassar terus

# BPCB GORONTALO



Bangunan hotel, perkantoran, bank dan ruko disekitar bangunan cagar budaya

meningkat jumlahnya menjadi 384.000 jiwa. Sebelum tahun 1971, penduduk Makassar telah meningkat menjadi 435.000 jiwa. Perkiraan tentang laju pertumbuhan penduduk menjadi sulit

karena perluasan batas - batas kota pada tahun 1971 sehubungan dengan perluasan wilayah Kota Makassar (McTaggart, 1976; 87-88).

Penduduk yang

awalnya dihitung sebagai orang di luar kota, ternyata merupakan penduduk Kota Makassar yang bermukim di

pinggiran kota. Di era tahun 1990-an, Kota

**Selain sebagai ibukota Propinsi Sulawesi Selatan, juga letak geografisnya yang strategis sebagai pintu gerbang kawasan timur Indonesia. Implikasinya adalah derasnya arus urbanisasi dari propinsi lain di Pulau Sulawesi maupun daerah lain di kawasan timur Indonesia**

Makassar dihuni oleh lebih dari 944.372 jiwa dengan tingkat pertumbuhan sebesar 2,63%. Jumlah ini meningkat pada tahun 1994 menjadi 1.048.201 jiwa dan 1.112.688 jiwa pada tahun 2000. Kemudian tahun 2004 menjadi 1.179.023 jiwa yang terdiri atas 582.382 laki-laki dan 596.641 perempuan. Ini menunjukkan bahwa terjadi penambahan penduduk sebesar 79.004

jiwa dalam waktu empat tahun terakhir atau mengalami tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata 1.64% pertahun yang tersebar di 14 kecamatan. Kota Makassar merupakan daerah yang laju pertumbuhan penduduknya tinggi. Selain sebagai ibukota Propinsi Sulawesi Selatan, juga letak geografisnya yang strategis sebagai pintu gerbang kawasan timur Indonesia. Implikasinya adalah derasnya arus urbanisasi dari propinsi lain di Pulau Sulawesi maupun daerah lain di kawasan timur Indonesia, baik yang mencari lapangan kerja

**Pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat ini menyebabkan terjadinya perubahan yang signifikan terhadap masyarakat dan bangunan itu sendiri**

maupun menempuh pendidikan tingkat universitas yang banyak tersedia di Kota Makassar.

Hasil penelusuran pustaka diketahui bahwa pertumbuhan jumlah penduduk terus bertambah sehingga mengakibatkan jumlah rumah tangga juga terus bertambah. Pertambahan penduduk dari masa ke masa menjadikan pemukiman semakin padat dan kota menjadi meluas. Pembangunan pendukung Kota Makassar ini antara lain menjadikan banyaknya bangunan-bangunan lama di Makassar yang dihancurkan dan diganti dengan bangunan berciri modern. Perombakan ini sebetulnya berkait erat dengan pelebaran jalan dan penambahan ruas jalan untuk kenyamanan penduduk Kota Makassar dan menunjang fungsi Kota Makassar sebagai daerah hub Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur.



Salah satu bangunan cagar budaya yang telah diubah dan menjadi rumah tinggal modern (Dok. BPCB Makassar)

## **b. Ekonomi**

Keadaan ekonomi Kota Makassar semakin berkembang terlihat dengan semakin padatnya bangunan-bangunan yang berada di sekitar jalan Jenderal Sudirman, dan jalan Gunung Klabat serta disekitar jalan Sungai Saddang. Hal ini dapat kita lihat seperti pembangunan rumah toko disekitar jalan

Gunung Klabat dan jalan Sungai Saddang, pembangunan gedung perkantoran dan hotel disekitar jalan Jenderal Sudirman. Pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat ini menyebabkan terjadinya perubahan yang signifikan terhadap masyarakat dan bangunan itu sendiri

## **C. Sosial Budaya**

Penduduk Kota Makassar yang mayoritas beretnis

Bugis dan Makassar, dalam kehidupan sehari-hari masih banyak terikat oleh norma-norma dan aturan adat yang disebut pangadereng (Bugis) atau pangadakkang (Makassar). Pangadareng atau pangadakkang dapat diartikan sebagai keseluruhan norma yang mengatur seseorang harus bertingkah laku terhadap sesama manusia, terhadap

timbang balik, dan terhadap sumber gerak dinamika masyarakat. Pangadereng atau pangadakkang disebut sistem adat Bugis-Makassar yang terdiri dari lima pokok yakni ;

1. *Ade'*, terdiri dari: *Ade' akkalabinengeng* atau norma mengenai perkawinan serta hubungan kekerabatan dan *ade' tana* atau norma mengenai bernegara;
2. *Ade bicara*, hak-hak dan kewajiban seseorang untuk mengajukan kasus kepengadilan;
3. *Rapang*, dianggap keramat karena berwujud, seperti perumpamaan, kias atau analogi yang menganjurkan perbuatan dan etika dalam hidup;
4. *Wari'*, susunan dalam hidup

bermasyarakat untuk memelihara garis keturunan dan lapisan sosial

dalam masyarakat; dan

**Secara harafiah *siri'* berarti malu. *Siri'* menjadi segala upaya manusia Bugis -Makassar merealisasi diri dalam kehidupan pribadi dan kemasyarakatannya.**

5. *Sara'* (hukum syariat), unsur pranata-pranata dan hukum Islam yang melengkapi keempat

unsur sebe lumnya (Mattul ada, 1998; 25).

Ke lima unsur pokok tersebut terjalin satu sama lain sebagai satu kesatuan dalam dalam pikiran orang Sulawesi Selatan pada umumnya dan Masyarakat Bugis-Makassar pada khususnya. Dalam kehidupan sehari-harinya ke lima unsur itu terkandung dalam konsep *siri' na paccé* (Bugis: *siri' na pessé*).

Secara harafiah *siri'* berarti malu. *Siri'* menjadi segala upaya manusia Bugis -

Makassar merealisasi diri dalam kehidupan pribadi

dan kemasyarakatannya. *Siri'* membawa masyarakat ke dalam interaksi sosial.

*Siri'* terikat oleh *pessé* (perih), berarti daya dorong yang kuat untuk me

ngambil tindakan *siri'* (harga diri). *Pessé* meliputi prinsip solidaritas yang tumbuh dari karakter pribadi yang memiliki getteng (keteguhan), lempu' (kejujuran), acca (kecerdasan), dan warani (keberanian) (Abdullah, 1985).

Maka, bila manusia Bugis-Makassar tidak memiliki keteguhan, kejujuran, kecerdasan dan keberanian, maka dia tidak memiliki harga diri atau *siri'*. Untuk itu masyarakat Bugis-Makassar selalu berusaha untuk teguh, jujur, cerdas dan berani dalam kehidupan bermasyarakat baik ketika dia berada di dalam komunitasnya maupun di

luar komunitasnya. Mattulada (1998) mengemukakan tiga hal tentang konsep siri' yakni;

1. Siri' emmi ri onroang ri lino , artinya hanya dengan siri' orang hidup di dunia. Dalam ungkapan ini, termaktub arti siri' sebagai hal yang memberikan identitas sosial dan martabat kepada seseorang;
2. Mate ri siri' na, artinya mati dalam siri' atau mati untuk menegakkan martabat diri, yang dianggap satu hal yang terpuji dan terhormat; dan
3. Mate siri', artinya orang yang sudah kehilangan martabatnya adalah bangkai hidup. Demi kian halnya, orang Bugis - Makassar yang mate siri' akan melakukan jallo'(amuk) hingga ia mati sendiri. Jallo' yang demikian ini disebut napatettonngi siri'na atau napaentenggi siri' na artinya ditegakkan kembali martabat dirinya. Masyarakat Bugis-Makassar memiliki mobilitas yang cukup

luwes. Mattulada (1998), mengutarakan bahwa pada zaman raja-raja, masyarakat golongan elit tidak hanya ditempati oleh kaum bangsawan, tetapi juga oleh kaum *to maradeka* (orang merdeka ) yang mempunyai kelebihan-kelebihan. Mereka yang tergolong kelompok elite. Selain anak arung (anak/keturunan bangsawan) juga terdapat; (1) *to panrita* (cendikawan agama) dan *to acca* (cendikiawan umum); (2) *to sugi*, yaitu orang kaya karena keuletan bekerja sehingga ia dapat menjadi orang terpan dang dan mengatur kesejah teraan masyarakat pada

umumnya; (3) *to warani*, yaitu pemberani yang senantiasa siap untuk tampil sebagai pembela negara dalam mempertahankan negara dari serangan musuh; dan (4) *to sulesana*, yakni orang yang mempunyai keahlian khusus seperti teknokrat yang mempunyai ide dan karya guna kepentingan bangsa. Keempat golongan tersebut menempati struktur sosial yang elite dalam masyarakat. Sehingga seseorang yang berasal dari rakyat biasa, dapat menempati struktur elite tersebut jika memiliki kelebihan-kelebihan seperti *to panrita*, *to acca*, *to sugi*, *towaranai*, dan *to sulesana*.

**Di Sulawesi Selatan pada umumnya, khususnya di Kota Makassar terdapat pembagian kelas yang sangat tajam antara bangsawan dan yang bukan bangsawan. Sebagai contoh, di kantor-kantor pemerintahan, sapaan yang digunakan bukan sapaan Bapak atau Ibu, tetapi sapaan gelar kebangsawanan, seperti puang (Bugis) atau karaeng (Makassar)**

Menurut H.J Fredericy (1963), pada dasarnya ada dua kelompok yaitu; (1) Bangsawan (ana' karaeng); (2) Orang merdeka (tu'maradeka); dan (3) Kelompok hamba (ata) (Fredericy, 1963; Abdullah, 1985). Kelompok bangsawan merupakan lapisan teratas, yang memiliki kedudukan politik, sosial dan ekonomi lebih tinggi. Mereka ini yang dapat menduduki kepemimpinan dalam masyarakat. Sementara kelompok hamba bukan berarti budak, namun karena perjalanan hidupnya mengalami nasib yang kurang baik. Dalam kehidupan masyarakat kelompok ini tetap dipertahankan sebagai manusia yang wajar. Seorang ata

tidaklah tertutup kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya menjadi manusia yang termasuk kategori merdeka. Di zaman sekarang, pelapisan sosial tidak lagi seketat itu. Anggota masyarakat bangsawan dan non-bangsawan sudah lebih terbuka bergaul. Namun sebagai komunitas, tetap saja ada kelas sosial yang membedakan. Di Sulawesi Selatan pada umumnya, khususnya di Kota Makassar terdapat pembagian kelas yang sangat tajam antara bangsawan dan yang bukan bangsawan. Sebagai contoh, di kantor-kantor pemerintah, sapaan yang digunakan bukan sapaan Bapak atau Ibu, tetapi sapaan gelar kebangsawanan, seperti

**Selain itu terdapat pula kecenderungan untuk menggunakan sapaan puang atau karaeng kepada pejabat yang non-bangsawan. Hal ini terjadi karena pejabat tersebut berpendidikan tinggi, sehingga bawahannya memanggil dengan sapaan layaknya bangsawan.**

puang (Bugis) atau karaeng (Makassar) kepada pejabat atau pimpinan, yang memang kebanyakan memang jabatan dari kalangan bangsawan karena mereka dulunya lebih mudah mengakses untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu terdapat pula kecenderungan untuk menggunakan sapaan puang atau karaeng kepada pejabat yang non-bangsawan. Hal ini terjadi karena pejabat tersebut berpendidikan tinggi, sehingga bawahannya memanggil dengan sapaan layaknya bangsawan. Fenomena tersebut menandakan masyarakat Bugis–Makassar memberi apresiasi yang tinggi terhadap orang yang berpendidikan. Strata sosial masyarakat sangat jelas atas pembagian kelompok-kelompok dan golongannya dalam menempati beberapa bangunan kolonial yang

ada di kecamatan Ujung Pandang tepatnya di jalan Sungai Tangka, jalan Gunung Klabat, jalan Jenderal sudirman, dan jalan Sultan Hasanuddin. Hal ini dapat kita lihat pada bangunan Queenshead yang ada di jalan Sungai Tangka yang terletak dibagian belakang dari rumah-rumah pejabat dan ukuran bangunan ini lebih kecil dan lebih sederhana serta bangunan ini diperuntukkan untuk prajurit.

Sedangkan bangunan yang ditempati oleh pejabat (Gubernur, petinggi TNI dan AU) ukuran bangunan cenderung lebih besar. Beberapa bangunan yang ditempati oleh pejabat swasta (pertamina dan Bank Indonesia) dan rumah dokter mereka umumnya telah mengubah beberapa bagian dari bangunan ini, hal tersebut dilakukan untuk

**Sedangkan bangunan yang ditempati oleh pejabat (Gubernur, petinggi TNI dan AU) ukuran bangunan cenderung lebih besar.**

memberikan identitas mengenai strata sosial mereka. Tanpa mereka sadari bahwa bangunan yang ditempati adalah bangunan kolonial yang memiliki nilai yang cukup tinggi dalam sejarah kota.

## **2. Pemanfaatan/ penggunaan Bangunan Cagar Budaya**

Perkembangan kota Makassar yang semakin pesat menyebabkan beberapa bangunan cagar budaya mengalami

perubahan fungsi dan penambahan bangunan pada cagar budaya tersebut. Selain itu, karena perkembangan masyarakat yang semakin pesat dengan populasi penduduk yang cukup tinggi mengakibatkan beberapa pembangunan fasilitas yang dibangun disekitar cagar budaya yang secara tidak langsung akan mengakibatkan terjadinya

perubahan bentuk kota lama menjadi kota modern.

## **a. Perubahan Fungsi Bangunan/ Ruang**

Perubahan fungsi bangunan cagar budaya /ruang diakibatkan oleh kebutuhan pemerintah dan masyarakat yang semakin berkembang hal ini dapat kita lihat dan temukan dari beberapa bangunan cagar budaya yang telah mengalami perubahan fungsi dan jaringan jalan seperti pada;

### **1. Gedung MULO**

Gedung MULO yang didirikan pada tahun 1927 oleh Pemerintah Belanda diperuntukkan untuk kepentingan pendidikan tingkat menengah dengan nama lembaga tersebut bernama Sekolah Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO). Akan tetapi sekarang bangunan ini telah mengalami perubahan fungsi dimana bangunan ini sekarang dijadikan sebagai Kantor Dinas Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan



Kinderen voor de Muloschool te Makassar op Celebes, Jalan Hospitalweg, 20 April 1924 (dalam Laporan Zonasi Rumah Jabatan



Gedung MULO sekarang (Kantor Dinas Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan) (dok. BPCB Makassar, 2011).

perubahan fungsi bangunan ini tidak diketahui alasan dan kapan perubahannya

## **2. Rumah Dinas Ka. Kesdam VII Wirabuana**

Rumah Dinas Ka. Kesdam VII Wirabuana atau dulunya lebih dikenal dengan nama Rumah Sakit Militer. Seiring dengan

perkembangan kota dan berdasarkan dari hasil pengamatan dilapangan maka diketahui bahwa sekarang bangunan tersebut telah mengalami perubahan fungsi dimana bangunan ini sekarang dijadikan sebagai Rumah Dinas Ka. Kesdam VII Wirabuana perubahan

fungsi dari bangunan tersebut tidak diketahui alasan dan kapan perubahannya.

## **3. Rumah Tinggal Nomor 29**

Pada awalnya bangunan ini difungsikan sebagai rumah tinggal, namun berdasarkan dari hasil observasi yang dilakukan pada kegiatan zoning maka diketahui bahwa bangunan ini telah berubah fungsi sebagai yayasan konsorsium La Ilaha Illallah.

### **a. Penambahan Bangunan Baru**

Akibat dari perkembangan kota yang semakin berkembang menyebabkan lahan yang tersedia semakin berkurang menyebabkan pemukiman penduduk semakin mengancam keberadaan bangunan kolonial yang ada disekitar jalan Sungai Tangka, jalan Gunung Klabat, dan jalan Jenderal Sudirman sebagai cagar budaya, kelayakan padang (visibilitas) sangat terbatas dengan adanya bangunan-bangunan



Rumah Dinas Ka. Kesdam VII Wirabuana (sekarang) (Bangunan Bekas Rumah Sakit Militer) (dok. BPCB Makassar, 2011).



Rumah Tinggal No. 29 yang sekarang menjadi yayasan konsorsium La Ilaha Illallah (dok. BPCB Makassar, 2011).

pemukiman dan kantor pemerintah, swasta serta pembangunan hotel yang ada di sekeliling bangunan tersebut. Penambahan bangunan baru dapat kita temukan pada bangunan yang ada di jalan Sungai Tangka, jalan Gunung Klabat, jalan Jenderal

Sudirman dan jalan Hasanuddin adalah sebagai berikut;

1. Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan pada bagian belakang sisi timur terdapat pos jaga bagian depan dan belakang, tempat parkir, aula, mesjid, ruang rumah

tangga, baruga dan mess. Selain itu, baru dari Rumah Sakit sentosa yang tepat di depan rumah Jabatan Gubernur (sisi barat).

1. Rumah Jabatan Panglima Komandan VII Wirabuana pada bagian depan sisi selatan berupa pos jaga, garasi, dan penambahan pada bagian teras depan.

2. Bangunan Persit Kartika Chandra Kirana Kodam VII Wirabuana juga mengalami penambahan bangunan tepatnya pada bagian belakang sisi timur berupa ruangan yang diperuntukkan untuk bendahara sedangkan disebelah utara adalah bangunan Mushollah dan disebelah timur adalah ruangan kebudayaan.

3. Kantor Dharma Pertiwi Unit Kodam VII Wirabuana berupa penambahan di bagian teras depan dan bangunan kantor tersebut.

4. Rumah Jabatan Kasdam VII Wirabuana berupa pos jaga.

5. Rumah jabatan yang ada di jalan Gunung



Bangunan tambahan pada Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan (dok. BPCB Makassar, 2011).

Klabat penambahan bangunan baru berada di sisi timur berupa bangunan ruko (rumah toko).

6. Kantor Polisi Militer yaitu penambahan berupa pos jaga yang terletak dibagian depan tepatnya pada sisi timur bangunan tersebut dan kantin.

7. Kantor Dinas Pariwisata penambahan bangunan baru berupa bangunan untuk pengurus daerah XXIII yang terletak di sisi

selatan bangunan mesjid Nurut Tarbiyah dan kantor yayasan kebudayaan Sulawesi Selatan yang ada di sisi timur dan di sisi barat terdapat lapangan pantiri utama dan bangunan bank bjb.

8. Rumah tinggal disekitar jalan Sungai Tangka penambahan bangunan baru adalah berupa pemukiman penduduk yang semakin padat dan pembangunan rumah sakit serta rumah toko. Pembangunan bangunan

baru ini dapat kita lihat pada sisi timur dari bangunan rumah tinggal tersebut.

9. Rumah Sakit Sentosa penambahan bangunan baru yang dilakukan pada bangunan ini yaitu berupa pembongkaran bangunan dan penambahan ruang pasien.

Penambahann bangunan baru disekitar bangunan cagar budaya akan memberikan efek visibilitas atau mengganggu kelayakan



Bangunan perumahan yang menempel pada dinding bangunan cagar budaya (dok. BPCB Makassar, 2011).

pandang dari bangunan itu sendiri. Selain itu bangunan ruko-ruko dan beberapa bangunan perkantoran swasta serta bangunan hotel, rumah sakit dan bangunan fasilitas lainnya dapat memberikan efek yang sama pula dan secara tidak langsung akan memberikan dampak buruk pada bangunan cagar budaya itu sendiri. Bangunan berlantai 2 dan 3 yang memiliki ketinggian lebih tinggi dari bangunan cagar

budaya, maka dengan sendirinya akan mengurangi jarak pandang untuk mengapresiasi dari bangunan itu sendiri.

### **3. Jaringan Jalan Perkembangan**

infrastruktur berupa jalan di Kota Makassar telah dimulai sejak sekitar abad ke-17. Di kota ini telah terbentuk yang sejajar dengan garis bibir pantai dan membujur arah utara-selatan. Empat jalan utama yang membujur, paling barat adalah Cinastraat

(Passerstraat) dan sekarang menjadi Jalan Nusantara, Templestraat (sekarang Jalan Sulawesi), Middlestraat (sekarang Jalan Bonerate) dan Burgherstraat (sekarang Jalan Jampea). Jalan-jalan tersebut dipotong oleh jalan yang melintang timur-barat, sehingga jalan di Kota Makassar sekitar abad ke -17 telah memperlihatkan polagrid. Di sekitar abad ke-17 sistem drainase di Kota Makassar juga telah ada. Benteng Vredenburg yang



De Prins Hendriklaan (Dulu) dengan Lapangan Hasanuddin, Jalan Jend. Sudirman, 2011 (sekarang) dok. BPCB Makassar, 2011.

terletak di ujung timur Hoogepad, dikelilingi oleh parit yang airnya berasal dari kanal yang terhubung dengan laut di sebelah barat.

Melihat perkembangan kota saat ini maka sangat berpengaruh terhadap jaringan jalan terutama jalan yang ada disekitar Rumah Jabatan Gubernur, gedung MULO dan Rumah tinggal disekitar jalan Sungai Tangka dan jalan Gunung Klabat. Hal ini bisa kita lihat dengan tidak teraturnya jalur transportasi (kendaraan roda dua dan roda empat) yang ada disekitar kawasan bangunan cagar budaya. Kondisi tersebut mengakibatkan kondisi lahan cagar budaya semakin sempit.

#### 4. Kerusakan dan Pelapukan

Rumah Jabatan Gubernur dan beberapa tinggalan kolonial yang ada disekitarnya merupakan tinggalan arkeologi yang telah mengalami kerusakan dan pelapukan yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pengaruh alam, unsur-unsur kimia, biologis, dan perbuatan manusia (vandalisme). selain itu, karena faktor usia yang cukup tua dan bahan sumberdaya arkeologi yang sangat rentan terhadap faktor cuaca, lebih-lebih indonesia yang termasuk daerah beriklim tropis lembab, maka kondisi tersebut akan menyebabkan terjadinya proses kerusakan dan pelapukan pada

sumberdaya arkeologi. seluruh sumberdaya arkeologi baik yang sudah maupun yang belum dipugar harus selalu diperhatikan dalam pemeliharannya agar kondisi keterawatannya tetap terjaga dengan baik (Haryono, 2005 : 2 ). Bangunan kolonial yang terdapat di kota makassar ini tepatnya di jalan Jenderal Sudirman, jalan Sultan Hasanuddin, jalan Sungai Tangka dan jalan Gunung Klabat yang terdiri dari bangunan pemerintahan, bangunan perumahan, bangunan militer dan bangunan pendidikan serta bangunan kesehatan. Tinggalan ini berada dalam lingkungan kawasan pusat Kota

Makassar, sehingga telah mengalami ketergangguan pembangunan fasilitas kota. hal ini sangat mempengaruhi terhadap mutu kualitas baku mutu yang terjadi baik pada objek tinggalannya maupun pada lingkungan fisik pembentuknya. Tingkat ketergangguan tinggalan arkeologi di kawasan ini dapat dihitung dalam kisaran tercemar, berubah, berkurang dan hilang. Penurunan bobot kualitas baku-mutu tersebut disebabkan oleh beberapa faktor dan berdasarkan dari hasil observasi yang dilakukan di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan dan beberapa bangunan kolonial yang ada disekitarnya yang terbagi atas beberapa kelompok peruntukan bangunan maka dapat diketahui bahwa ada beberapa hal yang dapat menjadi ancaman kelestarian bangunan tersebut berupa kerusakan mekanis, pelapukan fisis, pelapukan khemis dan pelapukan biotis.

### D. Penutup

Ancaman yang terjadi pada kawasan Rumah Jabatan Gubernur dan bangunan sekitarnya akan terus berlanjut, apabila tidak segera dilakukan penetapan terhadap kawasan tersebut. Maka dari itu, berdasarkan dari hasil pengamatan dan pengumpulan data pustaka maka dapat disimpulkan bahwa ancaman yang terjadi pada bangunan kolonial tersebut adalah akibat dari pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal ini pemilik rumah dan masyarakat sekitar kawasan tersebut. Untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar dan untuk tetap menjaga kelestarian dari Cagar Budaya, maka salah satu upaya yang harus dilakukan adalah melakukan sosialisasi terhadap pemerintah dalam hal ini pemerintah kota Makassar, dan masyarakat setempat.



- Anonim. 1992. Pola Perkembangan Kota dan Arsitektur Ujung Pandang. Proyek Penelitian dan Survei Terapan 1991 -1992. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kotamadya Daeah Tingkat II Ujung Pandang
- Anonim.2011. Laporan Zonasi Rumah Jabatan Gubernur dan sekitarnya. Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar.
- Attoe, Wayne. 1988. Perlindungan Benda Bersejarah. Dalam Perencanaan Kota Edisi Kedua, Anthony J. Catanese dan James C. Snyder. Jakarta: Erlangga
- Charman. 2002. Archaeology and Heritage : An Introduction. London – New York: Continuum.
- Danisworo, M. 1996. Penataan Kembali Pusat Kota, Suatu Analisis Proses, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, VII (22): 70-76
- Darvill, Timothy. 1995. Managing Archaeology. Cooper dkk. (Ed). New York: Routledge Tj Press Ltd
- McTaggart W. Donald. 1976. Kebijakan Pembanguan Kota di Indonesia. Kasus Ujung Pandang, Sulawesi Selatan . Masyarakat Indonesia. Tahun ke-III, No. 1
- Monoharto, Goenawan. 2000. Hari Merah Putih di Makassar. Dalam Makassar Doeloe Makassar Kini Makassar Nanti . Makassar: Yayasan Losari Makassar
- Moehammad, Munandar. 2008. Membangun Identitas Masyarakat Melalui Kota Kuna Makassar. Tesis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Pearson, Michael and Sharon Sullivan. 1995. Looking After Heritage Places : The Basic of Heritage Planning, for Managers, Landowners and Administrators. Melbourne: Melbourne University Press
- Poelinggomang, 1995, Benturan Budaya di Bandar-Bandar Pesisir Sulawesi Selatan, Ujung Pandang: Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.
- Pradadimara, Diaz. 2005. Penduduk Kota, Warga Kota, dan Sejarah Kota: Kisah Makassar. Dalam Kota Lama Kota Baru, Sejarah Kota -kota di Indonesia. Freek Colombijn, dkk (Ed). Yogyakarta: Ombak
- Sarkawi. 2001. Perkembangan Pendidikan Kolonial di Makassar , 1876-1949. Tesis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Soetomo. 2006. Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

# PROBLEMA MENDASAR KONSERVASI SITUS BUDAYA BENTENG PUTRI HIJAU, DELITUA, PROVINSI SUMATERA UTARA

Erond Litno Damanik  
Universitas Negeri Medan  
[eronddamanik@yahoo.com](mailto:eronddamanik@yahoo.com)

*Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami problema mendasar konservasi yakni pelestarian dan perlindungan pada situs budaya Benteng Putri Hijau yang terletak di Delitua, Namurambe, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Masalah pada kajian ini dirumuskan yakni: problema mendasar apa sajakah yang dihadapi pada konservasi pada situs budaya Benteng Putri Hijau Delitua?. Kajian ini dijalankan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pada kajian ini, UU no. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya UU no. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah maupun Burra Charter tentang International Council on Monuments and Sites menjadi referensi terhadap konservasi. Data-data arkeologi hasil penelitian tahun 1979-2009 maupun data sejarah dipergunakan menjelaskan aspek kelampauan objek kajian. Selain itu, keterlibatan aktif di BPH menambah informasi dan data-data terkait konservasi yang up to date. Analisis SWOT dipergunakan untuk menemukan novelty bahwa faktor internal yakni keterancaman yang tinggi serta faktor eksternal terutama regulasi, ketersediaan masterplan, zonasi dan delineasi maupun aktor-aktor yang terlibat menjadi problema mendasar konservasi situs. Ketidacermatan memahami problema mendasar ini menjadi kendala krusial konservasi BPH yang penting dan mendesak.*

**Kata-kata kunci:** konservasi, problema mendasar, benteng Putri Hijau.

## 1. Pendahuluan

Hasil penelitian dan rekomendasi Ekskavasi Penyelamatan (*rescue excavation*) atas inisiatif Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala, BP3 (kini Balai Pelestarian Cagar Budaya) Banda Aceh tahun 2008, maupun penelitian komprehensif atas inisiatif Pemkab Deliserdang tahun 2009 yang dilaksanakan oleh Balai Arkeologi Medan (kini Balai Arkeologi Sumatera Utara), mengharuskan penting dan mendesaknya upaya konservasi (*conservation*) berupa perlindungan dan pelestarian Benteng Putri Hijau di Delitua (selanjutnya disingkat BPH) sebagai Cagar Budaya (selanjutnya disingkat CB).

Sejauh ini, perlakuan konservasi terhadap BPH masih dalam bentuk langkah-langkah penyelamatan berupa himbuan-himbuan Pemerintah Daerah Kabupaten Deliserdang kepada masyarakat (pemilik lahan di area BPH maupun pengembang perumahan) untuk tidak merusaknya lebih lanjut.



Sisi utara BPH yang dirusak dan kompleks perumahan, 2017 Sumber: Dokumentasi penulis

Himbauan itu dicetuskan melalui pembuatan dan pemasangan pamflet maupun menyurati kepala desa di sekitar BPH. Namun, himbuan ini sama sekali tidak terbukti efektif karena kondisi BPH semakin mengkhawatirkan. Dalam hal ini, BPH dibiarkan dalam keadaan rentan, beresiko, dan terancam punah.

Namun, hingga tahun 2019 (saat artikel ini ditulis), konservasi BPH belum juga menampilkan tanda-tanda dan hasil yang signifikan. Realitas ini tampak pada beberapa kenyataan,

berupa: (i) BPH belum ditetapkan dan di register sebagai Cagar Budaya sebagaimana diamanatkan UU no. 11 Tahun 2010, (ii) tidak adanya regulasi berupa Peraturan Bupati maupun Peraturan Daerah yang mengatur tentang BPH, (iii) tidak adanya dokumen berupa *masterplan* yang memuat

**Pada badan benteng yang tersisa ini terdapat tanaman warga berupa pisang, singkong, jambu atau durian sehingga berpotensi menggerus benteng**

zonasi berupa zona inti dan zona pendukung dalam rencana konservasi BPH, (iv) kesulitan konservasi BPH karena 95 persen

tanggul atau benteng sudah rata dengan tanah serta dari 18,3 hektar areal

BPH masuk dalam rencana 40 hektar pembangunan 1.300-1.500 unit rumah. Pembangunan perumahan ini hampir mencapai 100 persen yang berarti bahwa seluruh lahan BPH terasa sulit untuk di konservasi, (v) material tanggul atau benteng yang tersisa di sebelah utara BPH adalah kombinasi alam terjal dan kerukan manusia sehingga rentan dan beresiko tinggi pada keterancaman. Pada badan benteng yang tersisa ini terdapat tanaman warga berupa pisang, singkong, jambu atau durian sehingga berpotensi menggerus benteng (Gambar 1 di bawah ini), dan (vi) tinggalan arkeologis pada ekskavasi tahun 2008 dan 2009 yang ditemukan bukanlah *in situ* tetapi cenderung pada *use-related secondary context* dan *natural secondary context*. Kecenderungan ini merupakan dampak *cultural transform* dari aktifitas warga di BPH.

Kenyataan di atas berdampak pada konservasi BPH. Dalam arti, kondisinya yang belum ditetapkan sebagai CB, baik tingkat

Kabupaten, Provinsi bahkan Nasional berdampak pada tidak adanya langkah-langkah kongkrit konservasi. Jadi, jikapun konservasi BPH hingga hari ini masih gagal dilakukan maka kegagalan itu bukan disebabkan oleh faktor tunggal tetapi multi-faktor yang mempengaruhinya, yakni faktor internal (dari dalam BPH) maupun faktor eksternal (di luar BPH).

Artikel ini bertujuan

untuk mendeskripsikan dan memahami problema mendasar konservasi BPH sebagaimana kami (penulis) terlibat di dalamnya sejak tahun 2008 hingga saat ini. Bagaimanapun juga, CB bersifat unik, rapuh, langka, tidak dapat digantikan oleh teknologi dan material yang sama serta tidak dapat diperbaharui sebagai

**Bagaimanapun juga, CB bersifat unik, rapuh, langka, tidak dapat digantikan oleh teknologi dan material yang sama serta tidak dapat diperbaharui sebagai wujud dan bukti (evidence) aktifitas manusia di masa lalu.**

wujud dan bukti (*evidence*) aktifitas manusia di masa lalu. Karena itu, setiap CB seperti BPH sejatinya di konservasi guna menjadi bukti sejarah pada masyarakat masa kini. Dukungan regulasi nasional yakni UU no. 11 Tahun 2010 tentang *Cagar Budaya* mengharuskan adanya konservasi

terhadap objek Cagar Budaya. Kenyataan sama tertuang pada UU no. 9 Tahun 2015 tentang *Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2014*

*Pemerintahan Daerah* dimana kebudayaan menjadi salah satu tugas wajib Pemerintah Daerah. Pentingnya konservasi juga menjadi ketentuan pada *International Council on Monuments and Sites (ICOMOS)* seperti tertuang pada *Burra Charter* sesuai *cultural significance* yang terkandung di dalamnya (ICOMOS, 2013:3).

Di Indonesia, konservasi

harus merujuk dan mematuhi jalan pikiran sesuai ketentuan UU no. 11 Tahun 2010. Ketentuan dimaksud bahwa suatu situs budaya harus dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dikelola semaksimal mungkin bagi kesejahteraan rakyat. Kemudian, suatu situs budaya harus di register mengikuti mekanisme sesuai UU yakni pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan dan pemeringkatan. Konservasi dalam hal ini menyangkut proses panjang yang dimulai dari tahap paling awal yakni perlindungan hingga pelestarian. Konservasi ini membutuhkan keterlibatan instansi (pemerintah daerah, pemerintah pusat, akademisi, balai arkeologi, BPCB, TACB maupun masyarakat) untuk menentukan urgensi dan signifikansinya sesuai amanat UU CB.

Merujuk UU no. 11 Tahun 2010, pelestarian diartikan sebagai "upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara

melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya". Pengertian ini mengandung tujuan yakni: (i) melestarikan warisan budaya bangsa dan

**Konservasi menurut *International Council on Monuments and Sites (ICOMOS)* yang dicatat pada *Burra Charter* adalah '*all the processes of looking after a place so as to retain its cultural significance*' (ICOMOS, 2013: 2).**

warisan umat manusia; (ii) meningkatkan harkat dan martabat bangsa; (iii) memperkuat kepribadian bangsa; (iv) meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan (v) mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional. Dalam hal ini, tiga aspek pelestarian mencakup: (i) perlindungan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran, (ii) pengembangan melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi, dan (iii)

pemanfaatan untuk kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata. Jadi, keseluruhan kebijakan dan langkah konservasi harus merujuk pada regulasi ini. Dalam arti, bahwa semua CB di Indonesia harus dilindungi dan menjadi tanggungjawab pemerintah (Akbar, 2014: 202).

Konservasi menurut *International Council on Monuments and Sites (ICOMOS)* yang dicatat pada *Burra Charter* adalah '*all the processes of looking after a place so as to retain its cultural significance*' (ICOMOS, 2013: 2). Keseluruhan proses konservasi ini meliputi pemeliharaan, preservasi, restorasi, rekonstruksi dan adaptasi. Tujuan konservasi dimaksudkan untuk '*to retain the cultural significance of a place*' yang menjadi bagian integral dari pengelolaan sesuai *cultural significance*. Dalam hal ini, *places of cultural significance* dimaksudkan agar tetap

terlindungi (*safeguarded*), tidak beresiko (*not put at risk*) atau dibiarkan dalam keadaan rentan (*left in a vulnerable state*).

Konservasi harus menghormati material fisik (*fabric*) berupa elemen, *fixtures*, *contents* dan objek yang mencakup penggunaan (*use*), asosiasi (*association*) dan makna (*meaning*). Keseluruhan aktifitas ini, konservasi harus menggunakan pendekatan hati-hati (*cautious approach*) untuk mengubah sebanyak yang diperlukan tetapi perubahan sekecil mungkin

(*changing as much as necessary but as little as possible*) (ICOMOS, 2013:3).

Hal lain yang perlu dipertimbangkan pada konservasi adalah

jejak tambahan (*traces of addition*), alterasi dan perawatan sebelumnya terhadap material fisik merupakan bukti sejarah

yang dapat digunakan sebagai bagian dari signifikansinya.

Kegiatan konservasi harus membantu dan tidak menghalangi pemahaman terhadap situs. Perubahan pada suatu bagian tidak boleh mendistorsi bukti fisik serta bukti lainnya yang tidak didasarkan pada dugaan semata. Aktifitas konservasi harus menggunakan dan melibatkan penge tahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*) dan lintas disiplin ilmu (*disciplines*) yang

berkontribusi bagi studi dan perawatan. Konservasi harus mengidentifikasi dan mempertimbangkan semua aspek budaya dan kepentingan alam (*aspects of cultural and natural significance*).

Berdasar pada pertimbangan ini maka tingkat signifikansi budaya relatif (*relative degrees of*

*cultural significance*) menyebabkan tindakan konservasi yang berbeda-beda pada setiap situs.

## **Setiap langkah-langkah konservasi sejatinya dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan perubahan dan kerusakan yang lebih parah.**

Tujuan akhir konservasi bukan hanya melindungi dan melestarikan CB tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan pariwisata. Dalam hal ini, situs CB sejatinya dikelola secara efektif, terarah dan berkelanjutan tanpa mengubah wujud aslinya (Sari dkk, 2017: 54).

Setiap langkah-langkah konservasi sejatinya dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan perubahan dan kerusakan yang lebih parah. Perubahan sekecil apapun dapat mengurangi nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Hal ini disebabkan karena situs cagar budaya memberikan gambaran tentang

tingkat-tingkat kemajuan dalam kehidupan sosial ekonomi, penguasaan teknologi, dan kehidupan religi (Wibowo, 2014:3). Selain itu, kebijakan konservasi situs cagar budaya berupa perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan memerlukan konsep dasar dalam rupa *masterplan* dan dokumen implementasi rinci (Rahardjo, 2013:16). Kekurangcermatan dalam memahami permasalahan dan menganalisis kondisi yang ada mengakibatkan kegagalan konservasi. Selain itu, mengingat situs cagar budaya sangat bervariasi maka pengelolaannya membutuhkan strategi komprehensif dengan

**mengingat situs cagar budaya sangat bervariasi maka pengelolaannya membutuhkan strategi komprehensif dengan memperhatikan keunggulan dan keunikan masing-masing.**

memperhatikan keunggulan dan keunikan masing-masing.

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan kebijakan konservasi di wilayah administratifnya seperti diamanatkan UU no. 9 Tahun 2015 tentang *Pemerintahan Daerah*. Pada regulasi ini, kebudayaan menjadi salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah (Setiawan dkk, 2013:69). Karena itu, sebenarnya tidak terdapat pertentangan antara UU no. 9 Tahun 2015 dengan UU no. 11 tahun 2010 menyangkut konservasi BPH. Dalam hal ini, konservasi BPH menjadi salah satu urusan wajib Pemerintah Kabupaten Deliserdang. Konservasi CB di daerah dapat dilakukan melalui pembuatan regulasi khusus sebagai ketentuan pengelolaan di daerah yang berimplikasi pada kebutuhan anggaran konservasi (Rosyadi dkk,

**Konservasi CB di daerah dapat dilakukan melalui pembuatan regulasi khusus sebagai ketentuan pengelolaan di daerah yang berimplikasi pada kebutuhan anggaran konservasi (Rosyadi dkk, 2014:832).**

2014:832). Namun, bukan hanya BPH yang tidak mendapat konservasi di Sumatera Utara tetapi juga situs lainnya seperti Kota Cina yang mulai diekskavasi tahun 1979, dan selama 5 tahun (2013-2018) oleh EFEO Prancis (Damanik, 2019c:332), Kota Rentang (diekskavasi Puslit Arkenas tahun 2009), pulau Kampai di Langkat, Gua Togi Ndrawa di Nias, candi Simangambat di Mandailing, percandian di Padanglawas dan lain-lain. Mengacu pada ketentuan UU no. 11 Tahun 2010, UU no. 9 Tahun 2015 dan ICOMOS tahun 2013 di atas maka konservasi yang telah dilakukan terhadap BPH masih sebatas penelitian dan himbauan saja. Sementara aspek konservasi lainnya yakni penyelesaian lahan, pengamanan, zonasi, revitalisasi, pemugaran, revitalisasi, adaptasi serta

pemanfaatan untuk kepentingan sosial samasekali belum tersentuh. Kenyataan ini terbukti kan oleh kegagalan konser vasi sejak tahun 2008 hingga 2019.

Karena itu, menjadi pertanyaan ialah apakah setiap hasil ekskavasi arkeologis pada situs tertentu maka menjadi kewajiban untuk dikonservasi?. Selain itu, persoalan pelik yang sering menjadi hambatan konservasi adalah menyoal 'mau diapakan' dan 'seperti apa' pemanfaatannya. Terkait dengan BPH yang menjadi objek kajian ini, ekskavasi arkeologi sudah membuktikan bahwa BPH adalah situs yang wajib, penting dan mendesak di konservasi namun tanda-tanda ke arah itu belum terlaksana hingga saat ini. Persoalan inilah yang menjadi masalah utama

dalam kajian ini.

Suatu pertanyaan yang lazim dilontarkan menyangkut konservasi

**Suatu pertanyaan yang lazim dilontarkan menyangkut konservasi bukanlah menyoal pembiayaan tetapi adalah *masterplan* konservasi yang memuat pra, selama dan pasca konservasi.**

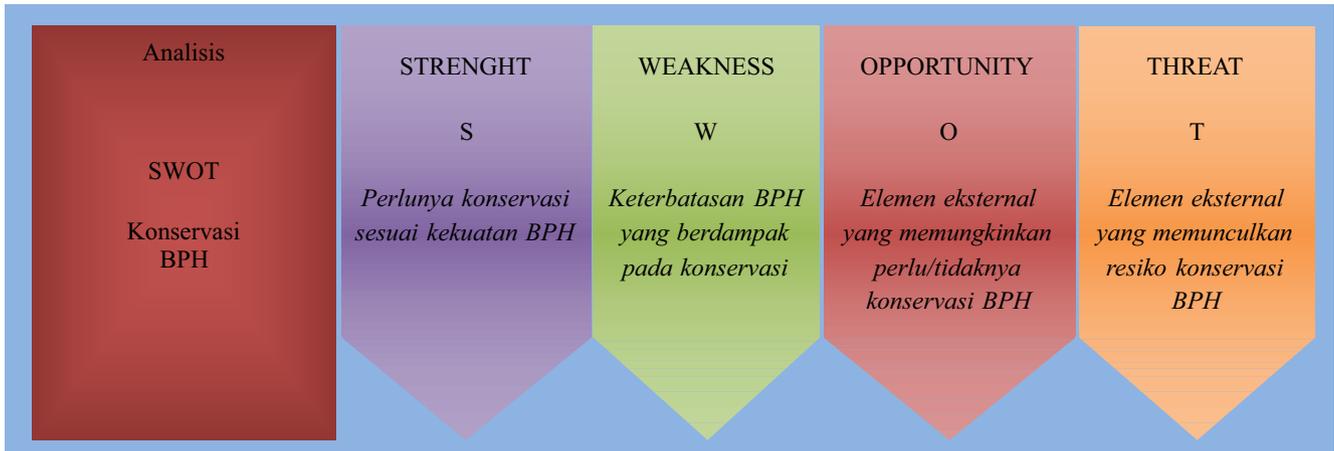
bukanlah menyoal pembiayaan tetapi adalah *masterplan* konservasi yang memuat pra, selama dan pasca konservasi. Menyoal

besarnya biaya konservasi seperti pembebasan misalnya, tentu saja dapat dilakukan melalui mekanisme *multi-years* atau mengikutsertakan *stakeholder*. Terakhir, mengapa kami (penulis) membuat tema ini sebagai kajian khusus pada artikel ini?. Alasannya tidak semata-mata karena *cultural significance* yang dikandung BPH tetapi lebih disebabkan keterlibatan kami di BPH sejak tahun 2008 hingga 2019. Karena itu, kami memiliki pengalaman sekaligus pengetahuan yang menjadi kendala konservasi BPH. Selain itu, kami juga menjadi salah

satu anggota TACB-SU sehingga berkewajiban melakukan konservasi sesuai amanat UU CB. Karena itu, pada wilayah yang lebih luas, artikel ini berkontribusi bagi konservasi situs CB dimanapun di Indonesia.

## 2. Metode kajian

Artikel ini bukanlah kajian arkeologi ataupun sejarah namun lebih kepada upaya konservasi terhadap aktifitas arkeologi dan sejarah yang sudah final di BPH. Dalam arti bahwa hasil penelitian Arkeologi dan Sejarah telah merekomendasikan urgensi dan signifikansi terhadap BPH. Namun, data-data arkeologi dan sejarah turut dihadirkan dalam artikel ini guna meyakinkan urgensi dan signifikansi konservasi. Kajian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Cara ini dipilih guna mengungkap problema mendasar konservasi yakni perlindungan dan pelestarian BPH seperti diamanatkan UU no. 11 Tahun 2010, UU no. 9 Tahun 2015 maupun regulasi yang lebih



Gambar 2 Struktur konseptual SWOT konservasi BPH

menginternasional seperti *Burra Charter* tahun 2013.

Data-data arkeologi pada artikel ini merujuk pada tinggalan arkeologis (*archaeological remains*) seperti benteng, keramik, *dirham*, gerabah, *Sumatralith* yakni bukti arkeologis (*archaeological evidence*), berupa temuan permukaan (*surface findings*) maupun ekskavasi (*excavation finding*). Pada kajian ini, data-data arkeologis diperoleh dari hasil-hasil penelitian BPCB, Balai Arkeologi, artikel jurnal, maupun disertasi yang mengkaji tentang BPH. Data-data ini diperlukan untuk mendukung urgensi dan signifikansi BPH untuk di konservasi (dilindungi dan dilestarikan).

Data-data sejarah diperlukan sebagai pendukung kontekstual terhadap aspek kesejarahan terhadap data-data arkeologi. Keseluruhan data-data sejarah ini akan berbicara tentang temuan-temuan *in situ*, asal usul dan faktor yang mempengaruhi keberadaannya di BPH. Dalam hal ini, data-data sejarah akan mengungkap interaksi dan jalur perdagangan internasional dengan manca

negara di Asia terutama Cina, Vietnam, Burma, dan Thailand. Selain itu, data sejarah diperlukan untuk narasi legenda Putri Hijau yang populer pada empat etnik yang memiliki keterkaitan dengan BPH, Kerajaan Aru maupun Kerajaan

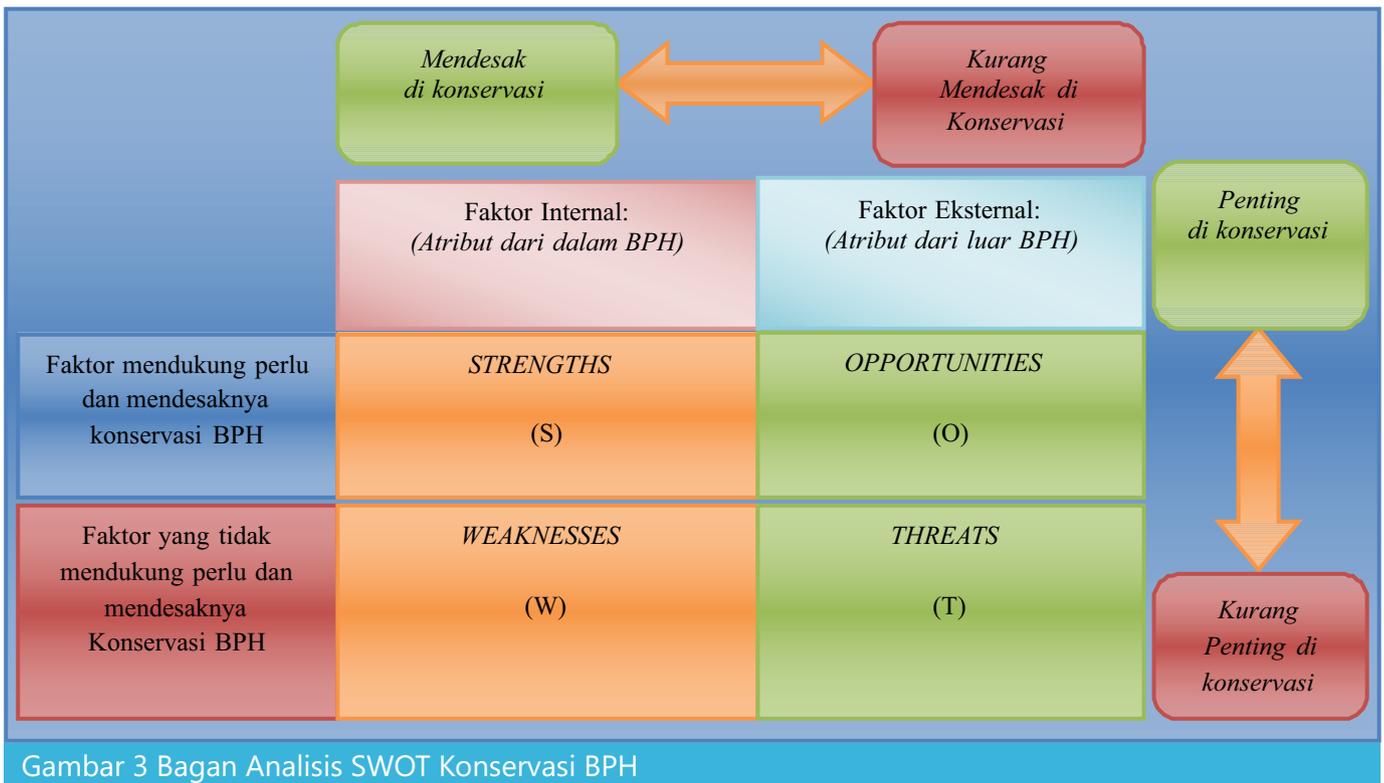
**Data-data sejarah diperlukan sebagai pendukung kontekstual terhadap aspek kesejarahan terhadap data-data arkeologi. Keseluruhan data-data sejarah ini akan berbicara tentang temuan-temuan *in situ*, asal usul dan faktor yang mempengaruhi keberadaannya di BPH.**

Aceh pada era Iskandar Muda. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan kajian ini dipergunakan analisis SWOT. Dalam hal ini, analisis SWOT diperlukan untuk menimbang kebijakan konservasi yaitu perencanaan strategis guna mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*). Analisis ini diterapkan dengan memilah berbagai faktor yang mempengaruhi keempat faktor dalam bentuk matrik guna menemukan keuntungan (*advantage*) dari peluang (*opportunities*), mengatasi kelemahan (*weakness*) yang mencegah keuntungan (*advantage*) dari peluang (*opportunities*). Kemudian menentukan kekuatan (*strengths*) menghadapi ancaman (*threats*) dan

**Dampak positif dan negatif konservasi dipilah dan dipertimbangkan secara cermat dan mendetail guna menemukan kekuatan dan kelemahan yang dihadapi dalam upaya konservasi.**

cara mengatasi kelemahan (*weakness*) yang menimbulkan ancaman (*threats*) (Humphrey, 2005:2). Struktur konseptual SWOT konservasi BPH tampak pada Gambar 2. Berdasar pada struktur konseptual SWOT di atas, dianalisis setiap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman konservasi BPH. Setiap elemen ini dibandingkan dengan faktor internal dan eksternal dipilah dan dipertimbangkan secara cermat guna mendapatkan keputusan yakni: (i) pentingnya konservasi dan sifatnya mendesak atau (ii) kurang pentingnya konservasi dan sifatnya yang kurang mendesak. Adapun yang disebut faktor internal mencakup kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) yang terdapat pada objek yang dikonservasi yakni BPH. Dalam hal ini, komponen sumberdaya manusia

(pemerintah, tim ahli, peneliti) dan pengalaman di bidang konservasi menjadi sangat penting, pembiayaan, investasi dan pendapatan maupun proses mencakup sasaran dan tujuan. Dampak positif dan negatif konservasi dipilah dan dipertimbangkan secara cermat dan mendetail guna menemukan kekuatan dan kelemahan yang dihadapi dalam upaya konservasi. Faktor eksternal mencakup kesempatan (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) berupa tren konservasi lokal dan global, kepentingan individu, politik, dan lain-lain yang turut mempengaruhi konservasi. Melalui analisis ini, dimungkinkan untuk mengidentifikasi faktor positif dan negatif, baik dari dalam (situs) maupun luar (regulasi, pemerintah, TACB dan masyarakat) terhadap kebijakan konservasi. Tujuan analisis ini adalah untuk mengembangkan kesadaran terhadap semua faktor yang mempengaruhi perencanaan termasuk



pengambilan keputusan dan tujuan konservasi BPH dikemudian hari. Analisis SWOT ditampilkan pada Gambar 3,

Beranjak dari Kerangka SWOT konservasi BPH di atas, maka keempat komponen ini selanjutnya dianalisis guna mengetahui problema mendasar konservasi BPH. Analisis ini dilakukan dengan dua mekanisme yakni: (i) menggunakan kekuatan (S) untuk memanfaatkan peluang (O) serta menghilangkan

kelemahan (W) dengan memanfaatkan peluang (O), dan (ii) menggunakan kekuatan (S) untuk menghindari ancaman (T) dan meminimalkan kelemahan (W) untuk menghindari ancaman (T). Analisis yang mempertimbangkan kekuatan terhadap peluang ( $S > O$ ) mencerminkan perluasan atau pengembangan yang dapat dilakukan pada konservasi BPH sedangkan analisis kekuatan terhadap ancaman ( $S > T$ ) dan analisis kelemahan

terhadap ancaman ( $W > T$ ) merupakan konsolidasi yang dapat dilakukan atau diperlukan pada konservasi BPH. Melalui mekanisme ini, ditemukan potensi BPH yakni penting dan mendesaknya konservasi ataupun problema mendasar pada upaya dan kebijakan konservasi.

## C. Temuan dan diskusi

### 1. Historiografi dan penelitian di situs BPH

Referensi akademik berupa disertasi yang pertama sekali mencatat BPH diperoleh dari Miksic yang berjudul:

*'Archaeology, Trade and Society in Northeast Sumatra'* (Miksic, 1979).

Menurut nya, BPH merupakan permukiman kuno seluas 18,3 hektar (Miksic, 1979:48) yang terletak di sisi Sungai (*lau*) Patani yakni hulu Sungai Deli yang bermuara ke Selat Malaka yang menjadi jalur Maritim Sutra (Miksic, 2013:41). Pasca Miksic, BPH tidak mendapatkan perhatian apapun kecuali

tulisan-tulisan yang mengaitkannya dengan Kerajaan Aru di *Deli Lama* (Delitua) sebelum berpindah ke Labuhandeli (Husny, 1975:53; Sinar 1977:3;

1986:67). Selain itu, hingga tahun 2007, BPH sama sekali tidak pernah di ekskavasi walaupun telah dicatat pada laporan purbakala kolonial atau *Oudheidkundig Verslag* (Callenfels, 1925:11). Perhatian terhadap BPH bermula dari kunjungan E.E. McKinnon, seorang Arkeolog berkebangsaan Inggris ke situs ini pada awal Mei 2008. Pada saat itu, McKinnon menemukan buldozer sedang merusak badan benteng menuju Pancuran Putri Hijau untuk keperluan perumahan. Kemudian, McKinnon melaporkan pengrusakan ini kepada

**Pada saat itu, McKinnon menemukan buldozer sedang merusak badan benteng menuju Pancuran Putri Hijau untuk keperluan pembangunan perumahan.**

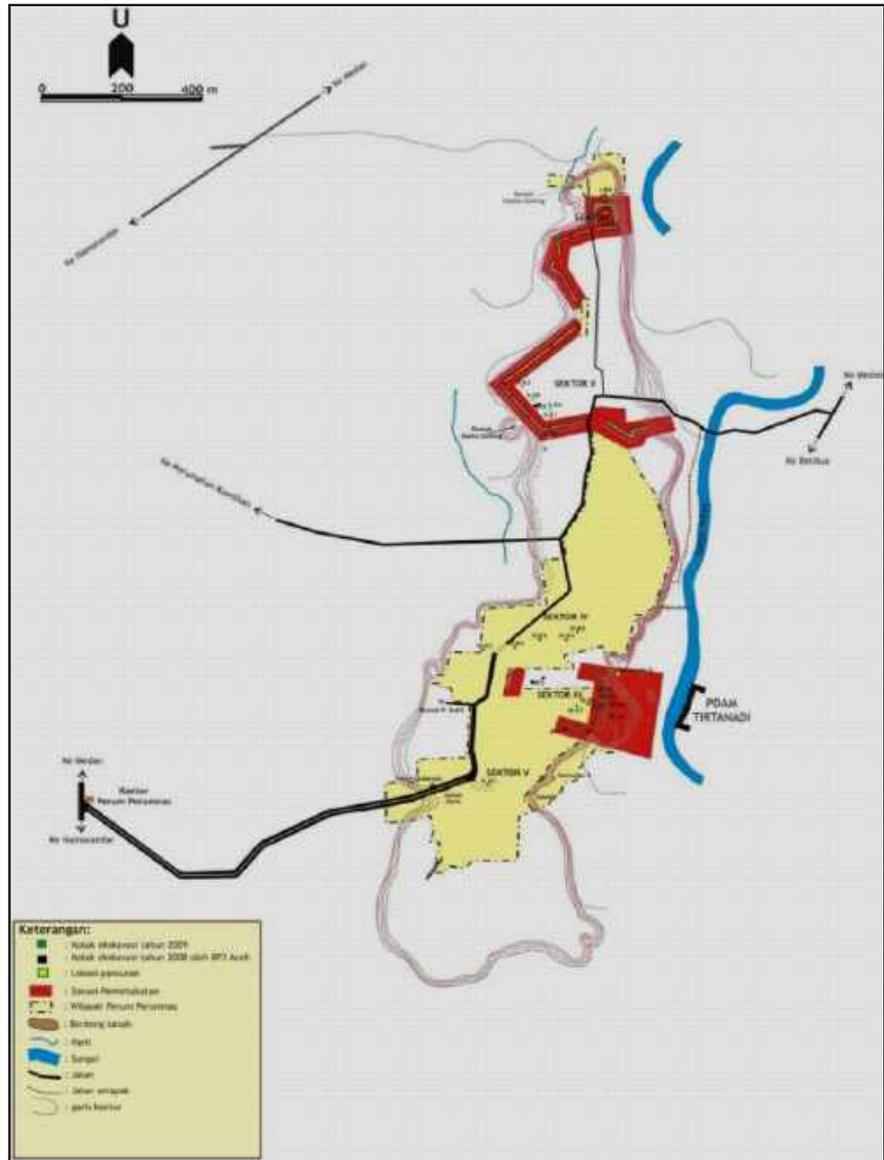
kami di Pusat Studi Sejarah dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Medan (Pussis-Unimed). Pada 27 Mei 2008, kami melakukan kunjungan untuk pertama kalinya ke BPH dan menemukan

sebagian benteng telah rata dengan tanah. Pada saat kunjungan, patok-patok kayu sudah

**Pemkab Deliserdang menyatakan samasekali tidak mengetahui bahwa lokasi dimaksud merupakan bahagian dari situs budaya.**

tertancap yang menandai pembangunan perumahan Putri Deli (Hidayat, 2008a). Sebagai catatan, kunjungan McKinnon ke BPH tahun 2008 bukanlah yang pertama namun telah dijelajahnya tahun 1969. Studi doktornya (S3) diselesaikan di *Cornell University* tahun 1984 dengan objek kajian yakni Situs Kota Cina Medan Marelán. Puluhan artikel ilmiah telah ditulis tentang Kota Cina, Pulau Kampai, dan Kota Rentang (McKinnon, 1974; 1975; 1977; 1978; 1984; 2009; & 2012). Riwayat penelitian itu telah mencatat dirinya

sebagai pelopor ekskavasi situs arkeologi di pantai timur Sumatra Utara (Damanik, 2016a:143). Berita pengrusakan BPH ini menjadi viral di media nasional karena Andy Riza Hidayat (wartawan Kompas) yang selalu berkomunikasi dengan kami. Sejumlah media lokal di Sumatera Utara seperti Analisa, Waspada, Sinar Indonesia Baru (SIB), dan lain-lain turut menyoroiti pengrusakan ini. Pemberitaan tersebut bukannya menghentikan langkah pengrusakan tetapi justru semakin menggerusnya. Pada bulan Agustus 2008, beberapa 'rumah contoh' sudah berdiri di BPH (Hidayat, 2008b) dan pada bulan Oktober 2008, sebanyak 40 rumah kopel telah berhasil didirikan (Wismi, 2008). Sejumlah pihak terkait pengrusakan BPH saling lempar tanggungjawab. Pihak pengembang perumahan menyatakan sudah mengantongi izin pembangunan. Hal sama dikemukakan Perumahan Umum Perumahan Nasional (Perum Perumnas) Regional I



Gambar 4, Peta Situs BPH di Delitua

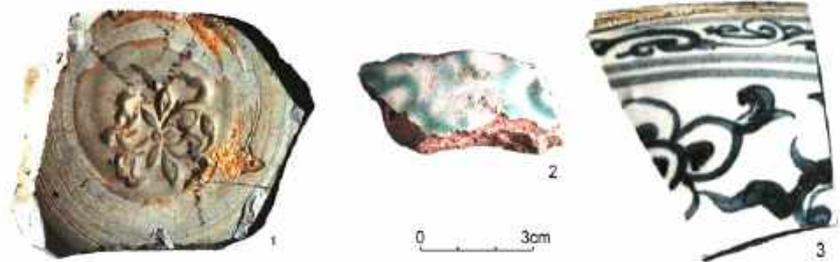
Sumatra Bagian Utara bahwasanya izin diberikan atas rekomendasi Pemkab Deliserdang. Pemkab Deliserdang menyatakan samasekali tidak mengetahui bahwa lokasi dimaksud merupakan bahagian dari situs budaya. Hal sama dikemukakan warga yakni sama sekali tidak

mengetahui bahwa tanah milik mereka adalah situs budaya. Sebagai catatan, Pemerintah Kabupaten Deliserdang pada tahun 2004 memberi izin pembangunan untuk 1.300-1.500 rumah di kawasan seluas 40 hektar termasuk diantaranya BPH seluas 18 hektar. Pembangunan fisiknya

baru berjalan pada tahun 2008 (Hidayat, 2008b). Pussis-Unimed terus melakukan perlawanan terhadap pengrusakan ini. Hampir setiap minggu berita pengrusakan terbit pada surat kabar lokal. Selain melalui media surat kabar, Pussis-Unimed juga melakukan sejumlah seminar, *focus group discussion (FGD)*, dan ceramah yang mengundang sejumlah ahli dan instansi terkait. Pada akhirnya, polemik pengrusakan BPH mengundang keprihatian dari berbagai instansi seperti Balai Arkeologi Medan (*kini Balai Arkeologi Sumatera Utara*), Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Banda Aceh (*kini Balai Pelestarian Cagar Budaya, BPCB*), Badan Warisan Sumatera (BWS) dan Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. Pada bulan Oktober 2008, atas inisiatif dari BP3 Banda Aceh, dilakukanlah Ekskavasi Penyelamatan (*rescue excavation*) dengan membuka beberapa kotak gali untuk *test pit*. Pada awalnya, ekskavasi ini dimaksudkan untuk

memastikan kebenaran BPH sebagai situs. Pada bulan Desember 2008, hasil penelitian diekspos di Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara yang dihadiri oleh instansi

antropologi. Hasil riset 2009 mengafirmasi luas BPH berdasar disertasi Miksic yakni 18,3 hektar seperti tampak pada Gambar 4. Sejumlah temuan-temuan



Gambar 5 Sampel fragmen keramik impor di BPH

dari Pemkab Deliserdang (BP3, 2008). Kemudian, pada bulan April-Mei 2009, atas inisiatif Pemkab Deliserdang dilakukan ekskavasi yang lebih luas. Ekskavasi ini dilakukan dengan membuka 6 (enam) kotak gali berukuran 3 x 3 meter bahkan ada berukuran 2 x 5 meter. Selain itu, pada badan benteng dilakukan *trench excavation* yang dimaksudkan untuk memastikan apakah benteng bersifat alamiah atau justru kreasi manusia (Disbudpar, 2009). Ekskavasi ini melibatkan lintas disiplin ilmu seperti arkeologi, sejarah, dan

arkeologis (*archaeological findings*) yang menjadi bukti arkeologis (*archaeological evidences*) ialah artefak metal (*metal artifacts*) seperti *Dirham* (mata uang Aceh) dan peluru, artefak berupa fragmen keramik (*ceramics fragment*), gerabah (*earthenware fragment*), fragmen gelas (*glass fragments*) maupun artefak berbahan batu seperti "*Sumatralith*" (*Hoabinhian monofacial stone axe*). Artefak *Sumatralith*, sudah ditemukan Callenfels di lokasi ini pada awal Abad ke-20 (Callenfels, 1925:11). Temuan seperti fragmen

keramik dan gerabah menunjuk pada pertanggalan yang satu periode dengan Dinasti *Yuan* pada Abad 13-14 Masehi maupun Dinasti *Ming* pada Abad 15-16 Masehi (Miksic, 1979:246). Sejumlah fragmen keramik yang ditemukan berasal dari *Thai* (Sawankhalok dan Sukothai), Burma, Vietnam dan Cina dari Abad 15-16 (McKinnon, 1995: 2-3) seperti tampak pada Gambar i. Fragmen ini mengindikasikan adanya *coastal-hinterland interaction* pada masyarakat Karo (McKinnon, 2009:120). Keseluruhan temuan ini meneguh

kan adanya interaksi perdagangan di BPH dengan negara lain yakni Cina dan Asia Tenggara lainnya (Damanik & McKinnon, 2012:143).

Artefak logam berupa *Dirham* Emas (Gambar 6) di BPH berasal dari Pase di Aceh pada Abad 16.



Gambar 6, Dirham Emas di BPH

Artefak ini sering ditemukan warga dan di jual ke toko emas di Delitua. Pada ekskavasi tahun 2009, artefak ini ditemukan di kotak 1 sektor 2. Beratnya 0,3 gram dan diameter 9 mm. Pada kedua sisinya terdapat inskripsi Arab yang berarti '*Al Adil*' (Damanik & McKinnon, 2012:147).

Keberadaan *Dirham* di BPH masuk dalam cerita legenda Putri Hijau yang menyebutkan adanya serangan Aceh dengan

cara menembakkan meriam berpeluru emas (Jahja, 1931; Sinar, 1977; Rahman, 1962; Irwansyah, 2008, Disporaparbud, 2011). Kisah ini sangat

populer bagi orang Karo, Melayu, Aceh dan Simalungun (Damanik, 2019). Pada orang Karo, Putri Hijau memiliki klan (marga atau *merga*) yakni Sembiring, di Melayu ia bernama *Encik Sini*, di Aceh ia disebut putri Al Qahar II, dan di Simalungun, ia menjadi leluhur Kerajaan Dolog Silou (Damanik, 2019b).

Dua penelitian (tahun 2008 dan 2009) bermuara pada satu kesimpulan utama berupa adanya lapisan budaya baik di atas maupun di bawah permukaan tanah yang mengandung serangkaian data arkeologis yang membuktikan adanya aktivitas budaya penting di masa lalu. Temuan ini menegaskan bahwa gundukan tanah (benteng) adalah kreasi manusia dan bukan bentukan alam pada sebuah permukiman kuno. Selain itu, aktifitas di BPH menyuguhkan adanya interaksi lokal dan mancanegara di Asia. Mengacu pada temuan penelitian ini, maka tidak diragukan lagi bahwa BPH merupakan lokasi (*location*) dan tempat (*place*) yakni situs (*sites*)

yang mengandung *cultural significance* yang diperkuat oleh *archaeological*

*evidence* hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

Berdasar pada

uraian ini, seharusnya BPH telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sesuai ketentuan UU no. 11 Tahun 2010 karena telah memenuhi kriteria yakni: (i) mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya; dan (ii) menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu. Di samping alasan tersebut, benteng Putri Hijau perlu dilestarikan sebab (i) sifatnya yang rapuh dan mudah rusak, terbatas dan tidak dapat diperharui, serta (ii) memiliki arti penting, bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan bangsa Indonesia. Secara administratif, Situs

BPH terletak di desa Delitua, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara. BPH memiliki ukuran 732 x 250 meter dengan luas 18,3 hektar serta terletak pada kordinat 3°

29' 383" LU dan 98° 40' 281" BT (Damanik & McKinnon, 2012:142). Sebelah barat BPH berbatas dengan tebing curam terutama di sisi barat laut. Sebagian lagi merupakan areal landai yang dimandatkan menjadi perladangan warga. Di sebelah selatan berbatas dengan perladangan warga, dan disebelah timur menghadap langsung ke hulu *Lau Patani* yang bermuara ke Selat Malaka (Utomo, 2014). BPH merupakan pemukiman kuno berbenteng yang luas dimana benteng berfungsi sebagai pertahanan (Damanik & McKinnon, 2012:143). Asumsi ini

**Kemungkinan besar, BPH adalah pemukiman pada orang Karo yang disebut dengan *kuta* (kampung) ataupun *urung* (kesatuan beberapa kampung) (Utomo, 2014:3; Perret, 2010:57).**

diperkuat dengan temuan pohon bambu di beberapa bahu benteng. BPH diperbuat dengan mengombinasikan parit-parit buatan (cerukan) hingga ketinggian 6-7 meter dan lebar hingga 4 meter. Sisa-sisa kedalaman kerukan tanah ini masih ditemukan hingga kedalaman rata-rata 2 meter. Di sebelah timur, benteng berbatas langsung dengan jurang yang curam (tanggul alam) di mana terdapat *Lau Patani* yang bermuara ke Selat Malaka (Utomo, 2014:2). Kemungkinan besar, BPH adalah

**Perlu ditegaskan di sini bahwa *Aru* atau *Haru* pertamakali disebut pada catatan *Yuan-shi* tahun 1282 (Wolters, 1970:44, Milner et al, 1978, Perret, 2010:84).**

pemukiman pada orang Karo yang disebut dengan *kuta* (kampung) ataupun *urung* (kesatuan beberapa kampung) (Utomo, 2014:3; Perret, 2010:57). Asumsi ini berbeda dengan penulis lainnya

seperti Husny (1975), Sinar (1986; 2007) maupun Harahap (2009) yang menyimpulkan BPH adalah peninggalan *Kerajaan Aru* atau *Haru*. Menurut Husny dan Sinar, Kerajaan Aru Delitua adalah embrio terbentuknya Kerajaan Melayu Deli pasca serangan Iskandar Muda, Sultan Aceh sejak 1612. Menurut kedua penulis ini, Gocah Pahlawan yakni Panglima Aceh yang menaklukkan Delitua memindahkan lokasi kerajaannya ke Labuhandeli yang kemudian lebih dikenal Kesultanan Deli. Namun, keterbatasan data-data arkeologi yang tersedia hingga saat ini menjadi faktor utama sulitnya menyimpulkan bahwa BPH adalah bagian integral dari *Kerajaan Aru* (Utomo, 2014:1; Perret, 2010:84). Selain itu, BPH tidak termasuk dalam segitiga arkeologi di Sumatera Utara (Perret, 2010: 49). Perlu ditegaskan di sini

**Selain itu, kunjungan Anderson tahun 1823, juga mencatat adanya benteng tua (*old fort*) peninggalan “Rajah Putri Iju” (Anderson, 1971: 273).**

bahwa *Aru* atau *Haru* pertamakali disebut pada catatan *Yuan-shi* tahun 1282 (Wolters, 1970:44, Milner et al, 1978, Perret, 2010:84). Nama yang sama ditemukan juga pada era *Ming Shilu* (Wade, 1991). Pada tahun 1403 dan 1433, Aru dikunjungi admiral *Zhenghe* (Mills, 1970). Catatan yang sama diperoleh dari Cortesao pada awal Abad 16 (Cortesao, 1967:146-148). Sumber lain mencatat bahwa *Lau Panetican* atau *Lau Patani* adalah pintu masuk menuju BPH (Pinto, 1991). Catatan BPH juga terdapat pada laporan de Beaulieu pada tahun 1621 (Reid, 1995:65). Selain itu, kunjungan Anderson tahun 1823, juga mencatat adanya benteng tua (*old*

*fort*) peninggalan “*Rajah Putri Iju*” (Anderson, 1971: 273). Pada tahun 1866, Baron de Raets menemukan Meriam atau *Lela* yang bertuliskan “*Sanah 1004 (?) alamat balun Haru*” (Baron, 1875). Pada legenda Putri Hijau, meriam inilah yang disebut Meriam Puntung yakni salah satu saudara Putri Hijau. Di sebutkan bahwa meriam ini puntung (terbelah dua) saat ditembakkan selama tiga hari tiga malam. Salah satu pecahan meriam terlempar ke Siberaya di Tanah Karo dan dan yang satunya ditemukan di sekitar BPH (Said, 2007:151; Lah Husny, 1975:31). Sejarah Melayu mencatat bahwa Kerajaan Aru berlokasi di Delitua (Lah Husny, 1975:31, Sinar, 1976:15). Rajanya adalah Sultan Husin yang tewas terbunuh pada Serangan

**Bahkan, hasil penelitian 2008 oleh BPCB Banda Aceh maupun 2009 oleh Balai Arkeologi Sumatera Utara yang merekomendasikan pentingnya konservasi, ternyata tidak juga berdampak pada BPH.**

Komponen	Uraian karakteristik
<i>Material</i>	BPH adalah benteng atau tanggul tanah yang menunjukkan perpaduan antara kreasi manusia dan tanggul alam.
<i>Pembuatan</i>	BPH adalah bentuk pemukiman kuno berbenteng (kuta atau urung) sejak Abad 16 Masehi. Pembuatan benteng dimaksudkan untuk menghindari diri dari serbuan binatang buas ataupun pihak musuh.
<i>Dasar pemilihan lokasi</i>	BPH terletak di daerah landai antara pegunungan Bukit Barisan dan Selat Malaka. Pemilihan ini sangat terkait dengan sungai ( <i>lau</i> ) sebagai sumber penghidupan, moda transportasi dan perdagangan yang terhubung langsung ke Selat Malaka sebagai Jalur Maritim Sutra. Selain itu, pemilihan lokasi juga terkait dengan perladangan sebagai sumber mata pencaharian.
<i>Temuan arkeologi dan pertanggalan</i>	Artifak batu ( <i>Sumatralith</i> ), artifak metal (peluru, meriam dan <i>dirham</i> ), artifak berupa fragmen keramik dan gerabah dari Cina, Vietnam, Thailand dan Burma. Temuan artifak ini merujuk pada Abad 16 -17 Masehi.
<i>Kerajaan H(Aru)</i>	Di duga menjadi lokasi Kerajaan Aru yang populer di Sumatera Utara. Namun, dugaan-dugaan ini sulit dibuktikan karena tidak adanya temuan inskripsi batu (prasasti), istana atau hal-hal lain yang mendukungnya.
<i>Putri Hijau</i>	Merupakan sosok yang melegenda pada orang Karo, Melayu, Simalungun dan Aceh. Kisah ini adalah cerita rekaan yang berasal dari 'Dewa Hijau', di India sewaktu penetrasi kebudayaan Hindu ke Sumatera Utara.
<i>Kondisi masa kini</i>	Seluas 18,3 hektar BPH menjadi bagian dari 40 hektar lahan untuk pembangunan 1.500 unit rumah. Badan benteng di timur, selatan dan barat sudah rata dengan tanah. Hanya sebagian kecil benteng yang masih utuh yakni disebelah utara disekitar tanggul alam yang berhadapan langsung dengan <i>lau</i> Patani. Belum tersedia dokumen <i>masterplan</i> konservasi, tidak ada regulasi khusus BPH (Perda atau Perbub) termasuk belum adanya zonasi dan deliniasi.

Tabel 1, Karakteristik BPH di Delitua

Aceh. Permaisuri Sultan Husin adalah Putri Hijau yang berangkat meminta bantuan ke Johor (Meuraxa, 1971:91; Said, 2007:189).

## 2. Problema fundamental konservasi BPH

Keterlibatan aktif pada BPH semenjak 2008-2019 menjadi pengalaman yang berintikan pengetahuan terhadap hambatan dan kendala konservasi BPH. Situs ini telah dibicarakan berulang kali pada

momen ilmiah seperti diskusi, ceramah maupun seminar maupun konferensi internasional. Selain itu, audiensi telah digelar dengan bupati Deli serdang, gubernur, instansi (dinas) terkait, dan lembaga

**Potensi lingkungan adalah posisi BPH yang persis terletak di jalur sungai yakni Lau Patani yang menjadi hulu Sungai Deli dan bermuara ke Selat Malaka.**

*heritage* seperti Badan Warisan Sumatera. Konsul negara sahabat seperti Amerika Serikat, Prancis, Belanda dan Jepang telah mengunjungi BPH pada momen Wisata Sejarah yang diselenggarakan Pussis-Unimed. Bahkan, hasil penelitian 2008 oleh BPCB Banda Aceh maupun 2009 oleh Balai Arkeologi Sumatera Utara yang merekomendasikan pentingnya konservasi, ternyata tidak juga berdampak pada BPH. Pengetahuan terhadap BPH selama keterlibatan ini menyimpulkan karakter istik BPH sebagai mana ditampilkan pada tabel 1. Beranjak dari karakteristik di atas, BPH adalah benteng yang terbuat dari tanah dan bukan seperti benteng

*Marlborough di Bengkulu, Vredeburg di Yogyakarta, Fort de Kock di Bukit Tinggi, Fort Rotterdam di Ujung Pandang, Fort van den Bosh di*

Ngawi, *fort Belgica* di

Maluku, ataupun *benteng Portugis* di Banyumanis atau bahkan seperti Tembok Raksasa di Tiongkok yang semuanya terbuat dari batu. Karena itu, konservasi BPH ini membutuhkan keseriusan luar biasa terutama menyangkut pemanfaatannya di kemudian hari yang bukan semata-mata ditetapkan atau di register sebagai CB sebagaimana diamanatkan UU no.11 Tahun 2010 ataupun karena salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah sesuai UU no. 9 Tahun 2015. Selama keterlibatan aktif pada BPH selama ini telah menemukan sejumlah pendapat, asumsi, opini bahkan realitas menyangkut konservasi yang menjadi fokus artikel ini yang dibahas melalui struktur kerangka SWOT berikut ini. *Pertama*, potensi atau kekuatan (*strenght*) terhadap urgensi konservasi BPH dikategorikan pada 3 karakteristik yaitu (i) lingkungan, (ii) arkeologi dan (iii) non-arkeologi yang saling terkait. Potensi

lingkungan adalah posisi BPH yang persis terletak di jalur sungai yakni *Lau Patani* yang menjadi hulu Sungai Deli dan bermuara ke Selat Malaka. *Lau Patani* adalah salah satu pintu masuk (*riverine entrance*) menuju pedalaman untuk memperoleh dan

***Lau Patani* adalah salah satu pintu masuk (*riverine entrance*) menuju pedalaman untuk memperoleh dan mempertukarkan komoditas niaga pada kurun niaga Abad 14-19 (Miksic, 1979).**

mempertukarkan komoditas niaga pada kurun niaga Abad 14-19 (Miksic, 1979). Posisi ini berada diantara jalur perdagangan kuno yang menghubungkan pesisir (*coastal*) dan pegunungan (*hinterland*) (McKinnon, 2009; Damanik, 2017). BPH berada di dataran rendah (*lowland*) pegunungan Bukit Barisan yang membentang dari Gunung Sibayak (Tanah Karo) hingga pesisir timur Sumatera Utara di Selat Malaka. Sebagai catatan, Sungai Deli yang berhulu dari *Lau Patani* terus

digunakan pada periode kolonial Belanda untuk mengangkut hasil perkebunan tembakau guna disalurkan ke Eropa melalui Pelabuhan Belawan (Damanik, 2016b:355; Breman, 1997:31). Selain itu, Selat Malaka merupakan Jalur Sutra Laut (*silk road*) yang menghubungkan Guanzhou, Asia dan Afrika (McKinnon, 1984). Pemilihan lokasi ini (BPH) sebagai permukiman kuno sangat terkait dengan pemanfaatan jalur sungai sebagai moda transportasi. Permukiman kuno ini dibangun dengan memanfaatkan tanggul alam yang curam serta pembentukan tanggul kerukan setinggi 30 Kaki atau sepuluh meter (Corteseo, 1967) yang mengelilingi areal seluas 18 hektar (Miksic, 1979; Disporaparbud, 2009). Perpaduan tanggul alam dan tanah kerukan ini disebut *Benteng Putri Hijau (BPH)*. Pada saat ini, di sekitar BPH terdapat persawahan dan perladangan yang dikelola warga untuk

menghasilkan ikan dan buah-buahan. Jadi, pemilihan lokasi BPH ini sangat terkait dengan bentang alam yakni karakteristik lingkungan yang berfungsi dalam kehidupan manusia. Potensi arkeologi yang menjadi kekuatan BPH ialah penemuan-penemuan artefak arkeologi baik melalui ekskavasi (*excavation*) maupun temuan permukaan (*surface findings*). Artefak-artefak ini berupa metal (meriam, peluru dan *dirham*), fragmen keramik, fragmen gerabah, alat batu berupa *Sumatralith* dan sebagian benteng yang masih tersisa di sebelah timur. *Archaeological findings* ini berguna sebagai bukti arkeologis (*archaeological evidence*) adanya aktifitas manusia di masa lalu. Temuan-temuan ini sangat terkait dengan adanya perdagangan kuno pada Abad 16-17 di BPH yang melibatkan mancanegara terutama Cina, Vietnam, Thailand dan Burma maupun lokal seperti Aceh. Laporan perjalanan seperti dikompilasi Reid

(1995) menyebutkan bahwa wilayah ini kaya dengan beras, getah lilin (*wax*), gading, rotan, maupun kemenyan. Walaupun sebagian besar temuan ini berupa fragmen tetapi cukup memadai untuk

**BPH merupakan permukiman kuno berbenteng yang disebut dengan *kuta* (kampung) atau *urung* (kesatuan beberapa kampung) (Utomo, 2014) ataupun menjadi lokasi Kerajaan Aru (*Haru*) (Husny, 1975; Sinar, 1977;**

pembuktian adanya aktifitas di masa lalu. Selain itu, keberadaan sebagian benteng yang relatif utuh di sebelah timur, memberi kesan memadai bagi masyarakat di masa kini guna di konservasi. BPH merupakan permukiman kuno berbenteng yang disebut dengan *kuta* (kampung) atau *urung* (kesatuan beberapa kampung) (Utomo, 2014) ataupun menjadi lokasi Kerajaan Aru (*Haru*) (Husny, 1975; Sinar, 1977; 1986). Walaupun masih

sulit dibuktikan bahwasanya BPH adalah lokasi Kerajaan Aru, tetapi '*memory collective*' yang terbentuk pada masyarakat membuktikan bahwa lokasi ini memiliki nilai sejarah. Penjelasan sejarah terhadap

keberadaan benteng ini sangat terkait dengan strategi pertahanan dari serbuan binatang buas maupun pihak musuh.

Potensi non arkeologi adalah keletakan BPH yang tidak jauh dari Medan (17 Km), mudah di tempuh dan kondisi jalan sudah sangat baik.

Selain itu, legenda Putri Hijau yang menempel kuat pada orang Karo, Simalungun, Melayu dan Aceh menjadi kekuatan dalam rangka konservasi. Keberadaan Pancur Gading atau lebih dikenal Pancuran Putri Hijau telah memikat wisatawan lokal berkunjung setiap hari dan terutama pada akhir pekan. Di pancuran ini, sejumlah besar masyarakat melakukan ritual (upacara) dengan tujuan-tujuan yang diyakininya. Di samping pancuran ini terdapat perdupaan untuk



Gambar 7, Pengerusakan BPH di sisi selatan tahun 2011  
Sumber: Damanik & McKinnon, 2012:149

meletakkan sesaji guna memuja roh (leluhur) yakni Putri Hijau. Keberadaan BPH sangat terkait dengan Istana Maimoon Medan, Makam Raja Deli di Namorambe, maupun Meriam Puntung di Siberaya dan Maimoon. *Kedua* adalah menyangkut kelemahan (*weaknesses*) konservasi BPH yakni kelemahan yang berasal dari dalam dan luar BPH. Keterlibatan aktif selama satu dasawarsa di BPH ini tiba pada kenyataan bahwa kondisi situs sudah tidak utuh lagi. Lebih dari 95 persen benteng telah rusak atau rata dengan tanah. Benteng yang tersisa pada umumnya berada di tepi jurang terjal yang berhadapan lang

sung dengan sungai. Pada benteng yang tersisa ini, terdapat tanaman seperti pisang, coklat, jambu, ubi kayu bahkan durian. Tanaman-tanaman ini merupakan milik warga yang menguasai areal ini sebagai perladangan. Sementara itu, benteng di sebelah barat, utara dan selatan sudah tidak ditemukan lagi karena telah rusak dan rata dengan tanah. Selain itu, dari 18 hektar BPH seperti dicatat Miksic (1979) maupun *up date*

tahun 2009, maka yang tersisa saat ini kurang dari 5 hektar yakni di Dusun XI. Selain itu, areal BPH ini menjadi bagian dari seluas 40 hektar yang telah ditetapkan menjadi pembangunan 1.300-1.500 unit rumah. Pada lokasi BPH yang tersisa saat ini masih digunakan warga untuk perladangan guna menanam pisang, kangkung, ubi kayu, cabai dan lain-lain. Kerusakan parah yang terjadi pada BPH banyak dilakukan oleh pengembang perumahan seperti tampak pada Gambar 7. Di sebelah utara BPH yakni daerah yang berbatasan langsung dengan *Lau Patani* merupakan tanggul

**Pancuran ini merupakan jejak tambahan (*traces of addition*), alterasi dan perawatan terhadap material fisik BPH yaitu bukti sejarah yang dapat digunakan sebagai bagian dari signifikansinya.**

alam dan benteng buatan manusia yang masih tersisa hingga saat ini (Gambar 7). Pada bagian terjal terdapat tumbuhan liar semak belukar dan aneka jenis kayu. Daerah landai dimanfaatkan warga

sebagai persawahan dan perladangan. Pada daerah landai ini terdapat pancuran yang diyakini sebagai permandian Putri Hijau. Walaupun daerah ini berada di luar benteng, tetapi menjadi bagian terintegrasi dari BPH sesuai konsep pemilihan pemukiman berdasarkan penilaian lingkungan. Pancuran ini merupakan jejak tambahan (*traces of*

**Walaupun pancuran terpisah dari benteng tetapi faktor magis yang melekat pada pancuran ini menjadi daya pikat wisatawan berkunjung ke BPH (Febriani, 2016).**

bukti sejarah yang dapat digunakan sebagai bagian dari signifikansinya.

Walaupun pancuran terpisah dari benteng tetapi faktor magis yang melekat pada pancuran ini menjadi daya pikat wisatawan berkunjung ke BPH (Febriani, 2016). Hingga kini, pada daerah-daerah landai yang berada di luar benteng, aktifitas arkeologi berupa ekskavasi sama sekali

sangat jarang ditemukan. Nihilnya temuan permukaan di wilayah ini disebabkan oleh intensifnya pengelolaan lahan yang dilakukan warga atau memang karena sama sekali tidak menjadi bagian dari BPH. Selain kerusakan, realitas BPH saat ini menunjukkan adanya *cultural transform* (Purnawibowo, 2011:177) yakni adanya perubahan data arkeologi sebagai dampak pengolahan lahan untuk perladangan, permukiman dan pembentukan BPH itu sendiri. Pada konteks arkeologi, *cultural*

*transform* ini berdampak pada *use-related secondary context* dan *natural secondary context*. Selain itu, warga disekitar BPH telah menanam pohon pisang di badan benteng.

Meskipun cara ini dianggap sebagai salah satu bentuk kearifan



Gambar 8, Sisa benteng di sisi utara BPH tahun 2019  
Sumber: Dokumentasi penulis, 2019

*addition*), alterasi dan perawatan terhadap material fisik BPH yaitu

belum pernah dilakukan. Selain itu, artefak-artefak arkeologi di permukaan

lokal warga dalam kerangka konservasi yakni menjaga keutuhan dan mencegah erosi BPH (Purnawibowo, 2014: 42), tetapi pada kenyataannya berdamak buruk berupa kerusakan BPH. Pengelolaan warga yang cenderung 'asal jadi' seperti penggunaan cangkul ternyata menggerus BPH. Keterlibatan warga dapat dipandang sebagai agenda pemberdayaan dalam pembangunan yang melibatkan nilai-nilai sosial yakni *people centered, participatory, empowering* dan *sustainable* (Cham bers, 1995), tetapi memerlukan asistensi sehingga tidak sema kin parah kerusakannya (Wibowodkk, 2003:6) Pada umumnya, akti fitas warga di BPH telah mengubah kontekstual tinggalan arkeologi. Sejumlah temuan arkeologi hingga saat ini bukan lagi *in situ*

**Selain itu, temuan terhadap artifak logam, karena mengandung emas maka penemunya langsung menjual ke pedagang emas di Pasar Delitua yang tidak jauh dari BPH.**

tetapi cenderung telah mengalami perubahan tempat. Dalam hal lain, artefak berupa fragmen keramik dan gerabah sering dibuang begitu saja, atau semakin mengecil ukurannya karena benturan-benturan alat-alat yang dipergunakan untuk mengolah lahan. Selain itu, temuan terhadap artifak logam, karena mengandung emas maka penemunya langsung menjual ke pedagang emas di Pasar Delitua yang tidak jauh dari BPH. Aktifitas pembangunan rumah sangat jelas telah merubah BPH secara keselu ruhan. Kenyataan seperti ini turut mem perparah kondisi BPH hingga dewasa ini. Bahkan, beberapa warga menolak lahan mereka disebut memiliki nilai sejarah karena dianggap menghalangi penjualan

lahan. Selain itu, sejumlah pemburu tanah turut hadir di sekitar BPH untuk tujuan 'investasi' serta mengubahnya menjadi perumahan akibat tingginya kebutuhan rumah. Kenyataan seperti ini ditemukan sama pada konservasi Benteng Kastela di Maluku (Zese, 2017: 65). Sebagai catatan, pembangunan rumah di sekitar Medan mengarah ke Namorambe sehingga berdampak pada masa depan BPH. Karena itu, masa depan BPH ini cukup mengkhawatirkan. Benteng ini cukup beresiko dan terancam punah akibat gempuran pemburu-pemburu tanah (*land hunter*) untuk tujuan

**Benteng ini cukup beresiko dan terancam punah akibat gempuran pemburu-pemburu tanah (*land hunter*) untuk tujuan perladangan, perumahan maupun investasi. Keadaan ini menjadi kelemahan pada konservasi BPH.**

perladangan, perumahan maupun investasi. Keadaan ini menjadi

Tabel 2, Kerangka SWOT konservasi BPH

Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memiliki sumber sejarah yang relatif banyak dan temuan artifak arkeologi seperti <i>Sumatralith</i>, peluru, meriam, dirham, keramik, gerabah dan benteng.</li> <li>▪ Sangat dekat dengan kota Medan dan terkoneksi dengan Istana Maimoon dan Siberaya.</li> <li>▪ Berdampingan dengan sungai (<i>lau</i>) Patani yang bermuara ke Selat Malaka sebagai wisata air.</li> <li>▪ Penunjang lainnya adalah Pancuran Putri Hijau yang selalu ramai dikunjungi.</li> <li>▪ Tersedianya sumberdaya mumpuni yakni Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Deliserdang dan Sumatera Utara, Balai Pelestari (BPCB Banda Aceh), maupun peneliti (Balai Arkeologi Sumatera Utara)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ UU Cagar Budaya (UU no. 11 Tahun 2010) belum tersosialisasi dengan baik.</li> <li>▪ Kondisi BPH yang sudah sangat rusak: 100 persen lahan sudah dikuasai pengusaha dan benteng sudah 95 persen hancur.</li> <li>▪ Dana konservasi yang sangat terbatas dari Pemerintah Daerah.</li> <li>▪ BPH tidak tertata dengan baik dan maksimal, tidak ada zonasi, deliniasi dan <i>masterplan</i>.</li> <li>▪ Tidak adanya <i>political will</i> Pemda untuk konservasi BPH.</li> <li>▪ Tidak adanya regulasi Pemda yang mengatur tentang BPH.</li> <li>▪ Tidak adanya visi dan misi yang jelas tentang pemanfaatan dan pengembangan dari konservasi BPH.</li> </ul>
Peluang (O)	Ancaman (T)
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Objek wisata lokal di Kabupaten Deliserdang dan Kota Medan untuk meningkatkan ekonomi warga lokal .</li> <li>▪ Kesesuaian UU no. 10 tahun 2011 dan UU no 32 tahun 2004 terkait Cagar Budaya sebagai Tugas Wajib Pemerintah Daerah.</li> <li>▪ Konservasi berkontribusi pada keamanan Cagar Budaya.</li> <li>▪ Keberdampakan konservasi pada citra publik terhadap Deli Serdang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kompleksitas konser vasi BPH yang terbuat dari tanah.</li> <li>▪ Pembangunan perumahan oleh perusahaan pengembang.</li> <li>▪ Aktifitas perladangan dan pemukiman warga sekitar.</li> <li>▪ Pemburu tanah (<i>land hunter</i>) oleh pihak ketiga untuk tujuan investasi.</li> <li>▪ Kerusakan lingkungan dan ekosistem berupa pendangkalan sungai.</li> </ul>

kelemahan pada konservasi BPH. Ketiga menyangkut peluang (*opportunities*) konservasi BPH yakni kemungkinan memberikan peluang kesejahteraan kepada warga disekitarnya. Dalam hal ini, peluang dimaksud

adalah pemanfaatan situs seluas-luasnya bagi kepentingan warga tanpa memberikan dampak negatif bagi lingkungan, ekosistem maupun warga. Kesejahteraan ini dapat saja bercorak ekonomi, pendidikan, agama, politik

ataupun nilai-nilai luhur budaya yang terkandung pada situs tersebut. Untuk tujuan ini, pariwisata memegang kendali utama untuk memanfaatkan dan memaksimalkan kandungan sejarah dan arkeologi di BPH. Pemanfaatan ini sangat

jelas berupa tersedianya destinasi wisata baru yang berkorelasi dengan pembukaan lapangan kerja baru, peluang terhadap jasa pemandu wisata, *souvenir shops*, karang taruna dan lain-lain yang sudah jelas memberikan manfaat ekonomi. Peluang BPH yang tersedia saat ini adalah intensitas warga sekitar Namurambe maupun dari Medan yang berkunjung ke Pancuran Putri Hijau. Aktifitas magis di pancuran ini sedikit banyak telah menjadi daya tarik untuk berkunjung ke BPH. Jarak yang tidak jauh dari kota Medan, sangat memungkinkan menjadi destinasi wisata baru apabila dikonservasi dengan baik. Terakhir adalah menyangkut ancaman (*threats*) serius yang dihadapi pada konservasi BPH selama ini dan kedepannya bersumber dari tiga hal utama: (i) pengembang perumahan yang sudah mem-plot 18, 3 hektar BPH dalam rencana pembangunan 1.500 unit rumah di lahan 40 hektar, (ii) perladangan dan permukiman warga di

sekitar benteng yang sangat rentan terhadap masa depan benteng, dan (iii) *land hunter* (pemburu tanah) yang potensial

mem beli dan menguasi lahan warga di sekitar BPH dengan cara

membelinya. Ancaman lain adalah ketika suatu objek cagar budaya dikonservasi dan dimanfaatkan menjadi destinasi wisata maka sejumlah ancaman sulit dihindari. Ancaman tersebut adalah vandalisme yang merusak situs sebagaimana banyak terjadi pada cagar budaya yang menjadi destinasi wisata di Indonesia. Namun ketegasan regulasi diharapkan dapat mere duksi kerusakan dan pengrusakan cagar budaya yang dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai destinasi wisata. Berdasar pada uraian di atas, maka struktur kerangka SWOT konservasi BPH

**Pemkab Deliserdang sepertinya tidak memiliki visi kebijakan konservasi yang jelas terhadap Cagar Budaya (CB) di wilayah administratifnya sebagaimana diamanatkan UU no. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.**

dirumuskan sebagai berikut pada Tabel 2. Penting digarisbawahi bahwa upaya-upaya konser vasi BPH sejak

tahun 2008 telah dilakukan. Upaya konservasi ini bukan hanya melalui

penelitian arkeologi, himbauan-himbauan berupa pamflet pelarangan perusakan BPH, tetapi juga audiensi ke Pemkab Deliserdang. Audiensi dengan Amri Tambunan, Bupati Deliserdang telah dilakukan tahun 2011, tetapi pertemuannya itu belum berbuah baik yang mengarah pada konservasi. Kemudian, pada era Ashari Tambunan, bupati Deliserdang saat ini membentuk Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Deli Serdang (TACB-DS) tahun 2015. Namun, tim ini mengalami sejumlah hambatan sehingga program konservasi belum juga terlaksana dengan

baik. Pemkab Deli serdang seperti nya tidak memiliki visi kebijakan konser vasi yang jelas terhadap Cagar Budaya (CB) di wilayah administratifnya sebagaimana diamanatkan UU no. 9 Tahun 2015 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Instansi terkait seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara telah beberapa kali meninjau BPH tetapi langkah-langkah konservasi tidak juga menampakkan hasil. Pada tahun 2009 dan 2014, sejumlah kandidat legislatif maupun kandidat bupati Deliserdang mengemas BPH menjadi salah satu agenda kampanye politiknya. Namun, pasca pemilihan tak satupun diantaranya yang membuat kebijakan konservasi serius terhadap BPH ini.

Pada bulan November

**Pada bulan April 2019, pada suatu pembahasan tentang BPH di internal TACB-SU, muncul sebuah peta yang menggambarkan pembebasan lahan. Peta tersebut sama sekali tidak pernah dibuat dan dibicarakan di internal TACB-SU**

2018, dilakukan satu pertemuan di hotel berbintang di Medan yang dihadiri 100 orang. Pada saat itu, Edy Ramayadi, Gubernur Sumatera Utara dan Ashari Tambunan, Bupati Deliserdang, instansi (dinas)

terkait, arkeolog dari Balai Arkeologi Sumatra Utara, akademisi dari Universitas Negeri Medan dan Universitas Pancabudi Medan dan masyarakat memiliki kesepahaman untuk konservasi BPH yang disebut sebagai 'Warisan Budaya Melayu'. Kemudian, pada bulan Desember 2018, dibentuk

Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Sumatera Utara (TACB-SU) di mana konservasi BPH

menjadi salah satu program kerjanya. Tim ini

bekerja aktif untuk mendata dan mengidentifikasi artefak-artefak budaya guna di register sebagai CB. Perhatian terhadap benteng ini mendapat tanggapan serius dari Gubernur Sumatera Utara yang juga memiliki lahan lebih dari 1 hektar di sekitar BPH.

Pada bulan April 2019, pada suatu pembahasan tentang BPH di internal TACB-SU, muncul sebuah peta yang menggambarkan pembebasan lahan. Peta tersebut sama sekali tidak pernah dibuat dan dibicarakan di internal TACB-SU. Peta pembebasan lahan tandingan muncul dari TACB-DS. Kedua tim ini tidak pernah berkordinasi untuk menetapkan

langkah-langkah konservasi di BPH. Ironisnya, peta pembebasan lahan di BPH ini sama sekali tidak

menyentuh benteng melainkan sebuah

**Jikapun pembebasan lahan versi peta ini dilakukan, maka bukankah benteng sebagai zona utama yang harus didahulukan untuk diselamatkan.**

<i>Internal</i>	<b>Kekuatan</b>	<b>Kelemahan</b>
<i>Eksternal</i>	<b>(S)</b>	<b>(W)</b>
<b>Peluang (O)</b>	<i>(S &gt;&gt; O)</i>	<i>(W &gt;&gt; O)</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Katalogisasi temuan -temuan arkeologis dan historis di BPH.</li> <li>➤ Penetapan dan Registrasi BPH sebagai Cagar Budaya.</li> <li>➤ Pembebasan lahan BPH.</li> <li>➤ Pembuatan dokumen <i>masterplan</i> konservasi BPH.</li> <li>➤ Membina kerjasama konservasi antara Pemkab, Pemprov, Dinas, Balar, BPCB dan TACB maupun penggiat Cagar Budaya dan Juru Kunci.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mensosialisasikan UU no. 11 Tahun 2010 tentang BPH.</li> <li>➤ Membuat atau menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perb ub) tentang konservasi BPH.</li> <li>➤ Menetapkan mekanisme pembiayaan multi -years.</li> <li>➤ Menyempurnakan pemberian Izin pengembangan perumahan.</li> <li>➤ Menyusun visi dan misi konservasi BPH.</li> </ul>
<b>Ancaman (T)</b>	<i>(S &gt;&gt; T)</i>	<i>(W &gt;&gt; T)</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menyusun sistem zonasi konservasi BPH berupa zona inti dan zona pengembangan.</li> <li>➤ Menyusun ketentuan pengalihan lahan di areal dan sekitar BPH.</li> <li>➤ Menyusun regulasi pembatasan pengembangan rumah bagi pihak pengembang di BPH.</li> <li>➤ Menetapkan mekanisme pembiayaan multi-years konservasi BPH.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menyusun dan menetapkan SO P konservasi benteng dan kawasan BPH.</li> <li>➤ Menyusun strategi konservasi di zona inti dan zona pengembangan BPH</li> <li>➤ Menyiapkan dokumen serta regulasi konservasi zona inti dan zona pengembangan BPH.</li> <li>➤ Monitoring dan evaluasi berkala di BPH.</li> </ul>

Tabel 3, Analisis SWOT konservasi BPH

pancuran yang dise rencananya but Pancur Gading atau dibebaskan ini. Jikapun Pancuran Putri Hijau pembebasan lahan versi beserta sawah dan tanah peta ini dilakukan, maka perladangan warga hingga bukankah benteng ke Daerah Aliran Sungai sebagai zona utama yang (DAS) *Lau* (Sungai) Patani. harus didahulukan untuk Selain itu, aktifitas diselamatkan. Berdasar arkeologis berupa pada uraian dan Tabel 2 di ekskavasi sama sekali di atas, berikut pada Tabel 3 belum pernah dilakukan diperlihatkan kerangka pada areal yang analisis SWOT konservasi

BPH, yaitu: Analisis terhadap kekuatan (S) yang tersedia dengan mempertimbangkan peluang-peluang (O) yang ada berpotensi pada kemungkinan konservasi BPH. Sebaliknya, analisis terhadap kelemahan (W) yang ada tidak dapat diantisipasi melalui pertimbangan ancaman

Tabel 4, Potensi dan problema konservasi BPH

Potensi konservasi	Rasional
<i>Internal tinggalan arkeologi dan sejarah di BPH</i>	Terdapat artifak arkeologi berupa artifak batu, logam, keramik, geran dan sisa benteng di BPH. Selain itu, ditemukan catatan sejarah yang mendeskripsikan dan menjelaskan jejak manusia di masa lalu.
<i>Internal fragmen benteng</i>	Masih tersedia fragmen (sisa) benteng yang masih utuh di sebelah utara yakni di daerah tebing yang terjal dan menghadap Lau Patani.
<i>Internal areal BPH</i>	Areal yang tersisa kurang dari 2 hektar dari 18,3 hektar BPH dan termasuk pada 40 hektar pembangunan 1.500 unit rumah yang pembangunannya sudah hampir mencapai 100 persen.
<i>Eksternal kesejahteraan ekonomi warga di sekitar BPH</i>	Berpotensi meningkatkan kesejahteraan warga sekitar melalui program wisata sejarah di BPH maupun Pancur Gadin (Pemandian Putri Hijau).
<i>Eksternal Sumberdaya konservasi</i>	Tersedianya sumberdaya konservasi seperti peneliti (Balai Arkeologi Sumatera Utara), pelestasi (Balai Pelestarian Cagar Budaya), Tim Cagar Budaya (TACB) bersertifikat di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.
Problema konservasi	Rasional
<i>Internal tinggalan arkeologi dan sejarah di BPH</i>	Artifak arkeologi yang ditemukan di BPH pada umumnya bukan <i>in situ</i> , tetapi cenderung pada <i>use-related secondary context</i> dan <i>natural secondary context</i> .
<i>Internal fragmen benteng</i>	Material benteng yang terbuat dari tanah, sangat rentan terhadap penggerusan akibat hujan, rumput dan aktifitas manusia. Erosi dan faktor penanaman pohon yang dilakukan warga cenderung asal jadi sehingga kondisi benteng sudah sangat rusak. Aktifitas pembangunan rumah hanya menyisakan kurang dari 5 persen benteng yang terletak di utara BPH.
<i>Internal areal BPH</i>	Seluas 18,3 hektar luas BPH telah menjadi bagian dari 40 hektar pembangunan 1.500 unit rumah yang pembangunannya sudah mencapai 100 persen.
<i>Eksternal Dokumen Masterplan, SOP, Zonasi</i>	Tidak tersedia dokumen <i>masterplan</i> konservasi yang berisi program (i) perlindungan yakni penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran, (ii) pengembangan yakni penelitian, revitalisasi, dan adaptasi, dan (iii) pemanfaatan untuk kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.
<i>Eksternal pembiayaan</i>	Meskipun mekanisme pembiayaan konservasi dapat dilakukan secara multi-years, tetapi hingga kini tidak ada ketersediaan dana konservasi dari Pemkab Deli Serdang maupun instansi terkait.

(T) yang tersedia, berpotensi pada sulitnya konservasi. Berdasar pada asumsi ini, ditemukan potensi dan problema konservasi BPH seperti tampak pada tabel 4. Berdasarkan pada Tabel 4, ditemukan faktor-faktor internal dan eksternal problema mendasar konservasi BPH. Faktor-faktor ini berkontribusi pada urgensi dan ketidakurgensian konservasi BPH. Apabila keseluruhan faktor dan dampak ini disimpulkan, maka kondisi problema konservasi BPH yang sedang terancam dan mengkhawatirkan ini dipicu oleh 6 (enam) hal utama, yaitu: (i) perladangan warga dan pembangunan perumahan yang mengakibatkan kerusakan parah di BPH, (ii) kelambanan instansi terkait untuk membuat regulasi (Perda atau Perbub) yang mengatur tentang BPH, (iii) ketidaktersediaan dokumen *masterplan* yang menyertakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sehingga menyulitkan konservasi pemeliharaan, preservasi,

restorasi, rekonstruksi dan adaptasi pada masa yang akan datang, (iv) tidak adanya kesepahaman antara aktor-aktor CB yaitu pemerintah, peneliti, pelestari dan instansi terkait yang meliputi pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan dan pemeringkatan, (v)

**Temuan kajian (*research findings*) ini menyimpulkan bahwa analisis terhadap kekuatan (S) BPH yang tersedia dengan mempertimbangkan peluang (O) yang ada memang berpotensi pada perlu dan mendesaknya konservasi BPH.**

kemunculan individu dan perusahaan yang memburu tanah untuk kepentingan investasi, perumahan, dan lain-lain, dan (iv) rendahnya pemahaman warga terhadap urgensi dan signifikansi situs budaya bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Temuan kajian (*research findings*) ini menyimpulkan bahwa analisis terhadap kekuatan (S) BPH yang tersedia dengan mempertimbangkan peluang (O) yang ada

memang berpotensi pada perlu dan mendesaknya konservasi BPH. Namun, analisis terhadap kelemahan (W) BPH dewasa ini dimana kelemahan itu kurang dapat diantisipasi guna menghadapi ancaman (T) terhadap BPH, menjadi problema mendasar

sejumlah upaya dan kebijakan konservasi. Menurut kami (penulis) yang terus terlibat dan mengamatikan perkembangan BPH, kelemahan internal BPH menghadapi ancaman eksternalnya menjadi problema krusial konservasi. Problema

ini sangat terkait dengan faktor struktural serta aktor-aktor konservasi CB. Dalam hal ini, walaupun regulasi telah tersedia yakni UU no. 11 Tahun 2010 dan UU no. 9 Tahun 2015 yang memberi keleluasaan bagi Pemerintahan Daerah mengatur CB, ataupun ketentuan internasional tentang monumen dan situs (ICOMOS) tahun 2013, tetapi realitas kebijakannya di tingkat daerah belum mampu

memberi jaminan bagi konservasi situs dan monumen.

Menyoal konservasi BPH, maka keenam problema mendasar di atas, kemungkinan terjadi karena adanya tarik menarik kepentingan

ngan antara konservasi dengan pemba ngunan peruma han yang keduanya berbicara tentang kebutuhan warga'. Selain itu, kemung kinan lainnya disebab kan oleh minusnya visi dan misi konservasi CB oleh Pemerintah Daerah maupun aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Kedua kemungkinan ini mencerminkan kurangnya *political will* Pemerintah Daerah terhadap konservasi situs sebagai Cagar Budaya di daerahnya. Terlepas dari keenam problema mendasar ini, BPH semestinya

**Menyoal konservasi BPH, maka ke enam problema mendasar di atas, kemungkinan terjadi karena adanya tarik menarik kepentingan antara konservasi dengan pembangunan perumahan yang keduanya berbicara tentang 'kebutuhan warga'.**

dikonservasi. Sifat konservasi ini sangat penting dan mendesak. Disebut penting karena benteng bermaterial tanah sangat jarang di temukan di ndonesia sedang di sebut mendesak karena

resiko, keteran caman, dan kerentanan yang terjadi pada BPH dewasa ini. Hal pertama yang dapat dilakukan pemerintah daerah (dalam hal ini Pemkab Deli serdang) adalah penetapan BPH sebagai objek untuk dikonser vasi, kemudian beranjak ke penetapan zonasi dan delineasi. Jika keduanya telah dilakukan, minimal benteng telah terselamatkan dengan zona-zona dan garis-garis batas yang memadai yang daripadanya dapat disusun master plan pengembangan dan pemanfaatan. Tanpa adanya regulasi yang jelas

terhadap BPH, niscaya konservasinya akan tetap terhambat.

## **D. Simpulan**

Hasil analisis SWOT terhadap konservasi BPH menyajikan temuan kajian (*research findings*) bahwa kekuatan (S) dan peluang (O) konservasi BPH sangat berpotensi pada penting dan mendesaknya konservasi BPH. Namun, kelemahan (W) yang kurang dapat diantisipasi sejalan dengan ancaman (T) yang dihadapi BPH menjadi problema mendasar konservasi. Sumber-sumber problema mendasar konservasi ini terangkum pada 6 hal utama yakni: perladangan dan perumahan, nihilnya regulasi, ketidaktersediaan dokumen *masterplan* konservasi, ketidaksepahaman aktor-aktor konservasi, munculnya pemburu tanah, dan rendahnya pemahaman warga terhadap CB. BPH memiliki keunikan dan kelangkaan yang tidak dapat digantikan oleh material dan teknologi yang sama. BPH juga rapuh sehingga tidak dapat diperbaharui

sebagai bukti aktifitas manusia di permukiman kuno ini. Karena itu, kajian ini merekomendasikan pentingnya konservasi BPH untuk menghindari dan melindungi (*safeguarded*), tidak beresiko (*not put at risk*), dan tidak rentan (*lef in a vulnerable state*).

Konservasi BPH urgen dan mendesak dilakukan guna *to retain the cultural significance of a place* sesuai *cultural significance* yang terkandung di dalamnya. Problema mendasar yang ditemukan pada kajian ini dapat dipecahkan atau direduksi melalui *political will* pemerintah dan kesepahaman aktor-aktor yang terlibat di dalamnya.



- Akbar, Diky. 2014. "Pelestarian Situs Cagar Budaya Plawangan Rembang Perspektif Undang-Undang Cagar Budaya", *Pandecta*, vol. 9, no. 2, hlm. 182-202.
- Anderson, J. 1971. *Mission to the East Coast of Sumatra in 1823*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Baron de Raets, Cats, J.A.M Van. 1875. "Reize in de Battaklanden in December 1866 en Januarij 1867". *Tijdschrift van het Bataviaasch genootschap* 22, hlm. 164-219.
- Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3). 2008. *Laporan Peninggalan Penyelamatan Situs Benteng Puteri Hijau, Desa Deli tua, Kecamatan namu rambe, Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera utara*. Banda Aceh: BP3 [tidak diterbitkan]
- Breman, Jan. 1997. *Menjinakkan Sang Kuli: Politik Kolonial, Tuan Kebun dan Kuli di Sumatra Timur pada Awal Abad ke-20*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Callenfels, P.V. Stein van. 1925. "Verslag van Dr P.V. van Stein Callenfels over zijn inspectiereis door Sumatra". *Oudheidkundig Verslag*, hlm. 11-102.
- Cortesao, A (ed). 1967. *The Suma Oriental of the Tome Pires*. London: Hakluyt Society.
- Chambers, Robert, 1995. *Poverty and Livelihood: Whose Reality Counts*, Discussion Paper 347. Brighton: Institute of Development Studies.
- Damanik, Erond L. 2019a. "Pendahuluan: Perkembangan dan Kesudahan Kerajaan Dolog Silou di Simalungun", dalam *Kerajaan Dolog Silou: Silsilah, Perkembangan dan Kesudahannya*, Bandar Alam Purba Tambak & Herman Purba Tambak (penulis). Medan: Simetri Institute, hlm. xi-xxx.
- \_\_\_\_\_. 2019b. "Membingkai Sejarah Simalungun: Perenungan kembali tentang Pemerintahan Tradisional, Kolonialisme, Agama dan Adat Istiadat" dalam *Sejarah Simalungun: Pemerintahan tradisional, kolonialisme, agama dan adat istiadat*, Bandar Alam Purba Tambak (penulis). Medan: Simetri Institute, hlm. xv-xxv.
- \_\_\_\_\_. 2019c. "Inter-Race, Religion and Cultural Tolerance: the Spread of Buddhism by Tjong Family in Medan, North Sumatra, Indonesia" in *Buddhism Around the World*, Thich Nhat Tu (ed.). Vietnam: Religion Publisher, hlm. 329-350.
- \_\_\_\_\_. 2016b. *Kisah Dari Deli: Historisitas, Pluralitas dan Modernitas Kota Medan tahun 1870-1942*. Medan: Simetri Institute.
- \_\_\_\_\_. 2016a. "Edmund Edwards Mckinnon, Ph.D Pelopor Ekskavasi Situs Arkeologi Pantai Timur Sumatra Utara yang saya kenal" dalam *80 Tahun Arkeolog Dr. Edmund Edwards McKinnon: Perintis Riset Kota China Sebagai Situs Internasional di Medan*. Medan: Unimed Press, hlm. 143-192
- \_\_\_\_\_. 2017. *Rumor Kanibal, Menolak Batak dan Jejak Perdagangan: Etnohistori Sumatra Bagian Utara*. Medan: Simetri Institute.
- Damanik, Erond L & McKinnon, E.E. 2012. "Traces of Early Chinese and Southeast Asian Trade at Benteng Puteri Hijau, Namu Rambe, Northeast Sumatra" in *Connecting Empires: Selected Papers from the 13<sup>th</sup> International Conference of the European Association of the Southeast Asian Archaeologist, Volume-2*. Dominik Bonatz, Andreas Reinecke and Mai Lin Tjoa-Bonatz (eds). Singapore: NUS Press, hlm. 52-65.

- Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Parawisata Kabupaten Deli Serdang. 2009. *Laporan Penelitian Komprehensif pada Situs yang diduga sebagai Benteng Puteri Hijau di Desa Deli tua, Kecamatan namorambe, Kabupaten Deli Serdang*. Lubuk Pakam: Disporaparbud [tidak diterbitkan]
- \_\_\_\_\_. 2011. *Kisah Putri Hijau Berdasarkan Lima Penulis*. Lubukpakam: Disporaparbud.
- Febryani, Ayu. 2016. *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Praktek Magis di Situs Pancur Gading (Pemandian Puteri Hijau) Desa Delitua, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang*. Tesis Magister. Program Studi Antropologi Sosial. Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan.
- Harahap, Apriani. 2009. *Sejarah Penemuan dan Penyelamatan Situs Bersejarah Kerajaan Aru di Benteng Puteri Hijau Delitua*. Skripsi. Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Medan.
- Husny, Tengku M. Lah. 1975. *Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Penduduk Melayu-Pesisir Deli Sumatra* Medan: BP. Husny.
- Humphrey, Albert. 2005. "SWOT Analisis for Management Consulting", *Stanford Research Institute Alumni Newsletter (SRI International)*, December.
- Hidayat, Andy Riza. 2008a. "Patok Sudah Tertancap di Situs Putri Hijau" <https://nasional.kompas.com/read/2008/05/28/00084795/patok.sudah.tertancap.di.situs.putri.hijau>. diakses tanggal 15 Juni 2019.
- \_\_\_\_\_. 2008b. "Benteng Putri Hijau Bisa Hilang" <https://nasional.kompas.com/read/2008/08/12/00081165/benteng.putri.hijau.bisa.hilang>. Diakses tanggal 15 Juni 2019.
- Irwansyah. 2008. "Syair Putri Hijau: Sebuah Telaah Filologi", *Logat: Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra*, vol.6, no. 2, hlm. 78-89.
- ICOMOS. 2013. *The Burra Charter: The Australia ICOMOS Charter for Places of Cultural Significance*. Australia: Australia ICOMOS Incorporated.
- Jahja, T. 1931. *Hikajat Poetroe Hidjo*. Peutawi: Bale Poestaka.
- Mills, J.V.G. 1970. *Ma Huan: Ying-Yai Sheng-Lan, the Overall Survey of the Ocean Shores*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Milner, A.C., Mckinnon, E. E, and Sinar, Tengku Luckman. 1978. "A note on Aru and Kota Cina". *Indonesia* 26, hlm. 1–26.
- Miksic, J. 1979. *Archaeology, Trade and Society in Northeast Sumatra*. Ph. D Thesis, Ph.D Programme. Ithaca, New York: Cornell University.
- Miksic, JN. 2013. *Singapore & the Silk Road of the Sea 1300-1800*. Singapore: National University of Singapore Press.
- McKinnon. E. E. and Sinar, Tengku Lukman. 1974. "Notes on Further Developments at Kota China", in *Sumatra Research Bulletin (SRB)*, vol. 4, no. 1, hlm. 63-86
- McKinnon, E. E. & Sinar, Tengku Lukman. 1978. "A Note on Pulau Kompei in Aru Bay, Northeastern Sumatra". *Indonesia* 26, hlm. 47-73
- McKinnon, E.E. 1975. "Oriental Ceramics Excavated in North Sumatra", in *TOCS* 41, hlm. 59-118.
- McKinnon, E.E, et al. 2009. "Ceramics, Cloth, Iron and Salt: Coastal-Hinterland Interaction in the Karo Region of Northeastern Sumatra", in *From Distant Tales: Archaeology and Ethnohistory in the Highlands of Sumatra*. D. Bonatz, J. Miksic, J.D. Neidel, M.L. Tjoa-Bonatz (eds). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, hlm. 120-142.
- McKinnon, E.E. et al. 2012. "The Kota Rentang Excavations", in *Connecting Empires: Selected Papers from the 13<sup>th</sup> International Conference of the European Association of the Southeast Asian Archaeologist, Volume-2*. Dominik Bonatz, Andreas Reinecke and Mai Lin Tjoa-Bonatz (eds). Singapore: NUS Press hlm. 66-80.
- \_\_\_\_\_. 1977. "Research at Kota Cina", in *Archipel* 14, hlm. 19-32.
- \_\_\_\_\_. 1984. *Kota Cina: its context and meaning in the trade of Southeast Asia in the twelfth to fourteenth centuries*. Ph.D thesis. Ph.D Programme. Ithaca, New York: Cornell University
- \_\_\_\_\_. 1995. "A Burmese Green on white glazed sherd from Benteng Puteri Hijau".

- Indonesian Ceramic Society Newsletter*, vol. 21, no. 4, hlm. 2–3.
- Pinto, F. 1991. *Peregrination*. R. Viale (translated into English). Paris: la difference.
- Purnawibowo, Stanov. 2011. "Cultural Transform di Situs Benteng Putri Hijau". *Berita Arkeologi Sangkhakala*, vol. 14, no 11, hlm. 165-178
- \_\_\_\_\_. 2014. "Konservasi Berbasis Kearifan Lokal di Situs Benteng Puteri Hijau, Deli Serdang, Sumatera Utara". *Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur*, vol. 8, no. 2, hlm. 32-41.
- Perret, D. 2010. *Kolonialisme dan Etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatra Timur Laut* Jakarta: KPG, EFEO Forum Jakarta Paris dan Puslitbangarkenas.
- Rahman, A. 1962. *Sja'ir Puteri Hidjau*. Cetakan Ke-8. Medan: Pustaka Andalas.
- Rahardjo, Supratikno. 2013. "Beberapa Permasalahan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya dan Strategi Solusinya". *Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur*, vol. 7, no. 2, hlm. 4-17.
- Reid, A. (compiler). 1995. *Witness to Sumatra: a Travellers' Anthology*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Rosyadi, Khalid dkk. 2014. "Analisis Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya sebagai Wujud Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah: Studi pada Pengelolaan dan Pelestarian Situs Majapahit Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, vol. 2, no. 5, hlm. 830-836
- Sari, Suzanna Ratih dkk. 2017. "Pelestarian dan Pengembangan Kawasan Kota Lama sebagai Landasan Budaya Kota Semarang", *Modul* vol.17, no.1, hlm. 49-55.
- Said, Mohammad. 2007. *Aceh Sepanjang Abad, Jilid I dan II*. Medan: Waspada.
- Setiawan, Andry dkk. 2013. "Harmonisasi UU no. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dalam Upaya Pelestarian Benda Cagar Budaya Kota Semarang", *ABDIMAS* vol. 17 no. 2, hlm. 69-78.
- Sinar, Tengku Lukman. 1986. *Sari Sedjarah Serdang (Jilid I)*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Bangun dan runtuhnya Kerajaan Melayu Sumatra Timur*. Medan: Yayasan Kesultanan Serdang.
- \_\_\_\_\_. 1977. "The Kingdom of Aru (Haru) and the Legend of Puteri Hijau". Makalah *International Conference of Historians of Asia (IAHA)* ke-7, Bangkok, 22-26 Agustus.
- Utomo, Repelita Wahyu. 2014. Benteng Putri Hijau Berdasarkan Data Sejarah dan Arkeologis. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbaceh/benteng-putri-hijau-berdasarkan-data-sejarah-dan-arkeologis/>, diakses tanggal 15 Juni 2019
- Wisni, Aufrida. 2008. "Putri Hijau Semakin Rata" <https://nasional.kompas.com/read/2008/10/06/00203934/putri.hijau.semakin.rata>. Diakses tanggal 16 Juni 2019.
- Wibowo, Agus Budi dkk. 2003. *Pemberdayaan Lembaga Mukim dalam Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh*. Banda Aceh: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh
- Wibowo, Agus Budi. 2014. "Strategi Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya Berbasis Masyarakat: Kasus Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya Gampong Pande Kecamatan Kutaraja Banda Aceh Provinsi Aceh" *Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur*, vol. 8, no. 1, hlm. 58-71.
- Wolters, O.W. 1970. *the Fall of Srivijaya in Malay History*. Kuala Lumpur: Oxford in Asia.
- Wade, G. 1991. "The Ming Shi-Lu as a source for Southeast Asian History 14th to 17th centuries". Paper presented at the *12th Conference of the International Association of Historians of Asia*. Hong Kong: University of Hong Kong.
- Zese, Irwansyah Baharuddin. 2017. "Benteng Kastela, Riwayatmu Dulu dan Kini: Antara Pelindungan dan Ruang Hunian" *Buletin Umulolo: Media Informasi Pelestarian Cagar Budaya*, vol. VI, no. 1, hlm. 65-69.
- UU no. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- UU no. 9 Tahun 2015 tentang *Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*

# PEMUGARAN MAKAM BLONGKOD

*(Bagian II- habis )*

Hadi Saputro Wirakusumah  
& Tim Pemugaran BPCB Gorontalo

## **Pelaksanaan Pemugaran**

Dari hasil observasi atau kajian teknis yang dilakukan sebelumnya didapatkan gambaran yang jelas tentang diagnosa kerusakan cagar budaya dan pedoman dalam rangka pemugarannya. Dengan pertimbangan teknis, arkeologis dan historis, pemugaran pada cagar budaya Situs Kompleks Makam Raja Blongkod dilakukan pada makam nomor 1 dan 2. Diketahui bahwa makam nomor 1

dan 2 merupakan jenis tinggalan cagar budaya yang unik dan langka di wilayah Gorontalo. Kondisi terkini menunjukkan sangat mengkhawatirkan mengancam kelestarian makam tersebut. Oleh sebab itu, diputuskan untuk segera dilakukan pemugaran. Pemugaran bangunan atau struktur cagar budaya merupakan pekerjaan spesifik, dalam hal ini terkait dengan kegiatan pelestarian cagar budaya harus dapat dipertanggungjawabkan

secara akademis, teknis, dan administratif Pelaksanaan pemugaran merupakan tahapan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan utama yang meliputi pemugaran bangunan atau struktur cagar budaya dan penataan lingkungannya. Untuk mewujudkan terlaksananya kegiatan yang efektif dan efisien, pemugaran dilakukan melalui tahapan pelaksanaan yang dikelompokkan kedalam pekerjaan persiapan,

pelaksanaan, dan penyelesaian. Melalui penelusuran secara sistematis faktor penyebab kerusakan, mekanisme proses dan gejala yang ditimbulkan, pemugaran dapat dilakukan dengan cara pemugaran total atau pemugaran parsial. Pemugaran total adalah upaya pengembalian kondisi fisik bangunan atau struktur cagar budaya yang rusak melalui proses pembongkaran struktur, sementara parsial hanya dilakukan sesuai kebutuhan saja. Pengembalian kondisi fisik bangunan atau struktur cagar budaya yang rusak baik dalam bentuk kerusakan arsitektural maupun struktural dapat dilakukan dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan mengawetkannya melalui pekerjaan meliputi :

- 1) Rekonstruksi, adalah upaya mengembalikan bangunan dan struktur cagar budaya sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip



Pengukuran detail eksisting sebelum dilakukan pemugaran

- 2) Konsolidasi, adalah perbaikan terhadap bangunan dan struktur cagar budaya yang bertujuan memperkuat konstruksi dan menghambat proses kerusakan lebih lanjut.
- 3) Restorasi, yaitu serangkaian kegiatan yang bertujuan mengembalikan keaslian bentuk bangunan dan struktur cagar budaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- 4) Rehabilitasi, yaitu adalah upaya perbaikan dan pemulihan bangunan dan struktur cagar budaya yang kegiatannya dititik beratkan pada penanganan yang sifatnya parsial. Untuk kategori cagar budaya struktur pada Kompleks Makam Raja Blongkod khusus makam nomor satu dan dua dilakukan dengan cara parsial. Setiap pekerjaan pemugaran selalu disertai dengan pendokumentasian secara piktorial dan verbal. Pendokumentasian merupakan salah satu



variabel yang membedakan pemugaran terhadap bangunan/struktur cagar budaya dengan bangunan biasa. Dengan pendokumentasian, secara teknis dilakukan untuk memudahkan merekonstruksi komponen yang rusak atau hilang sekaligus sebagai catatan atau data yang dapat dipertanggungjawabkan dan diinformasikan kepada publik. Adapun tahapan dan proses pelaksanaan pemugaran kedua makam ini, sebagai berikut :

**1. Sebelum mobilisasi peralatan dan bahan yang digunakan selama pemugaran,** terlebih dahulu dilakukan pengukuran eksisting dan dokumentasi piktorial

terhadap situasi dan kondisi situs dan struktur cagar budaya. Diawali penentuan titik kontrol atau *datum point* (DP) di dalam pagar keliling sebelah barat dari struktur makam nomor 1, 2, dan 3. Dilakukan pembacaan titik pokok azimuth belakang, lalu dilanjutkan dengan pembacaan titik detail. Titik detail yang bidik terlebih dahulu sudut-sudut struktur makam yang ada di dalam pagar. Kemudian dilanjutkan pembedikan pada titik artifisial seperti sudut pagar dan jalan setapak dan batas-batas kebun. Sementara untuk pendokumen tasian yang dimaksud disini yakni, penggambaran fisik sebelum dibongkar dan

pemotretan detail struktur sebelum dilakukan pembongkaran atau dipugar.

**2. Setelah pengukuran detail,** penggambaran dan pemotretan sebelum dipugar, dilakukan mobilisasi peralatan dan bahan serta pendirian tenda di atas struktur makam nomor satu yang akan dipugar. Mobilisasi bahan dan alat dilakukan secara tradisional ke lokasi pekerjaan menggunakan tenaga manusia. Hal ini dilakukan mengingat situs berada dalam lahan produktif yang tentu saja kendaraan tidak dapat masuk.

**3. Diputuskan yang pertama kali untuk dipugar adalah makam nomor atau tipe dua.** Setelah mobilisasi alat, bahan, dan air telah tersedia di lokasi pekerjaan. Selanjutnya dilakukan pemasangan bouwplank. Pemasangan bouwplank adalah pembatas yang dipakai untuk menentukan titik bidang kerja pada sebuah

pendirian atau perbaikan bangunan. Bouwplank juga dapat berfungsi sebagai tempat penentuan untuk membuat dan meletakkan ukuran bangunan yang akan dikerjakan. Titik bidang kerja atau biasa disebut titik as pada bidang undakan pertama sisi selatan. Bidang ini dijadikan patokan dikarenakan kondisi undakan yang berfungsi sebagai pondasi masih kompak dan stabil. Pemasangan bouwplank dilakukan diseluruh keliling sisi struktur makam nomor (tipe) satu. Pemasangan bouwplank dibuat dengan cara seperti memasang pagar hanya menggunakan kayu reng 4/5 yang berfungsi sebagai tiang dan papan sekaligus. Jarak pemasangan bouwplank dari as bangunan sekitar 1 meter. Volume pemasangan bouwplank untuk makam nomor dua atau tipe dua adalah 862 cm atau 8,62 m.

4. **Setelah pemasangan bouwplank**, dilanjutkan pembongkaran dan pembersihan pada bidang



makam nomor dua sebelah timur. Nampak tumpukan pecahan batu kerikil dan tumpukan tanah menutupi sisi ini. Struktur dinding undakang pertama hanya tersisa pada sudut TL dan TG. Sementara pada undakan kedua sudah hilang. Saat dibersihkan bidang ini, lapisan dalam bidang ini

memperlihatkan susunan konstruksi makam terdiri dari tanah liat yang dipadatkan kemudian ditumpuk dengan batu-batu kerikil berukuran diameter 7 s.d 10 cm. Diperoleh data dari hasil pembersihan dan pembongkaran tinggi dari permukaan tanah ke undakan pertama sekitar



Pemasangan bouwplank dan pendirian tenda kerja



Galian tanah di bawah struktur dasar bidang timur

50 cm. Volume pembersihan dan pembongkaran pada bidang ini sekitar 2,24 m<sup>3</sup>. Setelah pembongkaran tersebut, dilakukan galian bawah dasar struktur untuk rencana perkuatan dengan pekerjaan lantai kerja (campuran 1:2:3) dengan ukuran panjang 385 cm, lebar 17 cm dan kedalaman 15. Volume galian tanah bawah pondasi pada bidang ini sekitar 0,098 m<sup>3</sup>.

**5. Setelah galian tanah bawah dasar struktur bidang timur,** areal tersebut disiram air agar tanah pijakan padat sebelum disiram dengan beton. Dibuat campuran beton tanpa tulangan 1:2:3 (pasir, semen, dan kerikil) dengan volume sekitar 0,098 m<sup>3</sup>. Setelah kering beton tersebut ditutup dengan timbunan tanah (urugan kembali) sekitar 0,033 m<sup>3</sup>. Tujuan

pembuatan beton tanpa tulangan ini, untuk memperkuat struktur dasar bangunan agar tidak mudah bergeser.

**6. Setelah perkuatan struktur makam dengan beton tanpa tulangan dikerjakan,** dilanjutkan pekerjaan pemasangan batu isian pada bidang undakan pertama. Struktur undakan pertama antara sudut TL dan TG yang masih ada disambung kembali dan diberi batu isian dengan campuran 1:4. Untuk mencegah dan meminimalisir kapilarisasi pada bagian ini, dipasangkan pipa jenis PVC ukuran 1 ½ inch dengan rata-rata panjang 26 cm. Pipa yang dipasang tiga buah dengan jarak rata-rata 50 cm. Setiap pipa bagian dalam diberi ijuk yang berfungsi menyaring kotoran tanah atau pasir. Volume pekerjaan pemasangan batu

isian undakan pertama 1,63 m<sup>3</sup>. Untuk menjaga kondisi pasangan batu isian, setelah pekerjaan tersebut ditutup dengan alas plastik agar air tidak masuk.

**7. Sambil menunggu proses pengeringan pekerjaan pemasangan batu isian untuk undakan pertama selesai,** dilanjutkan pekerjaan rekonstruksi terhadap struktur undakan kedua pada sisi bidang selatan makam nomor dua. Hal ini dilakukan mempertimbangkan aspek teknis dan arkeologis bahwa struktur yang rusak di undakan kedua masih nampak dan diketahui bentuknya. Struktur yang masih lengkap berada di sudut Barat Laut (BL). Ditarik benang nylon mengikuti as undakan kedua mengikuti arah timur-barat dan utara-selatan makam. Sebagai



Pekerjaan lantai keria beton tanpa tulangan di bagian sisi timur



Pembuatan beton tulangan dilakukan untuk memperkuat struktur makam agar tidak mudah bergeser secara horizontal

pedoman dalam merekonstruksi struktur yang hilang tersebut. Setelah ditarik benang, maka dilanjutkan pekerjaan pembersihan pada undakan tersebut. Volume pembersihan/pembongkaran pada bidang ini sekitar 1,26 m<sup>2</sup>. Setelah dibersihkan dari tumpukan batu kerikil (batuan lepas) nampak struktur makam asli yang melintang mengarah timur barat. Untuk mengetahui bentuk dan ukuran undakan kedua sisi timur dilakukan pengecekan tegak lurus struktur secara vertikal dan horizontal. Digunakan benang yang diikat dengan unting-unting diletakkan di atas bagian puncak dibantu meteran. Dari hasil pengukuran tersebut diperoleh besaran panjang atau lebar dan tinggi undakan kedua antara sisi timur

dan selatan makam.

**8. Setelah bagian tersebut dibersihkan,** dari pengamatan teknis dan arkeologis agar bagian tersebut diperkuat dengan kolom dan sloof besi. Hal ini dilakukan untuk menyangga beban dari atas. Sudut TG dan BD serta TL undakan kedua diperkuat dengan pasangan kolom dan dihubungkan sebuah sloof. Sloof berukuran panjang 2,80 m bagian selatan dan 1,50 m bagian timur. Ukuran besi 8 dan besi 4 sebagai ringnya. Jarak antar ring 20 cm. Sementara kolom yang dibuat menyesuaikan tinggi sudut struktur makam yang tersingkap. Sudut TG tinggi kolom 65 cm dan sudut BD tinggi kolom 35 cm. Setelah pekerjaan pembesian kolom dan sloof dipasang, kemudian dijepit dengan sebuah papan mal. Papan

mal dipasang untuk menyangga atau menopang besi sloof dan kolom saat akan dicor. Ketika akan dicor pasti akan menutupi struktur inti makam dalam. Demi kepentingan informasi kepada publik, diputuskan bagian dalam singkapan struktur makam asli dinampakkan sedikit. Pekerjaan bekisting untuk sloof pada bidang ini sekitar 64,5 m<sup>2</sup>. Pekerjaan bekisting untuk kolom pada bidang ini sekitar 15 m<sup>2</sup>. Pekerjaan beton bertulang pada bagian kolom dan sloof sisi timur dan selatan undakan kedua sekitar 11,93 m<sup>3</sup>. Komposisi campuran untuk pasangan batu bertulang untuk perkubiknya terdiri dari perbandingan 1 pc (semen): 2 Pasir : 3 Kerikil. Setelah pekerjaan beton bertulang dilakukan, untuk sementara bidang



Pekerjaan pemasangan batu isian pada bagian undakan pertama

tersebut ditunggu hingga beton tersebut kering.

### **9. Setelah kering papan mal pelapis beton bertulang dibuka,**

dilanjutkan pekerjaan pemasangan batu kerikil pada sisi undakan kedua sisi selatan. Volume pekerjaan ini 0,32 m<sup>3</sup>. Disaat bersamaan, terjadi hujan lebat mengakibatkan timbulnya genangan air pada makam nomor satu. Tidak adanya resapan menjadikan tanah menjadi jenuh dan lembek. Untuk menanggulangi hal tersebut, dilakukan pembuatan bak kontrol. Penempatan bak kontrol disisi sudut BD dalam makam nomor satu mengarah keluar ke utara luar makam. Saluran

penghubung antar bak kontrol dalam dan luar makam sekitar satu meter dibuat ditempatkan dibawah struktur dasar makam. Pekerjaan galian tanah untuk dua buah bak kontrol dan saluran penghubung sekitar 0,33 m<sup>3</sup>. Air dipahami sebagai salah satu hal pemicu yang mempengaruhi terjadinya kerusakan pada cagar budaya tersebut. Kembali ke makam tipe dua, sambil menunggu keringnya pekerjaan beton bertulang di sisi selatan undakan kedua, dilakukan pengamatan pada sisi utara makam tersebut. Dari hasil observasi, memperlihatkan kondisi rusak berat pada sisi tersebut. Tumpukan kerikil dengan berbagai ukuran

terkumpul disisi utara menggunung hingga ketinggiannya hampir mencapai bagian puncak dari makam ini. Proses penanganan dilakukan dengan penuh kehati-hatian memindahkan batu-batu tersebut ketempat yang tidak jauh dari makam tersebut. Dari hasil pemindahan tumpukan batu-batu kerikil tersebut menampakkan undakan pertama yang mengalami deformasi secara vertikal (melesak). Sisi bangunan makam cenderung miring ke utara.

**10. Penggalian pada sisi utara makam tipe dua dilakukan secara hati-hati.** Mengingat kondisi kritis di bagian struktur ini merupakan kerusakan



yang paling berat. Banyaknya tumpukan kerikil pada struktur ini berasal dari berbagai tempat di sekitar lahan tersebut. Dari wawancara masyarakat setempat, ketika mereka mengolah lahan tersebut banyak ditemukan konsentrasi kerikil yang kemudian dikumpulkan di makam tersebut. Struktur dasar makam terbebani oleh akumulasi beban yang lebih mengakibatkan kondisi kritis terjadi yakni kerusakan struktural pada makam. Struktur dasar undakan satu mengalami penurunan (melesak), undakan kedua runtuh, sehingga bagian puncak atau atas ikut miring. Dari setengah pekerjaan pemindahan tumpukan

konsentrasi kerikil memperlihatkan singkapan struktur berpola yang diduga merupakan undakan kedua. Dengan bantuan tali atau benang yang ditarik lurus kemudian dipertemukan sudut-sudut lain menampakkan pola yang jelas. Untuk sementara proses pemindahan tumpukan kerikil dihentikan sementara. Rekonstruksi dilakukan pada bidang ini. Dalam rekonstruksi undakan ini diperkuat dengan beton bertulang untuk kolom dan sloof pada sisi utara dan antar sudur BD dan TL. Ukuran beton bertulang untuk sloof dan kolom sama

dengan pekerjaan undakan kedua disisi TL – TG dan TG – BL. Disaat bersamaan di sisi selatan makam dilakukan pembersihan kering dan basah untuk menghilangkan mikroorganisme yang menempel dan kotoran debu serta tanah liat. Mikroorganisme yang terdapat di permukaan tersebut berupa lumut. Pembersihan dilakukan menggunakan peralatan sapu lidi, sikat besi, bahan air dan masker sebagai pengaman. Selama pembersihan tumpukan kerikil, ditemukan beberapa pecahan keramik.



Hasil rekonstruksi undakan pertama bidang atau sisi timur struktur makam nomor dua



Singkapan struktur undakan ke 2 yang ditemukan dibentang benang secara simetris mengikuti struktur yang tersisa



Pekerjaan rekonstruksi undakan ke 2 dengan memberi perkuatan beton bertulang untuk sloof dan kolom

**11. Setelah rekonstruksi dilakukan pada struktur utara bidang makam tipe nomor dua,** dilanjutkan kembali pembersihan atau pemindahan sisa-sisa tumpukan kerikil. Saat tinggal sedikit nampak singkapan struktur yang diduga sebagai undakan pertama. Secara keseluruhan tumpukan kerikil telah dipindahkan menampakkan struktur

undakan pertama tersebut. Kondisi undakan pertama sebagai unsur struktural utama penopang makam mengalami rusak berat. Undakan pertama bergeser dari matriks makam dan juga mengalami kemelesakan. Undakan pertama bergeser dan terpisah dari makam sekitar 25 cm ke utara. Sementara kemelesakan atau

penurunan pada undakan pertama sekitar 20 cm dari struktur yang masih kompak.

Setelah undakan pertama nampak keseluruhan dilakukan upaya pengembalian ke posisi semula. Terlebih dahulu dilakukan pengurugan tanah pada sisi antara makam nomor satu dan dua. Volume tanah yang diurug 2,86 m<sup>3</sup>. Setelah tanah diurug, dilakukan pengembalian keposisi semula. Posisi struktur undakan pertama cukup sulit untuk dikembalikan karena berat dan peralatan terbatas. Diputuskan untuk memecah kedalam beberapa bagian potongan struktur tersebut.

**12. Upaya pengembalian posisi undakan pertama,** dengan memecahnya kebeberapa potongan juga tidak berhasil disebabkan media penyangga struktur makam (matriksnya) mengalami penurunan. Agar posisi matriksnya bisa rata dan mampu menopang struktur undakan pertama dalam

posisi seimbang dengan struktur yang masih kompak maka diberi intervensi beton tulangan. Intervensi beton tulangan (plat besi) menggunakan besi 8 dan 4. Jarak bentangan pembuatan besi platnya sekitar 15 cm. Setelah pekerjaan plat besi penopang (pembesian) undakan dibuat, maka dilanjutkan pekerjaan pengecoran pada plat besi. Volume pekerjaan pengecoran sekitar 0,225 m<sup>3</sup>.

Sementara di sisi barat (antara sudut BL –TG), dilakukan penggalian dasar undakan pertama. Hal ini dilakukan untuk memperkuat dinding undakan dan mencegah bergesernya struktur tersebut. Saat penggalian ditemukan akar pohon yang mendesak masuk ke dalam makam. Jumlah volume galian tanah pada sisi ini sekitar 0,56 m<sup>3</sup>. Setelah pekerja galian tanah, dilakukan pengukuran kemiringan dinding undakan pertama. Terdapat selisih sekitar 10



Setelah pembersihan tumpukan kerikil, nampak struktur undakan pertama yang bergeser dan melesak

cm antara bagian bawah (dasar) dengan atas undakan pertama. Dilanjutkan pengisian batu kali pada sisi tersebut. Pekerjaan pengisian batu kali berupa campuran beton beton tanpa tulangan 1:2:3 (pasir, semen, dan kerikil) dengan volume sekitar 0,098 m<sup>3</sup>.

### **13. Seluruh sisi pada Struktur makam nomor atau tipe dua diperkuat**

**bagian dasarnya**, dengan memberikan intervensi beton lantai kerja tanpa tulangan. Hal ini dilakukan untuk mendukung kekuatan penyalur beban dari atas dan samping yang bertumpu pada struktur dasar. Sementara pada bagian makam atau tipe nomor satu perlakuan penanganan dalam rangka pemugarannya hanya bersifat parsial. Menyambung kembali

beberapa bagian yang terbelah diseluruh sisi makam yang rusak. menginjeksi di bagian yang mengalami retakan mikro. Mengisi kembali sisi atau bidang-bidang permukaan struktur makam yang batunya terlepas. Di bagian dasar, agar bidang struktur tersebut tidak bergeser dari matriksnya diberikan intervensi beton lantai kerja di sekeliling makam nomor satu. Daerah selasar antara makam nomor satu dan dua diperkuat dengan memberikan cor beton. Hal ini dilakukan tanah pada bagian tersebut mengalami kemelesakan. Selain berfungsi sebagai perkuatan, selasar ini juga berfungsi sebagai jalan setapak dalam rangka mengapresiasi situs.

**14. Setelah pekerjaan penanganan makam-makam selesai,** didalam situs diberikan sarana penyediaan air, papan informasi, papan apresiasi, dan tempat sampah. Hal ini dilakukan agar

pengunjung yang datang ketempat ini lebih terbantuan dan mengapresiasi keberadaannya. Setelah tahapan pemugaran dilakukan kali ini, langkah terakhir dilakukan

pengukuran kembali. Pengukuran dilakukan menggunakan alat theodolit. Pengukuran kembali dilakukan untuk mendapat data situasi terkini.



Situasi makam pasca pemugaran



Situasi lingkungan pasca pemugaran

## **Kesimpulan**

Keberadaan Kompleks Makam Raja Blongkod sebagai cagar budaya memperkuat identitas Gorontalo di masa lalu. Sebaran makam-makam tua yang mencirikan keberlanjutan dari tradisi sebelum masuknya islam di wujudkan dalam arah hadap makam. Orientasi timur – barat diyakini sebagai arah hadap dari tradisi pra islam. Bentuk yang unik, bahan yang sederhana, dan teknologi masih sangat tradisional dianggap memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Bangunan cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional. Saat ini kondisi yang menghawatirkan menimpa keberadaan makam-makam yang berada pada kompleks cagar budaya Makam Raja Blongkod.

Beberapa komponen bangunan hilang, rusak, dan lapuk. Struktur makam nomor satu secara arsitektur masih menampakkan bentuk, namun beberapa bagian juga ada yang hilang. Sedangkan struktur makam nomor dua secara arsitektur sudah banyak yang hilang dan konstruksinya sudah tidak kuat lagi. Maka, untuk menanggulangi hal tersebut maka dilakukan pemugaran. Pemugaran yang dilakukan secara parsial komponen yang rusak diperbaiki, hilang diganti, dan diperkuat dengan memberikan intervensi modern seminimal mungkin. Agar lebih mengapresiasi keberadaan makam, diberikan beberapa fasilitas pendukung seperti penyediaan pompa air, papan informasi, dan papan apresiasi.

## **Saran/Rekomendasi**

Karena pekerjaan pemugaran ini tidak dilakukan secara sekaligus mengingat terbatasnya waktu, personil, dan biaya, maka terdapat beberapa saran atau rekomendasi sebagai berikut :

1. Pekerjaan pemugaran dilakukan kembali dengan fokus struktur makam nomor tiga dan penataan lingkungannya.
2. Agar dilakukan komunikasi persuasif dalam sebuah forum bersama-sama dengan pemerintah daerah setempat dan BPCB Gorontalo terkait upaya pengembangannya.

Pelibatan secara aktif oleh masyarakat diharapkan agar menumbuhkan kesadaran untuk melestarikan cagar budaya ini. 

# CERITA MUMI DILEMBAH BALIEM



---

**Hari Suroto**  
Balai Arkeologi Papua

**L**embah Baliem terletak 1650 meter di atas permukaan laut. Lembah ini terkenal hingga ke mancanegara dengan Festival Budaya Lembah Baliem yang berlangsung

7 sampai dengan 10 Agustus setiap tahunnya.

Pada zaman kolonial Belanda, lembah ini diberi nama '*Grote Vallei*' atau 'Lembah Besar'. Masyarakat yang tinggal di Lembah Baliem

menyebut dirinya orang *Hubula* atau orang *Balim* (*akhuni Palim meke*) atau orang yang tinggal di lembah.

Mengapa orang Baliem disebut orang Dani? Nama ini mungkin

berasal dari tim ekspedisi Richard Archbold, peneliti asal Amerika Serikat. Pada tahun 1938 – 1939 dia berkunjung ke bagian barat pegunungan tengah Papua, dan ketika itu dia bertemu dengan masyarakat yang menyebut dirinya 'orang Dani'.

Sejak saat itu para antropolog menyebut 'suku Dani' untuk seluruh masyarakat yang tinggal di pegunungan tengah Papua mulai dari bagian timur Lembah Bidogai sampai ujung selatan Lembah Baliem.

Sejak dibukanya Kota Wamena pada tahun 1956, banyak orang dari Mamberamo Tengah bermigrasi ke Kota Wamena dan sejak itu mereka mulai menamakan diri Lani. Mungkin untuk membedakan diri dari orang Lembah Baliem, yang mereka namai Dani. Padahal masyarakat sendiri di Lembah Baliem tidak menamakan diri demikian, melainkan *Hubula* dan *Wio*.



Pada masa prasejarah, ada dua tradisi kematian yang dilakukan Suku Dani di Lembah Baliem, Papua. Pertama, jenazah dibakar. Kedua, jenazah disimpan dalam bentuk mumi. Penanganan mayat dengan cara

dikremasi umum nya dilakukan untuk seluruh anggota Suku Dani di

Lembah Baliem. Ini berlaku untuk orang-orang yang meninggal baik karena tua, sakit maupun mati dibunuh.

Sedangkan penanganan mayat

dengan cara dimumi hanya berlaku untuk orang-orang tertentu yang membutuhkan persyaratan tertentu. Orang yang memenuhi kriteria dapat dijadikan mumi adalah tokoh adat yang mempunyai pengu-

**Namun demikian tidak setiap orang memenuhi kriteria dapat dijadikan mumi setelah meninggal tanpa mempersiapkan terlebih dahulu syarat-syarat lain yang banyak dan cukup berat.**

aruh terhadap masyarakat atau panglima perang. Namun demikian tidak setiap orang memenuhi kriteria dapat dijadikan mumi setelah meninggal tanpa mempersiapkan terlebih dahulu syarat-syarat lain yang banyak dan cukup



Alat Transportasi menuju Pumo

berat. Seperti mempersiapkan orang-orang yang dapat menangani, memelihara supaya mumi tersebut tetap awet selamanya.

Ada tahapan-tahapan dalam mempersiapkan dan menangani mumi, yaitu menunjuk anggota suku yang bertugas mengerjakan proses pemumian, menyiapkan kayu bakar, dan menyiapkan honai sebagai tempat pelaksanaan pemumian. Proses pengerjaan mumi di Lembah Baliem adalah sebagai berikut: setelah tokoh yang layak diberi penghormatan tinggi meninggal dunia,

jenazahnya pun disiapkan menjadi mumi. Terlebih dahulu mayatnya diasap dengan kayu bakar.

Sebelum pengasapan dilakukan,

dipersiapkan babi yang baru lahir sebagai tanda waktu. Waktu pengasapan berlangsung adalah sejak babi lahir sampai babi tersebut

mempunyai taring yang panjang. Setelah selesai pengasapan kemudian dilakukan upacara-upacara untuk memandikan para petugas, pelepasan mumi

dengan memotong babi yang digunakan sebagai tanda waktu, mengalungkan ekor babi yang dipotong tersebut ke leher mumi. Setelah

semua proses pengerjaan mumi selesai, maka diakhiri dengan pesta bakar batu.

**Berdasarkan data di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya terdapat empat mumi yang sudah dikonservasi yaitu mumi Araboda, Aikima, Pumo, Yiwika.**

Berdasarkan data di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya terdapat empat mumi yang sudah dikonservasi yaitu mumi Araboda, Aikima, Pumo,



Yiwika. Keempat mumi ini telah dikonservasi pada Oktober hingga November 2017, dengan menghabiskan dana 900 juta rupiah. Kondisi keempat mumi saat ini terawat baik dalam kotak penyimpanan.

Mumi Araboda terletak di Kampung Bauntagima, Distrik Assologaima, Kabupaten Jayawijaya. Kampung Bauntagima terletak sekitar 20 kilometer sebelah barat Wamena Kota. Perjalanan ke kampung ini dapat dilakukan dengan sepeda motor atau mobil. Selain itu dapat juga dengan naik kendaraan umum dari Pasar Sinakma - Kimbim.

Selanjutnya berjalan kaki dari jalan trans Kimbim - Pyramid menuju ke lokasi objek wisata sekitar 1500m.

Mumi Araboda disebut juga mumi Alongkah Huby. Mumi ini tersimpan baik dalam kotak penyimpanan, kotak ini disimpan dalam honai khusus. Untuk masuk ke lokasi mumi, setiap wisatawan harus membayar Rp. 50.000,00. Wisatawan dapat berfoto bersama mumi, tanpa mengeluarkannya dari dalam kotak penyimpanan. Jika wisatawan ingin menyaksikan paket tarian tradisional serta atraksi memasak tradisional dengan bakar batu, maka

wisatawan sebaiknya bernegosiasi dulu pada keluarga penjaga mumi untuk harga setiap paketnya.

Mumi Pumo terletak di Kampung Wogi, Distrik Silokarnodoga, Kabupaten Jayawijaya. Kampung Wogi terletak 35 kilometer di sebelah barat Wamena Kota. Untuk menuju kampung ini dapat dilakukan dengan sepeda motor atau mobil, dapat juga dengan menggunakan kendaraan umum dari Pasar Jibama jurusan Wamena – Kelila. Setelah kendaraan sampai pada kilometer 35 Jalan Trans Tolikara, maka dilanjutkan dengan trekking sekitar 2 kilometer, dengan pemandangan sekitar berupa kebun masyarakat. Sebelum mencapai lokasi mumi Pumo, wisatawan akan menyeberangi Sungai Baliem dengan perahu tradisional. Mumi Pumo dikenal juga sebagai mumi Agatmamente Mabel. Mumi ini tersimpan baik

dalam kotak penyimpanan, kotak ini disimpan dalam honai khusus. Untuk masuk ke lokasi mumi, setiap wisatawan harus membayar Rp. 50.000,00. Wisatawan dapat berfoto bersama mumi, tanpa mengeluarkannya dari dalam kotak penyimpanan.

Jika wisatawan ingin menyaksikan paket tarian tradisional serta atraksi memasak tradisional dengan bakar batu, maka wisatawan sebaiknya bernegosiasi dulu pada keluarga penjaga mumi untuk harga setiap paketnya. Saat ini mumi dijaga oleh keturunan mumi Pumo yaitu Eligius Mabel, yang juga kepala suku Abuluknae.

Dari sejumlah mumi yang sudah dikonservasi, ternyata masih ada satu mumi di Baliem yang belum dikonservasi. Mumi ini yaitu mumi Yamen Silok atau mumi angguruk. Mumi ini merupakan satu-satunya mumi perempuan di Baliem, saat ini disimpan oleh masyarakat



di Kurima, Yahukimo.

Kondisi terkini mumi Yamen Silok butuh perawatan. Mumi Yamen Silok hanya disimpan sekedarnya di dalam honai. Mumi ini perlu dikonservasi dan dibuatkan kotak penyimpanan agar lebih terawat dan terbebas dari gangguan serangga atau binatang pengerat. Untuk

itu pemerintah daerah Yahukimo perlu belajar dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya yang telah sukses mengkonservasi empat mumi dengan melibatkan arkeolog Balai Arkeologi Papua dan Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan.

Mumi Yiwika merupakan mumi yang



paling populer di Lembah Baliem, disebut juga mumi Kurulu. Mumi ini dikeluarkan di halaman honai jika ada wisatawan yang datang. Kondisi mumi sangat rapuh, sehingga dengan sering diangkat keluar masuk honai, dikhawatirkan mumi akan cepat rusak.

Permasalahan konservasi mumi di Lembah Baliem adalah kondisi suhu yang dingin dan lembab. Mumi yang telah selesai dikonservasi telah diserahkan kembali ke masyarakat adat pemilik. Masyarakat adat

pemilik mumi tidak mengerti cara perawatan yang sesuai dengan kaidah konservasi.

Selama ini mereka belum pernah diberi pelatihan merawat mumi yang sesuai dengan standar.

Perawatan mumi harus mengikuti kaidah

ilmiah, dengan menjaga suhu udara yang sesuai, misalnya. Mumi harus ditempatkan di tempat yang kering, atau kotak penyimpanan mumi harus diletakkan tidak boleh langsung menyentuh tanah, kotak penyimpanan mumi perlu dijaga dari gangguan serangga dan tikus maupun binatang peliharaan seperti anjing.

Secara tradisional, masyarakat adat merawat mumi tersebut dengan cara diasapi dan dilumuri lemak babi saja. Hingga saat ini mumi hanya dijaga oleh anggota keluarga

yang dipilih, belum ada juru pelihara yang ditunjuk oleh instansi resmi pemerintah untuk menjaga dan merawat mumi.

Saat ini, keempat mumi yang telah dikonservasi telah menjadi atraksi wisata. Biasanya turis yang datang diperbolehkan foto di dekat mumi. Mumi itu pada umumnya ditempatkan di honai dan jadi tontonan wisatawan. Jadi sangat rawan jika honai terbakar, untuk itu perlu dibuatkan honai khusus.

Mumi di Lembah Baliem perlu dijaga keberadaannya, mumi ini rata-rata sudah berusia ratusan tahun. Mumi telah menjadi ikon Lembah Baliem, dan mampu menyejahterakan keluarga pewarisnya. Untuk itu terus dijaga kelestariannya, serta dalam hal pemanfaatannya harus mengikuti regulasi yang ada dan sesuai dengan kaidah konservasi. 🗺️🗺️🗺️

# KOTA MAKASSAR TAHUN 1950 DALAM IMAJINASI GAGAKLODRA



Heri Kusuma Tarupay  
[heritarupay@gmail.com](mailto:heritarupay@gmail.com)

Universitas  
Sarjanawiyata  
Tamansiswa

*Satu tahun setelah berakhirnya Negara Indonesia Timur (NIT) Gagaklodra datang ke Makassar. Gagaklodra dikenal sebagai seorang kriminal yang melakukan pengembaraan ke berbagai tempat di Hindia bahkan ke luar Hindia sejak tahun 1930. Dalam pengembaraannya, dia mengamati permasalahan di tempat-tempat yang didatanginya dan membantu menyelesaikan masalah di tempat tersebut. Pengalaman Gagaklodra mengunjungi berbagai tempat sejak periode kolonial, menyadarkannya akan bahaya pengelompokan berbasis SARA yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda di masyarakat Hindia. Kunjungannya ke Makassar di tahun 1950 digunakannya untuk bukan hanya membaca ruang kota Makassar, tetapi juga menyebarkan gagasan masyarakat plural sebagai model kehidupan bersesama yang ideal. Gagasan ini penting untuk masyarakat kota Makassar di tahun 1950 yang masih menonjolkan konsep "pribumi" atau orang "Makassar". Tulisan ini menjelaskan ruang kota Makassar sebagai bekas kota kolonial, lalu bagaimana kehidupan bersesama masyarakat di dalamnya berdasarkan bacaan Gagaklodra, dan tawaran kehidupan ideal yang diimajinasikan Gagaklodra.*

**Kata Kunci: Gagaklodra, Imajinasi, Kota Makassar, 1950**

## Pendahuluan

Pada tahun 1932 di masa kekuasaan pemerintah kolonial Belanda, Njoo Cheong Seng seorang penulis, wartawan dan pemain sandiwarra mengunjungi kota Makassar. Kunjungan ini tampaknya dalam aktifitasnya sebagai pemain sandiwarra yang mengunjungi berbagai tempat di Hindia bahkan di luar Hindia untuk melakukan pertunjukkan. Dua tahun sebelum kunjungannya ke Makassar, Njoo Cheong Seng baru saja memulai menulis serial detektif berjudul *Gagaklodra*, dengan tokoh utama Gagaklodra, seorang yang digambarkan sebagai seorang kriminal paling ditakuti di Hindia. Gagaklodra diceritakan melakukan pengembaraan dari satu tempat ke tempat lainnya untuk menemukan berbagai permasalahan dan membantu menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah pengembaraannya tersebut. Bukan suatu kebetulan bahwa latar tempat pengembaraan



Gagaklodra adalah tempat-tempat yang juga pernah dikunjungi Njoo Cheong Seng dalam aktifitasnya sebagai pemain sandiwarra.

**Salah satu ciri khas pengembaraan Gagaklodra, adalah ketelitiannya dalam menggambarkan kondisi tempat yang didatanginya.**

Tampaknya kota Makassar memiliki kesan tersendiri bagi Njoo Cheong Seng dan tokoh Gagaklodra. Tujuh belas tahun setelah kunjungannya yang pertama, Njoo Cheong Seng kembali berkunjung ke Makassar untuk yang kedua kalinya. Setahun setelah kunjungan Njoo

Cheong Seng, Gagaklodra tiba di Makassar dalam pengembaraannya yang panjang di berbagai tempat di Indonesia sejak tahun 1930. Makassar menjadi salah satu tempat dimana Gagaklodra tiba dan menemui berbagai macam permasalahan di tahun 1950, tahun di mana negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, dan setahun setelah berakhirnya revolusi yang juga menandai berakhirnya perang dengan sekutu bersama Belanda. Di Sulawesi Selatan tahun tersebut berjarak setahun setelah dibubarkannya Negara Indonesia Timur (selanjutnya disingkat NIT).

Salah satu ciri khas pengembaraan Gagaklodra, adalah ketelitiannya dalam menggambarkan kondisi tempat yang didatanginya. Termasuk dalam pengembaraan di Makassar tahun 1950, Gagaklodra begitu detail menggambarkan suasana bekas ibukota Negara federal bernama NIT, yang kemudian beralih fungsi menjadi ibukota dari salah satu propinsi negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Propinsi Sulawesi (Kementerian Penerangan, 1953: Hal. 177). Tulisan ini hendak menggambarkan bagaimana suasana kota Makassar ketika Gagaklodra hadir, di samping juga menggambarkan kondisi sosial dalam masyarakat yang digambarkan dalam serial *Gagaklodra* sebagai bentuk protes terhadap kondisi masyarakat warisan kolonial dan upaya untuk menuju masyarakat majemuk.

Pentingnya menggambarkan suasana kota Makassar melalui kacamata karya sastra, ditujukan untuk memberi

perspektif lain dalam melihat suasana kota, di samping pendekatan konvensional yang cenderung hanya mempercayai pengamatan langsung dari seseorang untuk menggambarkan suasana satu kota. Tulisan ini tidak hendak mengajak untuk tidak mengakui adanya pengamatan langsung, tetapi memberi cara pandang lain dalam menggambarkan suasana satu kota baik itu geografis maupun

menggunakan karya sastra, dapat juga menjadi masukan terutama untuk mengenali bangunan-bangunan bersejarah yang penting dalam upaya pelestarian cagar budaya yang banyak dipotret oleh berbagai jenis karya sastra sesaman. Seperti sudah disebutkan sebelumnya, bahwa serial *Gagaklodra*, ditulis dan diimajinasikan penulisnya yaitu Njoo Cheong Seng, berdasar pada pengalamannya mengunjungi kota



Benteng Rotterdam Tahun 1946 (KITLV)

perubahan sosial dalam masyarakat yaitu melalui karya sastra, dalam hal ini serial detektif. Kacamata seperti ini yaitu memotret kota dengan

Makassar sebanyak dua kali dan cara pandang pribadinya dalam melihat kondisi dalam masyarakat kota Makassar dalam tujuannya untuk



Raad van Justitie (Sumalyo, 2011, Hal. 318)

m e n e m p a t k a n kelompoknya yaitu etnis T i o n g h o a dalam masyarakat Indonesia. Sudah umum diketahui bahwa sejak periode kolonial, etnis Tionghoa menjadi etnis yang terus-menerus menjadi korban diskriminasi berdasar SARA (Kelas Sosial, Agama dan Ras). Kondisi yang digambarkan terakhir inilah, yang menjadi dasar utama ditulisnya serial Gagaklodra ini yang akan digambarkan nanti. Fokus utama tulisan ini adalah memberi gambaran kota Makassar "dari dalam" menurut istilah Roland Barthes, yang di samping menjelaskan bagaimana kondisi bangunan dan

jalan di dalam kota M a k a s s a r j u g a menjelaskan perubahan sosial dalam masyarakat kota Makassar yang dipotret dalam serial *Gagaklodra*.

### **Serial Gagaklodra: Protes terhadap Politik SARA**

Serial *Gagaklodra* ditulis pertama kali oleh Njoo Cheong Seng pada tahun 1930. Awalnya, serial ini dimuat dalam beberapa surat kabar tercetak yaitu *Liberty*, *Tjerita Roman*, *Tjantik*, *Tjilik Roman* dan *Tjerman*. Pada tahun 1953, sebanyak enam belas tulisan terpilih yang pernah terbit di surat

kabar, dikumpulkan dan menjadi sebuah buku dengan judul *22 Tahun dengan Gagaklodra* (Njoo Cheong Seng, 1953). Lewat serial *Gagaklodra* ini, sang penulis Njoo Cheong Seng menciptakan tokoh utama bernama Gagaklodra. Gagaklodra diceritakan melakukan pengembaraan dari satu tempat ke tempat lainnya, sebagian besar di daerah-daerah Hindia kekuasaan pemerintah kolonial Belanda, dan beberapa daerah di luar Hindia seperti Singapura, India, Burma, Afghanistan dan Pakistan. Di Hindia, Gagaklodra mengunjungi banyak tempat yaitu Kramat Kuda di Sumatera Timur (1932), Solo (1933), Palembang di Sumatera Selatan (1934), Bengkulu (1937), Sidhoardjo (1938), Surakarta (1939), Batavia (Jakarta saat ini) (1941), Malang (1942), Jakarta Raja (1945) dan Karanganyar (1948).

Serial *Gagaklodra* dan gambaran tokoh utama sebagai seorang kriminal yang melakukan pengembaraan ke



Rumah Kediaman Gubernur di Hoogepad (Sumalyo, 2011, Hal. 316)

berbagai tempat di wilayah Hindia tentu saja menarik untuk dilihat dalam berbagai aspek. Salah satu yang perlu dipertanyakan adalah kuatnya nuansa protes terhadap realitas sosial dan politik terhadap penguasa Hindia tempat Gagaklodra mengembara. Pendapat ini penting dipertanyakan bahwa untuk kepentingan apa seseorang yang adalah berasal dari etnis Tionghoa peranakan perlu untuk mengimajinasikan seorang tokoh kriminal untuk mengembara, menemukan dan menyelesaikan persoalan di berbagai tempat di

Hindia. Tentu saja kehadiran serial serupa seperti *Gagaklodra* dikarenakan adanya ketidakpuasan terhadap kondisi sosial yang dilihat

**Kondisi di Hindia kekuasaan pemerintah kolonial Belanda memang dipenuhi dengan ketimpangan. Mulai dari eksploitasi di bidang ekonomi yang menjadi alasan utama pemerintah kolonial menduduki Nusantara sejak tahun 1799.**

penulis mengalami ketimpangan. Bukan juga persoalan yang mudah, untuk bebas mengunjungi

berbagai tempat di Hindia pada periode kolonial, yang justru lebih banyak diperankan oleh elit-elit kolonial, atau orang-orang Eropa yang memiliki privilege dibandingkan orang Timur asing atau pribumi. Pengembaraan yang dilakukan sepertinya menunjukkan protes terhadap kebijakan pengelompokan masyarakat yang kaku.

Kondisi di Hindia kekuasaan pemerintah kolonial Belanda memang dipenuhi dengan ketimpangan. Mulai dari

eksploitasi di bidang ekonomi yang menjadi alasan utama pemerintah kolonial menduduki Nusantara sejak tahun 1799. Selain itu, kondisi sosial masyarakat juga menampilkan segregasi Ras yang dipraktekkan oleh pemerintah kolonial Belanda, demi untuk menciptakan kondisi stabil di daerah koloni Hindia. Untuk mengelompokkan masyarakat, pemerintah kolonial menetapkan suatu aturan kaku bahwa struktur masyarakat dibagi menjadi orang Eropa, Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*) dan Pribumi. Struktur ini dikatakan kaku, karena dalam penerapannya pemerintah kolonial tidak mengizinkan berbaurnya satu kelompok etnis dengan kelompok etnis lainnya, karena ditakutkan mengganggu aktifitas

**Untuk mengelompokkan masyarakat, pemerintah kolonial menetapkan suatu aturan kaku bahwa struktur masyarakat dibagi menjadi orang Eropa, Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*) dan Pribumi.**

ekonomi kolonial dan lebih jauh akan menimbulkan gerakan protes terhadap penguasa (Anderson, 2018: Hal. 139). Kondisi seperti ini, tampaknya menimbulkan ketakutan bagi Njoo Cheong Seng, akan memberikan dampak berkepanjangan terhadap rawannya masyarakat dibeda-bedakan berdasar SARA tersebut. Maka untuk kepentingan tersebut, tokoh Gagaklodra diciptakan dan digambarkan menemui berbagai kelompok masyarakat di Hindia untuk menyadarkan akan bahaya politik kolonial (baca: kriminal) bagi masyarakat di Hindia.

**Identitasnya sebagai bagian dari komunitas Tionghoa yang selalu mendapatkan perlakuan diskriminatif di Hindia**

Njoo Cheong Seng tidak cukup dengan menciptakan tokoh Gagaklodra, tetapi kemudian menuliskan dalam bentuk serial yang awalnya dimuat di surat kabar tercetak, lalu kemudian membagikan kekuatiran dan protes terhadap politik penguasa kolonial, demi untuk menciptakan masyarakat majemuk tidak dibedakan berdasar SARA. Dalam tokoh Gagaklodra, ditemui pengalaman yang ditemui oleh penulisnya yaitu Njoo Cheong Seng yang didapatkannya dari berbagai aspek. Identitasnya sebagai bagian dari komunitas Tionghoa yang selalu mendapatkan perlakuan diskriminatif di Hindia, lalu keunggulannya yang bisa mengunjunggi berbagai tempat di Hindia dan bisa melihat dan memperbandingkan satu tempat dengan tempat lainnya di Hindia dan juga di luar Hindia. Keunggulan lain yang



Sampul Gagaklodra Tahun 1950, Setan Tiga dari Galesong

dimiliki oleh Njoo Cheong Seng yaitu sebagai seorang wartawan, membantunya untuk bisa mendirikan berbagai jenis surat kabar yang digunakannya untuk menyebarkan gagasan hasil perjalanannya dan jalan keluar membentuk satu masyarakat ideal bagi kehidupan di Hindia (Indonesia sekarang). Hal ini didukung oleh ditemukannya percetakan, yang membantu proses penyebaran gagasan dalam bentuk surat kabar tercetak (Anderson, 2009: Hal. 388).

Tampaknya permasalahan serupa yang ditemuinya di berbagai tempat di Hindia dan luar Hindia, ditemui

juga oleh Njoo Cheong Seng dalam dua kali kunjungannya ke Kota Makassar. Hal ini mendorong Njoo Cheong Seng untuk menuliskan hasil petualangan Gagaklodra di Makassar dalam dua seri khusus berjudul *Gagaklodra mentjari Allah* dan *Gagaklodra djual Makassar: Setan Tiga dari Galesong*. Terbilang unik dibandingkan dengan seri Gagaklodra lainnya, bahwa dua seri di Makassar ditulis lebih

tebal. Jika seri-seri pengembaraan Gagaklodra di tempat lain ditulis antara 10-20 halaman kertas berukuran A5, maka seri berjudul *Gagaklodra Mentjari Allah* setebal 108 halaman kertas A5, sedangkan *Gagaklodra djual Makassar: Setan Tiga dari Galesong* dimuat dalam 105 lembar kertas berukuran A5. Tebalnya jumlah halaman

menunjukkan betapa banyak pengalaman yang perlu dituliskan dan dibagikan kepada pembaca di Hindia mengenai kota Makassar dan hidup bersesama di dalam masyarakatnya.

Serial berjudul *Gagaklodra Mencari Allah* dan *Gagaklodra djual Makassar: Setan Tiga dari Galesong* menceritakan tentang pengembaraan Gagaklodra di Makassar. Dalam perjalanannya Gagaklodra sebagaimana biasanya di tempat

**Sebagaimana para kriminal lokal di berbagai tempat di Hindia yang mengaku berkuasa atas daerahnya, kedatangan kelompok kriminal yang lain tentu saja menjadi tantangan.**

pengembaraannya, bertemu dengan kelompok-kelompok kriminal lokal yaitu Daeng Baso, Soenking dan Hama Rloi. Sebagaimana para kriminal lokal di berbagai tempat di Hindia yang mengaku berkuasa atas daerahnya, kedatangan kelompok kriminal yang lain tentu saja menjadi tantangan. Begitu juga kedatangan Gagaklodra di Makassar, yang juga

telah dikenal sebagai seorang kriminal paling ditakuti di Hindia, telah

## **Jadilah Makassar sebagai ajang pertarungan antara Gagaklodra dan kelompoknya dengan Daeng Baso, Soen-king dan Hama Roloj serta Bon-seng.**

menjadi tantangan tersendiri bagi Daeng Baso, Soen-king dan Hama Roloj. Tidak hanya bertiga, Daeng Baso, Soen-king dan Hama Roloj telah mengundang Setan Tiga dari Galesong yang terkenal dengan ilmu sihirnya untuk bersekutu menghadapi Gagaklodra. Ternyata Gagaklodra bukan hanya berhadapan dengan Daeng Baso, Soen-king dan Hama Roloj serta sekutunya, di sisi yang lain Bon-seng jauh-jauh datang dari Jakarta ke Makassar mencari Gagaklodra untuk menuntut balas kematian ayahnya. Jadilah Makassar sebagai ajang pertarungan antara Gagaklodra dan kelompoknya dengan

Daeng Baso, Soen-king dan Hama Roloj serta Bon-seng. Drama di Makassar juga dibungkus dengan hubungan asmara antara Gagaklodra dengan Daisy adik perempuan Bon-seng dan pertemuan antara Gagaklodra dengan perawat asal Minahasa bernama Elvira Lengkong.

Sementara sebelumnya Gagaklodra telah menjalin hubungan asmara dengan Hoa-hing muridnya. Cinta segi empat ini mewarnai pertarungan dengan jago lokal dan dendam kesumat yang dibawah oleh Bon-seng.

## **Ruang Kota Makassar dalam Imajinasi Gagaklodra**

Perluasan dan pembangunan kota Makassar yang dikunjungi Njoo Cheong Seng di tahun 1932 dan 1949, dan yang dilewati Gagaklodra dalam pengembaraannya di tahun 1950, baru dimulai sekitar tahun 1908 (Pradadimara, 2003: Hal. 80). Cikal bakal dari perluasan dan pembangunan kota ini, berasal dari kota kolonial

yang tumbuh dan berkembang di abad ke-17, di sekitar Fort Rotterdam (Sutherland, 2004). Tahun perluasan dan pembangunan kota ini hanya berselang tiga tahun setelah proses penaklukan daerah Sulawesi selatan selesai dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda, dan menunjuk kota Makassar sebagai pusat administrasi kolonial yang terletak di Fort Rotterdam. Setidaknya dari sini memperlihatkan bahwa kota Makassar yang didatangi Gagaklodra di tahun 1950 tersebut, merupakan susunan kota yang diimajinasikan oleh para insinyur-insinyur Belanda serupa *happyland*, yaitu kota yang indah tanpa adanya masalah (Mrazek, 2006: Hal. 137-142; Onghokham, 1994: Hal. 37). Kota ini disusun sekosmopolitan mungkin mengikuti pengalaman kota ini sebagai salah satu kota pusat perdagangan yang dikunjungi pedagang dari berbagai tempat di dunia, tetapi diletakkan teratur dalam

tata pemerintah kolonial yang mengatur penduduk kota dalam pembagian kelompok masyarakat berbasis SARA.

**Wajah kota Makassar di tahun 1950 merupakan sebuah proses transisi dari berakhirnya era kekuasaan kolonial, yang masih dibawa mengikuti periode revolusi dan NIT menuju sebuah era yang kadang juga disebut menurut istilah Ilham Daeng Makkelo sebagai era modern (Makkelo, 2018).**

Dalam perkembangan tahun 1950an yang berjarak satu tahun setelah berakhirnya revolusi, sekaligus berakhirnya NIT, kota Makassar dilihat dalam pandangan sebagai kota kolaborator dengan Belanda, sementara daerah lain yang berada di luar kota Makassar dilihat sebagai tempat para patriot (Pradadimara,

2003: Hal. 85). Dalam pandangan tersebut, perkembangan kota sebagai pusat kekuasaan NIT antara 1946-1949, wajah Kota Makassar masih ditampilkan dalam kehadiran golongan dari berbagai daerah, sekaligus juga masih belum selesainya politik segregasi RAS warisan kolonial Belanda. Hal ini menjadi satu permasalahan besar yang sudah menjadi fokus utama Njoo Cheong Seng dan menjadi alasan melahirkan tokoh kriminal Gagaklodra. Tampaknya wajah kota Makassar seperti yang dijumpai dalam kunjungannya tersebut, masih rawan melahirkan pertentangan berbasis SARA dalam masyarakat yang sebenarnya telah dibunuhnya di berbagai tempat pengembaraan Gagaklodra pada periode kolonial (Tarupay, 2018: Hal. 131).

Wajah kota Makassar di tahun 1950 merupakan sebuah proses transisi dari berakhirnya era kekuasaan kolonial, yang masih dibawa mengikuti periode revolusi dan NIT

menuju sebuah era yang kadang juga disebut menurut istilah Ilham Daeng Makkelo sebagai era modern (Makkelo, 2018). Dalam bidang politik, tahun 1950an juga menjadi periode yang penuh ketidakpastian di Sulawesi Selatan. Hal ini dikarenakan adanya persoalan desentralisasi kekuasaan, dihapuskannya daerah-daerah Swapraja, persoalan pengangkatan Gubernur Sudiro sebagai gubernur Sulawesi dan pemberontakan DI/ TII Kahar Muzakkar (Burhaman Djunedding, 2014: Hal. 144). Kota yang menuju proses modernisasi ini akan dipotret dari seorang kriminal yang kadang kala justru digambarkan sebagai penghambat modernisasi. Pada bagian ini digambarkan ruang kota Makassar dalam proses transisi tersebut, yang dikunjungi Gagaklodra di tahun 1950.

### **Serial Gagaklodra Mentjari Allah**

Gagaklodra berangkat ke Makassar dari pelabuhan Tanjung Priok

di Jakarta. Disebutkan pada awal kisah perjalanannya bahwa Gagaklodra berangkat bersama dengan rombongannya menumpang kapal MS. Ophir. Rute perjalanan kapal MS Ophir, yaitu berangkat dari pelabuhan Tanjung Priuk menuju Semarang, lalu ke Surabaya, mampir di pelabuhan Buleleng di Bali lalu berakhir di kota Makassar. Demikian keberangkatan Gagaklodra pada tahun 1950 digambarkan dalam pembuka serial berjudul *Gagaklodra Mentjari Allah*,

Kapal M.S. Ophir menarik djangkar, meninggalkan Djakarta. Tubuh kapal jang besarnja kl. 4000 ton melepaskan diri dari haven Tandjung Priok. Tudjuan pelajaran adalah ke Semarang, Surabaja, Buleleng (Bali) dan Makassar (Sulawesi Selatan) (Njoo Cheong Seng, 1950: Hal. 4).

Tidak ada informasi yang didapatkan mengenai kapal bernama

MS. Ophir, selain bobotnya seberat kl. 4000 ton. Sementara rute yang ditempuh oleh kapal tersebut adalah rute menyusuri pulau Jawa bagian utara. Pelabuhan Buleleng sendiri jika diamati dalam peta, terletak di bagian utara pulau Bali yang lebih kecil dari pulau Jawa tersebut. Lepas dari Buleleng, kapal MS. Ophir langsung menempuh jalur ke arah utara menuju pelabuhan di Kota Makassar. Ketika berlabuh di Surabaya, kelompok sandiwara yang akan melakukan pementasan di Makassar ikut serta menumpang kapal MS. Ophir. Rombongan sandiwara tersebut dijelaskan berikut ini:

Jang datang pada hari itu, tida lain dan tida bukan jalah rombongan sandiwara dari Surabaja. Dengan bintang-bintangnja : Fifi Young, Aminah Merdeka, Melinda d'Ar, Roemiati, Mariam, Wasri, Awaloedin Oedjang-Sadrach, dibawah pimpinan R. Agoes Herman Koesoemobroto,

kepunjaan Djamaloeddin Malik, didjeman Djepang mendjadi Radja-Tjatut dan bisa tumpuk uang ratusan ribu, dan didjeman Republik bersifat dagang dan Sandiwaranja di Jocja dengan setjara litjin (Njoo Cheong Seng, 1950: Hal. 22).

Menurut Ilham Daeng Makkelo, kemodernan kota Makassar di tahun 1950an salah satunya ditandai dengan hadirnya pementasan-pementasan sandiwara yang menjadi hiburan bagi warga kota Makassar (Makkelo, 2018: Hal. 53; bandingkan Bodden, 2009: Hal. 914-917). Tidak disebutkan nama kelompok sandiwara dari Surabaya tersebut, tetapi dengan melihat aktifitas sandiwara Njoo Cheong Seng setelah perang, mungkin yang berkunjung ke Makassar di tahun 1950 tersebut adalah kelompok sandiwara *Pantja Warna*. Grup sandiwara ini didirikan oleh Njoo Cheong Seng di tahun ketika penjajahan Jepang telah berakhir dan

bersamaan dengan itu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan (Tarupay, 2018: Hal. 127). Kelompok sandiwara Pantja Warna dibintangi oleh Fifi Young seorang pemain sandiwara yang sudah populer di periode kolonial dan juga adalah istri kedua dari Njoo Cheong Seng. Sementara itu, dalam group ini hadir bintang baru bernama Mipi Malenka atau Melinda d'Ar, yang adalah istri ketiga Njoo Cheong Seng. Kedua nama tersebut, disebutkan dalam rombongan sandiwara yang berkunjung ke Makassar yang diceritakan dalam serial *Gagaklodra*.

Ruang kota selanjutnya yang digambarkan dalam serial *Gagaklodra* adalah hotel yang terdapat di kota Makassar. Percakapan *Gagaklodra* dengan Daisy, seorang penumpang yang baru dikenalnya di atas kapal MS. Ophir seperti ini,

Kemudian marika saling berpisa dimuka Douane. Daisy menerangkan,

ia tinggal di Grand Hotel, It-ban tida dapat menerangkan dimana tinggal, mungkin di Hotel Empress atau di Hotel Negara. Chandra Gupta membisu tida menerangkan dimana ia bakal menginep....(Njoo Cheong Seng, 1950: Hal. 26)

Sudah sejak periode kolonial, di kota Makassar telah tersedia beberapa hotel untuk mengakomodasi para pengunjung ke kota tersebut. Sebagaimana disebutkan pada dialog antara It-ban (nama lain *Gagaklodra*) dengan Daisy, di kota Makassar terdapat tiga hotel yaitu Grand Hotel, Hotel Empress dan Hotel Negara. Grand Hotel merupakan salah satu dari tiga hotel besar di kota

Makassar pada periode kolonial yang terletak di jalan Hoogepad No. 3 (untuk jalan ini akan dijelaskan pada bagian selanjutnya). Tahun berdiri Grand Hotel tidak dapat dipastikan. Pada buku telepon tahun 1930, nama Grand Hotel tidak ada, tetapi pada buku telepon tahun 1939, hotel tersebut sudah tercatat lengkap dengan nomor telepon yang bisa dihubu

ngi yaitu MS 440 (Anonim, 1939: Hal. 4). Informasi lain dari hotel ini diungkapkan oleh seorang bangsawan Inggris bernama Theodora Benson

**Dituliskan dalam catatan perjalanannya bahwa Hotel Grand menyediakan *reis tafel* (*rijsttafel*) atau makanan tradisional yang terdiri dari beragam masakan dan sambal yang disajikan bersama nasi) yang sangat lezat jika seorang ingin menyantap makanan Hindia.**

yang mengunjungi Makassar di tahun 1930an. Dituliskan dalam catatan perjalanannya bahwa Hotel Grand menyediakan *reis tafel*

(*rijsttafel* atau makanan tradisional yang terdiri dari beragam masakan dan sambal yang disajikan bersama nasi) yang sangat lezat jika seorang ingin menyantap makanan Hindia. Ada beberapa hiasan keramik cantik di dinding hotel dan rak hotel. Kamar dihias dengan kertas dinding merah dengan bintik-bintik berwarna perak kusam. Para pengasong duduk di tangga hotel sambil menjajakan kerajinan perak, beberapa kerawang dari Bali dan Kendari (Benson, 2012: Hal. 232). Di tahun 1951 Grand Hotel masih terdapat dalam buku telepon beralamat di Djalan Karebosi No. 5 (dulunya jalan Hoogepad), dengan nomor telepon MS. 447 (Anonim, 1951: Hal. 6).

Hotel Empress dikatakan oleh Asmunandar didirikan pada tahun 1930 (Asmunandar, 2008: Hal. 135). Hotel ini berdasarkan buku telepon tahun 1939 terdaftar beralamat di Komedielaan dengan nomor telepon

Ms. 164 (Anonim, 1939: Hal. 3). Frank Clune yang berasal dari Australia, yang mengunjungi Makassar pada tahun 1940, menceritakan pengalamannya di Hotel Empress demikian,

Di Hotel Empress (sekarang Maharani), kami menikmati makan siang yang lezat. Menu makannya memiliki nama dengan banyak suku kata , diantaranya AARDAPPEL SOEP alias sup kentang, VARKENS COTELETTEN atau daging babi, GEKOOKTE AARDAPPELEN atau kentang rebus dan GRIESMEELPUDDING alias puding semolina, yang dilengkapi dengan KOFFIE (kopi) (Clune, 2012: Hal. 246-247).

Dalam buku telepon tahun 1951, hotel Empress yang disebut dalam serial *Gagaklodra* ini alamatnya telah berubah nama menjadi jalan Dewan Rakjat nomor 8, dengan nomor telepon Ms. 1079 (Anonim, 1951: Hal. 7). Saat ini di lahan

bekas hotel tersebut telah digantikan oleh Sekolah Pendidikan Islam Athirah. Untuk Hotel Negara, tidak banyak informasi yang diperoleh. Satu-satunya informasi mengenai hotel ini yaitu terdaftar dalam buku telepon tahun 1951 beralamat di jalan Maritjaja (Schijfbergweg), dengan nomor telepon Ms. 312 (Anonim, 1951: Hal. 7).

Bangunan lain di kota Makassar yang disebutkan dalam serial *Gagaklodra* adalah penjara Hoogepad. Penjara Hoogepad beberapa kali disebutkan dalam serial *Gagaklodra* untuk menjelaskan tempat kurungan bagi siapa saja yang dicap kriminal. Berikut beberapa petikan dalam serial *Gagaklodra* mengenai penjara Hoogepad,

Satu mulut ke lain mulut dari orang-orang Madura jang banjak tinggal di Makassar. Suda tentu Gipo tjukup tjerdik tida memperkenalkan dirinja Gipo, sebab dengan undjuk sadjah satu nama Gipo, sudah pasti ia

lantas diadjak main-main ke pendjara Hoogepad jang memang menungguh dengan sabar kedatangan kawan-an Gagaklodra jang hendak meritju-ritju Makassar... (Njoo Cheong Seng, 1950: Hal. 28)

dan juga, Daeng Baso bertemu dengan Soen-king, Buaja Kampung Tjina jang mempunyai idjaza baik di rumah pendjara Hoogepad dan Malino. (Njoo Cheong Seng, 1950: Hal. 41)

Nama penjara Hoogepad mengacu pada nama jalan letak penjara ini yaitu di jalan Hoogepad. Dalam peta bertahun 1922, penjara Hoogepad dengan nama *Civ. Gevangen* terletak di ujung timur jalan Hoogepad. Dalam buku telepon, penjara tersebut terdaftar dengan nama Gevangen Lands, yang diberi keterangan alamat kantor direktur di tempat yang sama dengan penjara. Penjara Hoogepad masih digunakan setidaknya sampai periode revolusi, di mana para pejuang yang ditangkap oleh tentara NICA di Makassar,

ditahan di penjara Hoogepad (Pradadimara, 2014: Hal. 15). Tidak ada informasi yang ditemukan mengenai fungsi bangunan ini sampai tahun 1950. Tetapi setidaknya informasi yang dituliskan dalam serial *Gagaklodra* menunjukkan bahwa penjara ini masih digunakan sampai tahun 1950 menjadi kurungan bagi siapa saja yang dicap oleh penguasa sebagai kriminal.

Lokasi bekas penjara Hoogepad saat ini telah berubah fungsi menjadi *Mall Makassar Trade Center*. Jalan Hoogepad sendiri merupakan jalan penting di kota Makassar sejak periode kolonial. *Hoogepad* berarti tanah yang tinggi, yang menunjukkan peran vital jalan ini dibandingkan jalan lainnya di kota

Makassar. Pada periode kolonial, di sepanjang jalan Hoogepad terdapat bangunan-bangunan penting antara lain rumah kediaman Gubernur *Makassar en Onderhoorigheden*, hotel-hotel besar, Gereja Protestan, penjara, koningsplein dan

benteng Vredenburg. Saat ini jalan tersebut masih menjadi bagian penting di kota Makassar, tetapi telah berganti nama

**Pada periode kolonial, di sepanjang jalan Hoogepad terdapat bangunan-bangunan penting antara lain rumah kediaman Gubernur *Makassar en Onderhoorigheden*, hotel-hotel besar, Gereja Protestan, penjara, koningsplein dan benteng Vredenburg.**

menjadi Jalan Ahmad Yani, mengacu pada nama Jenderal dari kesatuan Angkatan Darat, bekas panglima angkatan darat periode pemerintahan presiden Soekarno, yang dibunuh pada peristiwa 1965 (Ricklefs, 2008: Hal. 582).

Selain menyebutkan bangunan yang berdiri di kota

Makassar di tahun 1950, Gagaklodra juga menyebutkan salah satu alat transportasi yang digunakan masyarakat di kota tersebut. Diceritakan bahwa Gagaklodra berputar-putar di kota Makassar menggunakan kendaraan roda tiga yang menjadi transportasi umum di kota Makassar. Kendaraan ini dikenal dengan sebutan Becak. Demikian diceritakan pengalaman Gagaklodra,

Gagaklodra berputar-putar kota dengan Roda-tiga (betja). Tetapi ia berhenti di ujung Hoogepad, di tempat mandi dari Harmonie (Njoo Cheong Seng, 1950: Hal. 100).

Sejauh bisa ditelusuri, becak sudah digunakan sejak tahun 1930. Theodora Benson menceritakan pengalamannya melihat becak seperti ini, *Di Makassar, anda dapat melihat penumpang sepeda beroda tiga di mana pun, yang mengambil alih fungsi angkong dan melengkapi armada taksi. Seseorang mengayuh sarana*

*transportasi ini dari belakang sementara di depannya terdapat sebuah tempat duduk lebar yang pernah saya lihat sanggup menampung hingga empat orang dewasa.*

Menurut informasi yang didapat Benson dari orang Belanda yang ditulis dalam catatan perjalanannya, bahwa becak dibuat oleh orang Jepang (Benson, 2012: Hal. 230). Sampai dengan saat ini, becak masih banyak dijumpai di kota Makassar, meskipun ukurannya sudah diperkecil, yang hanya dapat memuat dua orang dewasa.

Ujung dari perjalanan Gagaklodra di Hoogepad diakhiri di gedung Harmonie atau yang lebih lengkap disebut Societet de Harmonie. Gedung Societet de Harmonie seperti disebutkan dalam cerita penggambaran

disetarakan dengan orang Eropa. Gedung Harmonie di kota Makassar yang masih ditemui Gagaklodra di tahun 1950 merupakan

Gagaklodra, terletak di ujung jalan Hoogepad lebih tepatnya di jalan Prins Hendrikpad atau di sisi sebelah utara benteng Rotterdam. Di tahun 1950, jalan Prins Hendrikpad telah diganti nama dengan jalan Pengadilan I. Gedung Societet de Harmonie selalu dibangun di setiap kota-kota besar di Hindia Belanda yang digunakan sebagai ruang pertemuan, pertunjukan dan ruang pesta. Gedung Harmonie selalu diidentikan sebagai penanda perbedaan kelas di masyarakat Hindia,

karena yang bisa masuk ke dalam gedung ini adalah bangsa Eropa dan para elit-elit yang

**Gedung Societet de Harmonie seperti disebutkan dalam cerita penggambaran Gagaklodra, terletak di ujung jalan Hoogepad lebih tepatnya di jalan Prins Hendrikpad atau di sisi sebelah utara benteng Rotterdam.**

disetarakan dengan orang Eropa. Gedung Harmonie di kota Makassar yang masih ditemui Gagaklodra di tahun 1950 merupakan

bangunan yang dibangun pada tahun 1896

(Asmunandar, 2008: Hal. 131).

Setelah berakhirnya era kolonial,

gedung Harmonie telah berganti-ganti fungsi.

Antara tahun 1942-1953

gedung Harmonie

difungsikan sebagai balai pertemuan masyarakat, lalu antara tahun 1953-1955 digunakan untuk perkumpulan orang Eropa, Cina dan golongan pribumi tertentu. Sempat menjadi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan antara tahun 1960-1978, lalu kemudian secara bergantian digunakan sebagai kantor Komite Nasional Pemuda Indonesia, kantor Dinas Pendapatan Daerah dan terakhir kali difungsikan kembali sebagai gedung pertunjukan bagi Dewan Kesenian Makassar

(Asmunandar, 2008: Hal. 133).

Setelah dari

Gedung Harmonie, Gagaklodra melewati jembatan besi di ujung sebelah barat jalan Pengadilan. Jembatan yang fungsinya sebagai dermaga ini kadang kala

digunakan sebagai tempat kapal bersandar. Dari jembatan Besi ini Gagaklodra memasuki Menara Api (mungkin Mercusu ar) dan memandang ke laut (Njoo Cheong Seng, 1950: Hal. 100). Dari Menara Api, Gagaklodra berjalan ke arah selatan menyusuri jalan di sepanjang garis

pantai, melewati Biscoop Capitol (Capitol Theater) yang terletak di jalan Udjungpandang (Fortweg). Gagaklodra lalu masuk ke dalam restaurant Sin Chung Kuo (New China) yang berada di pinggir laut. Setelah minum Orange Crush hasil produksi Pabrik Limonade Electra, Gagaklodra melanjutkan perjalanan dengan menyusuri trotoar sepanjang garis pantai di Strand Boulevard.

Gagaklodra melewati rumah sakit Stella Maris. Rumah sakit Stella Maris juga dibangun pada periode kolonial, tepatnya di tahun 1938. Rumah sakit ini dibangun oleh

kongregasi

Susteran

Katolik

(Asmunandar, 2008: Hal. 119).

Dalam

perjalanan menyusuri garis pantai, Gagaklodra melewati penginapan

coprafonds yang lokasinya saat ini mungkin berada di tempat dimana

**Setelah minum Orange Crush hasil produksi Pabrik Limonade Electra, Gagaklodra melanjutkan perjalanan dengan menyusuri trotoar sepanjang garis pantai di Strand Boulevard.**

**Abdul Hamid Daeng Magassing merupakan politikus dari Partai Persatuan Indonesia Raya (PIR) dan menjabat sebagai walikota Makassar sejak tahun 1947 atau di periode revolusi**

hotel Aryaduta berdiri. Di sebelah penginapan coprafonds adalah rumah tiga tingkat walikota Makassar yang saat itu dijabat oleh AbdulHamid Daeng Magassing sekaligus penghuni rumah tiga tingkat tersebut. AbdulHamid Daeng Magassing merupakan politikus dari Partai Persatuan Indonesia Raya (PIR) dan menjabat sebagai walikota Makassar sejak tahun 1947 atau di periode revolusi (Pradadimara, 2003: Hal. 84; Kementerian Penerangan, 1953: Hal. 197). Tahun ketika Gagaklodra melintas di depan rumah jabatannya merupakan periode terakhirnya menjabat sebagai walikota Makassar. Rumah jabatan tiga tingkat ini didirikan pada tahun 1933 sebagai kediaman Burgemeester dan kemudian beralih menjadi rumah jabatan Walikota Makassar setelah Indonesia Merdeka. Ujung dari jalan Strand Boulevard adalah istana Radio Makassar. Istana Radio ini pada periode kolonial disebut sebagai

Stasiun Marconi, stasiun radio ini lalu dipindahkan ke sebelah timur benteng Rotterdam di Prins Hendrikplein dan berubah menjadi Kantor Radio Republik Indonesia (RRI) (Asmunandar, 2008: Hal. 45). Sepanjang garis

**Rumah jabatan tiga tingkat ini didirikan pada tahun 1933 sebagai kediaman Burgemeester dan kemudian beralih menjadi rumah jabatan Walikota Makassar setelah Indonesia Merdeka.**

pantai (pantai Losari) yang dilalui Gagaklodra merupakan ruang terbuka utama yang banyak dikunjungi oleh warga kota Makassar untuk bersantai dan rekreasi di tahun 1950 bahkan sampai saat ini (Makkelo, 2018: Hal. 53).

Setelah menyusuri sepanjang garis pantai di Strand Boulevard, Gagaklodra menyeberang ke pulau Lai-lai dan pulau Samalona. Pulau Lai-lai merupakan satu pulau yang berada dekat dengan Strand Boulevard,

menurut pengukuran Gagaklodra, jaraknya kira-kira dua kilometer dari pantai Makassar (Njoo Cheong Seng (b), 1950: Hal. 66). Saat ini pulau tersebut banyak digunakan oleh masyarakat Kota

Makassar sebagai tempat rekreasi. Tidak ada informasi yang menjelaskan mengenai fungsi pulau ini di tahun 1950. Sebatas yang diceritakan dalam serial *Gagaklodra Mentjari Allah*, bahwa pulau ini menjadi tempat pertarungan

antara Gagaklodra dengan Bon-Seng, kakak dari Daisy, yang mencari Gagaklodra di Makassar untuk menuntut balas kematian ayahnya. Gagaklodra menyebrang ke pulau tersebut dengan menggunakan perahu layar yang dikemudikan oleh seorang tukang perahu. Setidaknya informasi mengenai adanya perahu layar yang membawa Gagaklodra menyeberang dari Strand Boulevard ke pulau Lai-Lai dan pulau Samalona menunjukkan bahwa ada

aktifitas rutin yang dilakukan di pulau tersebut. Bisa diduga bahwa dua pulau ini telah menjadi tempat rekreasi yang sama fungsinya dengan saat sekarang ini.

Akhir kisah serial *Gagaklodra Mentjari Allah* memotret salah satu rumah sakit yang ada di kota Makassar yang

**Di rumah sakit ini, Gagaklodra dirawat setelah tertembak dalam adu tembak dengan Bon-Seng di pulau Lai-lai. Sejauh pengecekan di beberapa sumber, tidak ada informasi yang didapatkan mengenai nama Staats Hospital.**

disebut dalam serial tersebut dengan nama Staats Hospital. Di rumah sakit ini, Gagaklodra dirawat setelah tertembak dalam adu tembak dengan Bon-Seng di pulau Lai-lai. Sejauh pengecekan di beberapa sumber, tidak ada informasi yang didapatkan mengenai

nama Staats Hospital. Tetapi dalam serial Gagaklodra berjudul *Gagaklodra dijual Makassar: Setan Tiga dari Galesong*, diperoleh informasi bahwa letak Staats Hospital berada di jalan Dadi. Berikut kutipan yang menyebutkan informasi letak Staats Hospital,

Karena melihat penumpangnja itu keluar dari Djalan Dadi, jalah djalan rumah sakit gila jang letaknja sebelah-menyebelah dengan rumah sakit negara itu, maka timbul fikiran si tukang betjak itu, bahwa penumpangnja baru sadja dibebaskan dari rumah sakit orang jang sakit ingatan itu. (Njoo Cheong Seng (b), 1950: Hal. 70).

Informasi dalam serial Gagaklodra ini didukung dengan informasi yang dimuat dalam buku telepon tahun 1951 yang mengarahkan untuk melihat Rumah Sakit Dadi untuk kata kunci Rumah Sakit Negara (terjemahan dari Staats Hospital, pen) (Anonim, 1951: Hal. 18).

Dalam buku telepon yang sama tertera bahwa Rumah Sakit Umum dan Djiwa terletak di tempat yang sama yaitu di Djalan Dadi nomor 16. Sebagai informasi tambahan bahwa dalam buku telepon 1951 disebutkan bahwa pemimpin dari rumah sakit tersebut adalah Dr. P. Th.

Pinontoan (Anonim, 1951: Hal. 14). Saat ini, rumah sakit tersebut masih berdiri, tetapi nama jalan tempat rumah sakit tersebut dirubah menjadi Jalan Lanto Dg. Pasewang, mengacu kepada nama mantan Gubernur Sulawesi Selatan yang menjabat antara tahun 1954-1956.

### **Gagaklodra dijual Makassar: Setan Tiga dari Galesong**

Serial *Gagaklodra dijual Makassar: Setan Tiga dari Galesong* merupakan lanjutan dari serial *Gagaklodra Mentjari Allah* dan diterbitkan di tahun yang sama. Beberapa bangunan dan jalan di kota Makassar disebutkan dalam serial ini. Ada bangunan dan jalan yang sudah disebutkan dalam

serial *Gagaklodra Mentjari Allah* dan disebut kembali dalam serial *Gagaklodra djual Makassar: Setan Tiga dari*

*Galesong*.

Untuk pembahas an bagian ini, nama yang sudah dijelaskan dalam serial pertama, tidak akan diulas lagi, dan pada bagian ini

menjelaskan tentang tempat-tempat yang baru disebutkan, sebagai informasi mengenai ruang kota Makassar di tahun saat serial ini ditulis. Tempat-tempat yang dijelaskan, diurutkan berdasarkan halaman dalam serial *Gagaklodra djual Makassar: Setan Tiga dari Galesong*.

Sehabis keluar dari *Staads Hospital* tempatnya dirawat, *Gagaklodra* menyusuri jalan Gowa (*Gowa Weg*). Jalan Goa merupakan jalan yang

menghubungkan antara Makassar dengan wilayah Gowa dan Sungguminasa yang dibangun pada akhir

abad ke-18

(Sumalyo, 2011: Hal. 308). Gowa sendiri dikenal sebagai kota tradisional, tempat istana Sultan Gowa yang mendomina si politik di Sulawesi Selatan sampai abad ke-17, yaitu

ketika ditaklukkan oleh *Vereegnide Oost Indische Compagnie* (VOC) dalam perang Makassar di tahun 1666. Kekalahan ini menandai dimulainya kontrol VOC, lalu negara kolonial di Sulawesi Selatan, yang kemudian memindahkan pusat kekuasaannya ke kota Makassar di benteng Rotterdam. Di sepanjang jalan Goa yang dilaluinya, *Gagaklodra* melalui beberapa tempat penting di kota Makassar yang dituliskan dalam serial *Gagaklodra djual*

*Makassar: Setan Tiga dari Galesong*. Berikut kisah perjalanan *Gagaklodra* di sepanjang Jalan Goa dituliskan,

Apabila Roda Tiga itu sampai didjalan hospitaal militair *Gagaklodra* seperti teringat apa-apa. Dari sana ia mengetahui ia akan sampai ke Koningsplein, alun-alun besar dipusat kota Makassar, ibu kota dari Negara Indonesia Timur, kota jang terbesar dari Sulawesi Selatan, bahkan diseluruh Sulawesi, Bali, Maluku, dan Timor Besar (Njoo Cheong Seng (b), 1950: Hal. 70).

Jalan Hospital letaknya searah dengan jalan Goa. Dikatakan jalan Hospital karena di jalan tersebut terdapat rumah sakit militer. Rumah sakit ini merupakan salah satu bangunan penting yang didirikan oleh pemerintah kolonial di akhir abad ke-19 yang letaknya jauh dari benteng Rotterdam (Sumalyo, 2011: Hal. 308). Lokasi tempat berdirinya rumah sakit militer ini sebelumnya merupakan

bagian dari Koningsplein yaitu satu lapangan luas di tengah kota. Sampai

saat ini rumah sakit militer tersebut masih berdiri dengan fungsi yang sama

saat didirikan, namun telah berganti nama dengan Rumah Sakit Pelamonia dan nama jalan Hospital ikut diganti dengan nama Jalan Jenderal Sudirman.

Berlanjut ke tempat berikutnya dan masih dekat dengan rumah sakit militer yaitu satu lapangan luas dinamai Koningsplein. Koningsplein ini merupakan salah satu ciri khas kota kolonial, dibangun pada abad ke-19, dan juga terdapat di beberapa kota kolonial di Indonesia antara lain Semarang dan Batavia. Menurut Yulianto Sumalyo, Koningsplein di Makassar fungsinya berbeda dengan yang terdapat di kota-kota lain,

**Koningsplein kemudian diperkecil dan luasnya seperti yang dilihat Gagaklodra di tahun 1950 dan yang bisa disaksikan saat ini dengan nama lapangan Karebosi.**

yaitu untuk kepentingan latihan tentara. Sebelah selatan dari Koningsplein

difungsikan sebagai lapangan menembak (Sumalyo, 2011: Hal. 310). Pada awal berdirinya, Koningsple

in merupakan kawasan luas yang lokasinya sampai pada tempat di mana saat ini berdiri rumah sakit militer

(Pelamonia). Ketika pemerintah kolonial membangun rumah sakit militer dan kantor pengadilan di

akhir abad ke-19, Koningsplein kemudian diperkecil dan luasnya seperti yang dilihat Gagaklodra di tahun 1950 dan yang bisa disaksikan saat ini dengan nama

lapangan Karebosi. Di setiap sisi dari koningsplein berdiri bangunan-bangunan penting pemerintah kolonial seperti Gedung Pengadilan (selatan), Katedral dan Empress Hotel (timur), rumah residen Makassar, penjara dan kuburan Tionghoa (Timur ke utara), dan benteng Vredenburg (Barat). Seperti yang dijelaskan Gagaklodra bahwa Kongsplein di tahun 1950 difungsikan sebagai alun-alun kota dan menjadi ruang

terbuka bagi masyarakat kota Makassar. Saat ini peran lapangan Karebosi tidak lagi menjadi ruang terbuka dan

**Saat ini peran lapangan Karebosi tidak lagi menjadi ruang terbuka dan dibatasi dengan berdirinya pagar-pagar besi di sekeliling lapangan tersebut hasil dari proyek bernama "Revitalisasi Karebosi".**

dibatasi dengan berdirinya pagar-pagar besi di sekeliling lapangan tersebut hasil dari proyek bernama "Revitalisasi Karebosi". Lapangan Karebosi ini semakin kecil,

ketika di bagian selatan dibangun pusat perbelanjaan *Karebosi Link*, lengkap dengan ruang bawah tanahnya.

Ujung perjalanan Gagaklodra setelah keluar dari *Staadshospital* disebutkan seperti ini,

Demikian diatas Roda Tiga Gagaklodra mengenangkan kembali peristiwawaja jang telah lampau. Ia meminta supaya Roda Tiga mengambil djalan kedjurusan Sity Theater di Patunuan dan Djalan Lajang (Njoo Cheong Seng (b), 1950: Hal. 73). Roda Tiga sesudah membelok kedjalan Matjiniajo lalu membelok ke Djalan Diponegoro. Didepan sebuah rumah sederhana jg dikurung oleh pagar bambu, Gagaklodra berhenti. Sesudah memberikan uang kepada pengandar Roda Tiga itu dengan sedjumlah tjukup banjak untuk mendapat senjuman dan terima kasih, Gagaklodra masuk kerumah Djurufilsafat Ho Eng-djie itu (Njoo Cheong Seng (b),

1950: Hal. 74). Sity Theater atau lebih jelasnya City Theater terdaftar di buku telepon tahun 1951 beralamat di Jalan Patunuang atau yang saat ini dikenal dengan Jalan G. Bulusaraung (Anonim, 1951: Hal. 2). City Theater sendiri saat ini telah berubah menjadi kawasan pertokoan. Jalan Layang saat ini dikenal dengan nama Jalan Andalas. Lalu Gagaklodra membelok ke Jalan Matjiniajo yang saat ini merupakan Jalan Diponegoro. Rumah yang dituju Gagaklodra dalam perjalanan tersebut adalah rumah Ho Eng-jie yang dahulunya di Jalan Diponegoro yang lokasinya menjadi Jalan Muhammadiyah saat ini, di tahun tersebut membentang dari selatan ke utara (sebelah barat makam Diponegoro).

**Sity Theater atau lebih jelasnya City Theater terdaftar di buku telepon tahun 1951 beralamat di Jalan Patunuang atau yang saat ini dikenal dengan Jalan G. Bulusaraung (Anonim, 1951: Hal. 2).**

Nama jalan ini diambil dari nama Pangeran Diponegoro (Dipanegara) yang memimpin perlawanan melawan pasukan Belanda dalam Perang Jawa (1825-1830). Diponegoro kemudian ditangkap dan dibuang ke

Manado lalu ke Makassar di mana Diponegoro di tahan di salah satu gedung di dalam benteng Rotterdam, sampai dengan meninggaln ya pada

pagi tanggal 8 Januari 1855 (Carey, 1986: Hal. 147). Diponegoro dimakamkan di Jalan Diponegoro Makassar, dan sepanjang jalan di mana makam tersebut terletak diberi nama Jalan Diponegoro.

Di Jalan Diponegoro, Gagaklodra bertemu dengan sahabatnya Ho Eng-djie. Sudah sejak awal seri di Makassar, nama Hoo Eng-djie beberapa kali disebut. Tampaknya Hoo Eng-djie

menjadi spesial bagi Njoo Cheong Seng dengan kehadirannya dalam serial Gagaklodra. Hoo Eng-djie sendiri dikenal sebagai seorang pembuat syair dalam bahasa Makassar dan juga seorang penyanyi (Hamonis dan Salmon, 2010: Hal. 486-488). Perkenalan Njoo Cheong Seng mungkin dilakukan pada saat kedatangannya yang pertama di Makassar di tahun 1932, sehingga ketika menulis serial tahun 1950, nama Eng-djie sudah dimasukkan dalam serial yang ditulisnya. Keduanya tampaknya memiliki gagasan yang sama untuk menciptakan masyarakat yang tidak dibeda-bedakan berdasar SARA dengan menggunakan media penyebaran musik, karya sastra dan sandiwara.

Ruang kota Makassar yang disebutkan dalam serial Gagaklodra semuanya menunjukkan bangunan-bangunan warisan kolonial. Artinya bahwa ruang kota Makassar di tahun 1950 merupakan



Menara Pendaratan Kapal di depan Benteng Rotterdam Tahun 1946 (KITLV)

kota kolonial yang dikembangkan dengan perubahan nama di beberapa tempat dan nama jalan yang

**Sejak periode kolonial sampai dengan saat ini, Fort Rotterdam merupakan bangunan penting, pertama di masa kolonial merupakan pusat kekuasaan administrasi kolonial,**

mengikuti keinginan penguasa. Tetapi imajinasi penataan kota ala arsitektur kolonial masih terlihat jelas di kota Makassar tahun 1950 dalam imajinasi Gagaklodra. Yang menarik adalah bahwa Gagaklodra

tidak pernah menyebut Fort Rotterdam sepanjang dua serial Gagaklodra berlatar kota Makassar. Sejak periode kolonial sampai dengan saat ini, Fort Rotterdam merupakan bangunan penting, pertama di masa kolonial merupakan pusat kekuasaan administrasi kolonial, kedua di periode Indonesia merdeka menjadi salah satu simbol asal-usul pengembangan kota Makassar.

Selain tidak menyebutkan Fort Rotterdam, Njoo Cheong Seng juga tidak pernah menyebutkan kawasan perkampungan orang

Tionghoa di Makassar, yang terletak dekat dengan Fort Rotterdam dan juga merupakan kawasan yang dibentuk pada periode kolonial. Padahal, sepanjang pengembaraannya di kota Makassar, Gagaklodra jelas melewati kawasan tersebut, baik ketika berjalan-jalan di Strand Boulevard, maupun ketika melewati Hoogepad dan berkunjung ke rumah Hoo Eng-dji yang terletak dekat

dengan kawasan pecinan (perkampungan Cina).

Sebagai pembanding, bahwa ketika

Gagaklodra mengembara ke India, Gagaklodra jelas menyebutkan kawasan perkampungan Cina yang ada di daerah tersebut. Satu-satunya alasan yang dapat diterima bahwa keinginan Gagaklodra untuk menghilangkan jejak kolonial berikut dengan contoh-contoh kawasan berbasis

pengelompokkan berdasar etnis yang menjadi contoh penerapan kebijakan tersebut. Hal serupa juga tampaknya menjadi alasan bagi Gagaklodra untuk tidak menyebutkan kampung lainnya yang memiliki fungsi seperti kampung Cina, yaitu kampung Melayu, kampung Ambon, kampung Wajo, kampung Melayu dan kampung Ende. Hal ini berbeda

dengan bangunan-bangunan warisan kolonial yang disebutkan dalam serial ini, selain karena bangunan

tersebut menjadi pemandangan kota yang mau tidak mau mesti dihadirkan, dan juga pengaruh kolonial yang relatif sedikit dibandingkan Fort Rotterdam dan kampung-kampung berbasis etnis yang kaku. Bentuk perlawanan dalam ruang kota ini akan dilihat lebih

jauh dalam pembahasan mengenai imajinasi Gagaklodra dari bawah yaitu kondisi masyarakat yang mendiami kota Makassar.

## **Penduduk Kota dan Imajinasi Masyarakat Plural**

Tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat di kota Makassar tahun 1950 merupakan masyarakat yang baru terlepas dari periode panjang kekuasaan kolonial yang menjadi basis pengembangan kota ini. Di tahun 1950 merupakan periode yang menjadi lanjutan dari periode kolonial, disertai pendudukan Jepang dan periode revolusi yang pendek (Pradadimara, 2014: Hal. 13-14). Dias Pradadimara mengatakan bahwa meskipun telah jauh berlalu dari periode kolonial, tetapi kota Makassar masih tetap dilihat sebagai sarang kolaborator bagi pemerintah kolonial. Ilham Daeng Makkelo menggambarkan kondisi kota ini di tahun 1950an dengan adanya upaya masyarakat melawan

kolonialisme tetapi di satu sisi tetap menerapkan kebiasaan barat dalam kehidupan sehari-hari (Makkelo, 2018).

Ketika Gagaklodra hadir di kota Makassar itu adalah empat tahun sejak seorang tentara bernama Westerling membunuh penduduk-penduduk di kota dan kampung-kampung Sulawesi Selatan yang dianggap kolaborator penentang Belanda dan sekutunya. Tahun tersebut juga adalah setahun sejak berakhirnya Negara federal Indonesia Timur yang beberapa kali disinggung Gagaklodra dalam serialnya, yang menyebut Makassar sebagai ibukota NIT. Di tahun ketika Gagaklodra mondar-mandir di Makassar, seorang tentara KNIL bernama Andi Aziz bersama pasukannya

**Ketika Gagaklodra hadir di kota Makassar itu adalah empat tahun sejak seorang tentara bernama Westerling membunuh penduduk-penduduk di kota dan kampung-kampung Sulawesi Selatan yang dianggap kolaborator penentang Belanda dan sekutunya.**

menyerbu barak yang ditinggali pasukan TNI, sebagai bentuk protes terhadap politik reorganisasi tentara yang dilakukan pusat. Peristiwa yang terjadi tanggal 5 April itu, dikenal dengan nama peristiwa Andi Aziz,

yang menginginkan seluruh angkatan perang yang dibentuk pemerintah diisi oleh bekas tentara KNIL. Di bulan September setelah peristiwa Andi Aziz, tentara lainnya bernama Kahar Muzakkar melarikan diri ke hutan sebagai juga bentuk protes terhadap kebijakan rasionalisasi tentara. Perlawanannya yang panjang, mengakibatkan sejumlah besar penduduk mengungsi terutamanya ke kota Makassar. Kehadiran pengungsi-

pengungsi ini setidaknya menambah semakin banyaknya etnis yang bermukim di kota Makassar, tetapi kondisi ini sepertinya menjadi ancaman penduduk kota yang merasa bahwa etnis Makassar (yang sama dengan nama kota Makassar) yang selama ini merasa diri sebagai penduduk asli. Inilah warisan kolonial sebagai akibat dari politik pengelompokan berdasar SARA.

Perlu diketahui bahwa kedatangan Gagaklodra ke Makassar

**Di bulan September setelah peristiwa Andi Aziz, tentara lainnya bernama Kahar Muzakkar melarikan diri ke hutan sebagai juga bentuk protes terhadap kebijakan rasionalisasi tentara.**

di tahun 1950, membawa sebuah konsep masyarakat plural, suatu konsepsi masyarakat yang dirumuskannya dalam perjalanan panjang

mengembara di Hindia sejak periode kolonial, untuk mengamati sekaligus menyelesaikan permasalahan yang terjadi di daerah tempatnya mengembara. Konsepsi masyarakat plural ini ditunjukkan Gagaklodra sejak kemunculannya pertama kali, Gagaklodra telah mengasuh murid-murid yang seringkali diistilahkan sebagai gerombolan Gagaklodra, yang berasal dari berbagai tempat di nusantara. Mereka adalah Otong dari Kwitang, Bi-hong dari Siauwlinsi, Boru dari Bugis, Si Borang-borang dari Tapanuli, Datuk Inu dari Bukit Barisan, Gipo dari Madura, Ubanggi dari Maluku, Burindra dan Mira dari Bali. Sebenarnya pengalaman seperti Gagaklodra dan muridnya sudah dialami juga oleh kota Makassar sejak periode perdagangan, di mana berbagai masyarakat dari bermacam-macam tempat dan etnis hadir di kota Makassar dan hidup berdampingan dalam suasana kota yang

kosmopolitan.

Kondisi kota yang Kosmopolitan ini kemudian berubah karena politik kolonial yang mengelompokkan masyarakat lengkap dengan pemukiman berdasar asal etnis dan juga kelas sosial berikut agamanya. Kondisi seperti ini, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya masih bertahan sampai dengan tahun 1950an, dalam suasana yang bukan lagi di bawah kekuasaan kolonial, tetapi di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia, lengkap

**Kondisi kota yang Kosmopolitan ini kemudian berubah karena politik kolonial yang mengelompokkan masyarakat lengkap dengan pemukiman berdasar asal etnis dan juga kelas sosial berikut agamanya.**

dengan para pemain baru bernama orang Makassar atau pribumi. Hal seperti



Katedral di Makassar

ini yang dibaca Gagaklodra untuk kemudian perlu memasukkan orang-orang bernama Daeng Baso, Soen-king dan Hama Roloj serta Setan Tiga dari Galesong, sebagai kelompok kriminal yang menguasai kota Makassar, dan yang menentang kedatangan Gagaklodra dengan menyebutnya sebagai kriminal yang datang mengacau ke kota Makassar daerah kekuasaannya.

Tokoh utama Gagaklodra digambarkan dalam dua bentuk yaitu Gagaklodra sebagai

seorang kriminal dan nama lain Tan It-ban nama yang menunjukkan bahwa dia berasal dari kelompok masyarakat Tionghoa. Dalam serial ini, Njoo Cheong Seng sang

## **Chandra Gupta memiliki keahlian sebagai peramal dan juga banyak membantu Gagaklodra dan rombongannya dalam kesulitannya di Makassar.**

penulis menyertakan beberapa nama lain yang berasal dari etnis Tionghoa yaitu Daisy dan Bon-seng, dua bersaudara yang berasal dari Jakarta. Daisy sendiri diceritakan kemudian menjalin asmara dengan Gagaklodra, sementara Bon-seng menaruh dendam atas kematian ayahnya dan sempat berhadap-hadapan dengan Gagaklodra dalam sebuah adu tembak di pulau Lai-lai. Selain menghadirkan tokoh-tokoh dari etnis Tionghoa, hadir juga seorang Hindu bernama Chandra Gupta. Chandra Gupta memiliki keahlian

sebagai peramal dan juga banyak membantu Gagaklodra dan rombongannya dalam kesulitannya di Makassar. Semaraknya keragaman dalam serial ini diwakili juga dengan kehadiran dua orang perawat di Staadshospital yaitu Elvira Lengkong dan Wajan Njantung. Elvira Lengkong adalah seorang gadis asal Minahasa yang sempat mengagumi Gagaklodra, sementara Wajan Njantung berasal dari Bali. Di Makassar, Gagaklodra bersahabat dengan Ishaka Daeng Talli dan Hoo Eng-dji. Hoo Eng-dji diperkenalkan dalam serial ini sebagai ahli filsafat dan pembuat syair.

Para tokoh yang berasal dari berbagai etnis dan agama ini hadir bersama-sama di dalam kota Makassar. Meskipun berasal dari berbagai daerah dan

agama serta kelas sosial yang berbeda-beda, tetapi pembaca membayangkan mereka hidup dalam satu masyarakat di tempat bernama kota Makassar. Benedict Anderson mengatakan bahwa karya sastra baik berupa novel dan serial menghadirkan tokoh-tokoh yang berbeda-beda, tetapi pembacanya membayangkan mereka berada dalam satu imajinasi yang sama (Anderson, 2008: Hal. 36). Konsep seperti ini menjadi alat penyebaran gagasan seseorang

## **Serial Gagaklodra di Makassar diakhiri dengan pertemuan Hama Rloi, Soen-king dan Daeng Baso dengan kawanannya Gagaklodra tidak untuk saling bertempur, tetapi saling beramah-tamah dan bersalam-salaman. Beramah-tamah dan bersalam-salaman**

seperti Njoo Cheong Seng atau Gagaklodra, untuk mengajak pembaca nya membayangkan satu masyarakat plural dalam

kota Makassar bekas kota kolonial dan cara hidup bersesama yang ideal di

tahun 1950. Berkat adanya teknologi percetakan (kapitalisme cetak) gagasan yang dibawa oleh Njoo Cheong Seng dan Gagaklodra, bisa disebarkan kepada para pembeli serial *Gagaklodra* ini, yang dibanderol dengan harga f 15 untuk berlangganan selama tiga bulan. Serial *Gagaklodra* di Makassar diakhiri dengan pertemuan Hama Rolo, Soen-king dan Daeng Baso dengan kawanannya Gagaklodra tidak untuk saling bertempur, tetapi saling beramah-tamah dan bersalam-salaman. Beramah-tamah dan bersalam-salaman menunjukkan adanya pengakuan akan sesama yang lain.

## **Kesimpulan**

Dua belas tahun setelah kunjungan Gagaklodra ke kota Makassar, Njoo Cheong Seng penulis serial tersebut meninggal di Surabaya. Tiga tahun setelah meninggalnya Njoo Cheong Seng atau lima belas tahun setelah kunjungan Gagaklodra ke kota Makassar, Walikota Makassar bernama Daeng

Patompo merancang sebuah proyek besar-besaran bernama proyek "Ujung Pandang Baru". Proyek ini berisi penataan kota Makassar yang diimajinasikan Patompo setelah melakukan kunjungan ke London. Proyek serupa *happyland* di periode kolonial dimaksud

kan untuk merubah pemukiman-pemukiman kumuh di kota Makassar, dengan membentuk kota yang bisa dihuni termasuk oleh masyarakat yang hidup di kampung-kampung kumuh di kota Makassar (Makkelo, 2018: Hal. 54-55).

Pembangunan besar-besaran tersebut ditujukan terutamanya membentuk kota impian yang modern dan teratur yang tidak berbeda jauh dengan impian yang dicanangkan oleh pemerintah kolonial

terhadap daerah jajahannya di Hindia, salah satunya di kota Makassar. Proyek seperti ini, hanya memperindah

**Pada tahun 1971, atau sembilan tahun setelah meninggalnya Njoo Cheong Seng dan dua puluh satu tahun sejak Gagaklodra menginjakkan kaki di kota Makassar, nama kota Makassar diubah menjadi Ujung Pandang.**

kota tetapi tidak membentuk suatu masyarakat yang tidak berbeda-beda berbasis SARA, tetapi malah semakin membedakan masyarakat dalam jurang kelas sosial yang besar.

Pada tahun 1971, atau sembilan tahun setelah meninggalnya Njoo Cheong Seng dan dua puluh satu tahun sejak Gagaklodra menginjakkan kaki di kota Makassar, nama kota Makassar diubah menjadi Ujung Pandang. Perubahan nama ini ditujukan terutamanya untuk menghapus stigma nama yang hanya mewakili satu etnis yaitu etnis Makassar. Perubahan ini tampaknya ditujukan untuk mewadahi suatu kota

yang dapat menerima keberagaman berbagai etnis atau membentuk kota yang kosmopolitan atau masyarakat majemuk seperti yang pernah diimajinasikan Gagaklodra di tahun 1950. Tetapi tampaknya cita-cita mengenai masyarakat plural seperti dalam perubahan nama tersebut tidak pernah benar-benar dapat diwujudkan.

Terbukti, empat puluh enam tahun setelah kunjungan Gagaklodra di kota Makassar dalam rangka membagi pengalamannya mengenai masyarakat plural yang tidak dibedakan berdasar SARA, meletus kerusuhan bernuansa SARA di kota Makassar. Kerusuhan meletus setelah seorang tionghoa bernama Benny

Karre membunuh seorang anak perempuan berusia sembilan tahun bernama Ani Mujahidah Rasunah. Kerusuhan berbau kriminal murni tersebut kemudian berubah menjadi kerusuhan SARA. Massa yang entah darimana datangnya kemudian membakar rumah-rumah milik orang Tionghoa di berbagai

tempat di kota Makassar. Kawasan Pecinan di mana banyak orang Tionghoa tinggal, tidak luput dari serangan massa. Orang-orang yang menghindari amukan massa perlu menulis di depan rumah atau toko miliknya dengan tulisan "milik pribumi asli" atau "milik pribumi Maros". Tampaknya kata-kata sakti seperti "pribumi" yang sudah dihilangkan oleh Gagaklodra dan teman-

temannya dalam serial *Gagaklodra* di kota Makassar tidak pernah benar-benar hilang. Kematian Njoo Cheong Seng, membuatnya tidak bisa lagi mengingatkan para penduduk kota Makassar atau kota Ujung Pandang untuk tidak saling membeda-bedakan berdasar SARA. Dua tahun setelah meletusnya kerusuhan berbau SARA tersebut, nama Ujung Pandang dirubah lagi menjadi Makassar. Sementara waktu itu, serial *Gagaklodra* tidak lagi diingat oleh penduduk kota yang baru berubah nama tersebut. 

- Anderson, Benedict. *Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Terbayang*. Yogyakarta: Insist Press kerja sama dengan Pustaka Pelajar, 2008.
- . "Bahasa Tanpa Nama." *Sadur: Sejarah Terjemahan di Indonesia dan Malaysia*. Editor. Henri Chambert-Loir. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2009. Hal. 379-393.
- . "Tjino di Indonesia." *Gagaklodra Makassar: Detektif Nasionalisme Njoo Cheong Seng*. Heri Kusuma Tarupay. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press kerja sama dengan Lembaga Studi Realino, 2018. Hal. 134-143.
- Asmunandar. 2008. Membangun Identitas Masyarakat Melalui Kota Kuna Makassar. *Tesis*. Program Studi Arkeologi Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Benson, Theodora. "Berkeliling Sulawesi bersama Orang Belanda." *Indonesia Timur Tempo Doeloe 1544-1992*. George Miller. Depok: Komunitas Bambu, 2012. Hal. 227-244.
- Bodden, Michael H. "Membuat Drama Asing Berbicara Kepada Penonton Indonesia: Universalisme dan Identitas Pasca-Kolonial dalam Teater-Seni Indonesia Modern." *Sadur: Sejarah Terjemahan di Indonesia dan Malaysia*. Editor. Henri Chambert-Loir. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2009. Hal. 911-929.
- Carey, Peter. *Asal Usul Perang Jawa: Pemberontakan Sepoy & Lukisan Raden Saleh*. Jakarta: Pustaka Azet, 1986.
- Clune, Frank. "Berkelana di Makassar." *Indonesia Timur Tempo Doeloe 1544-1992*. George Miller. Depok: Komunitas Bambu, 2012. Hal. 245-260.
- Djunedding, Burhaman. "Pesta Demokrasi di Daerah Bergolak: Politik Tingkat Lokal dan Pemilihan Umum 1955 di Sulawesi Selatan." *Negara dan Masyarakat Sulawesi Selatan di Tahun 1950an*. Editor. Dias Pradadimara, Heri Kusuma Tarupay dan M. Bahar Akkase Teng. Yogyakarta: Kanisius, 2014. Hal. 133-173.
- Hamonic, Gilbert dan Claudine Salmon. "Dunia Sastra dan Seni Masyarakat Tionghoa Makassar." *Sastra Indonesia Awal: Kontribusi Orang Tionghoa*. Claudine Salmon. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010.
- Kementerian Penerangan. *Republik Indonesia: Propinsi Sulawesi*. Jakarta: Kementerian Penerangan, 1953.
- Makkelo, Ilham Daeng. "Menjadi Kota Modern: Transformasi Kota Makassar Pada Abad ke-20." *Jurnal Sejarah* 1: 2 (2018): Hal. 40-62.
- Mrazek, Rudolf. *Engineers of Happyland: Perkembangan Teknologi dan Nasionalisme di Sebuah Koloni*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Njoo Cheong Seng, *Gagaklodra dijual Makassar (Setan Tiga dari Galessong)*. Jakarta: Tjilik Romans, 1950.
- . *Gagaklodra Mentjari Allah*. Jakarta: Tjilik Romans, 1950.
- . *22 Tahun dengan Gagaklodra*. Malang: Prana Agency Service, 1953.
- Onghokham. "Hindia yang Dibekukan: "Mooi Indie" dalam Seni Rupa dan Ilmu Sosial." *Jurnal Kalam* 3 (1994): Hal. 37-43.
- Penunjuk Telepon Makassar: Penerbitan Januari 1951*. Makassar: Druk Volksbelang, 1951.
- Pradadimara, Dias. "Dari Makassar ke Makassar: Aspek Demografi dan Politik Proses "Etnisasi" Sebuah Kota." *Populasi* 14: 1 (2003): Hal.79-96.
- . "Kronika Sulawesi Selatan di Tahun 1950-an." *Negara dan Masyarakat Sulawesi Selatan di Tahun 1950an*. Editor. Dias Pradadimara, Heri Kusuma Tarupay dan M. Bahar Akkase Teng. Yogyakarta: Kanisius, 2014. Hal. 11-27.
- Ricklefs, M. C. *Sejarah Indonesia Modern: 1200-2008*. Jakarta: Serambi, 2008.
- Sumalyo, Yulianto. "Ujungpandang Perkembangan Kota dan Arsitektur Pada Akhir Abad 17 Hingga Awal Abad 20." *Panggung Sejarah: Persembahan kepada Prof. Dr. Denys Lombard*. Editor. Henri Chambert-Loir dan Hasan Muarif Ambary. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011. Hal. 301-319.
- Sutherland, Heather. "Kontinuitas dan Perubahan dalam Sejarah Makassar: Perdagangan dan Kota di Abad ke-18." *Kontinuitas dan Perubahan dalam Sejarah Sulawesi Selatan*. Editor. Dias Pradadimara dan Muslimin A.R. Effendy. Yogyakarta: Ombak, 2004. Hal. 3-40.
- Tarupay, Heri Kusuma. *Gagaklodra Makassar: Detektif Nasionalisme Njoo Cheong Seng*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press kerja sama dengan Lembaga Studi Realino, 2018.
- . "Waktu Imajinatif Njoo Cheong Seng dalam Detektif Gagaklodra." *Kosmopolitanisme Si/Apa: Benedict Anderson, Indonesia & Revolusi Pemuda*. Editor. A. Windarto, A. Harimurti, Hugo S. Prabangkara dan Putri Ayu R. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press kerjasama dengan Lembaga Studi Realino, 2018. Hal. 120-134.
- Telefoongids Makasser: Uitgave Mei 1939-Bijgewerkt tot 20 April '39*. Makassar: Druk Volksbelang Makassar, 1939.

# MERIAM- MERIAM KOTA DENPASAR: TINJAUAN PENGANTAR



I Kadek Agus Juniantara

Mahasiswa  
Program Studi Arkeologi  
Universitas Udayana

agus.juniantara@gmail.com

*Meriam menjadi salah satu bukti fisik tinggalan budaya. Umumnya, meriam-meriam tersebut memiliki ukuran besar dan polos. Namun tak jarang juga ditemukan meriam-meriam yang memiliki keunikan tersendiri. Studi tentang temuan meriam kuno di Indonesia dapat dikatakan belum banyak mendapat perhatian khusus. Meskipun demikian, inventarisasi tentang adanya temuan meriam sering dijumpai, baik temuan di permukaan tanah maupun yang terkubur dan tak sengaja ditemukan warga. Temuan meriam hampir ditemukan di seluruh kota di Indonesia bahkan pulau-pulau kecil yang pada masanya menjadi medan dan jalur perang tidak terkecuali Denpasar. Meriam di Denpasar tersebar di beberapa lokasi dan mudah untuk dijumpai. Potensi meriam di Denpasar sebagai benda cagar budaya dapat menjadi bukti relevan tentang kilas balik sejarah Denpasar.*

**Kata Kunci:** Meriam, Denpasar, Tinggalan Budaya.

## PENDAHULUAN

Sekilas Tentang Peranan Meriam Sebagai Tinggalan Arkeologi Meriam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (<https://kbbi.web.id/meriam>)

Temuan meriam di Indonesia sering terkait konteksnya dengan benteng maupun gedung atau istana yang sempat difungsikan sebagai pertahanan. Umumnya, meriam-meriam tersebut

memiliki ukuran besar dan polos. Namun tak jarang juga ditemukan meriam-meriam yang memiliki keunikan khas seperti ornamen, ukuran, dan juga fungsi yang tidak hanya sebagai alat perang namun memiliki nilai sosial khusus bagi beberapa masyarakat. Terdapat beberapa penyebutan meriam di Indonesia seperti *léla* (meriam berukuran kecil yang dapat di putar), *rentaka* (meriam berukuran kecil), meriam (penyebutan umum untuk meriam berukuran besar), *kanon* (penyebutan meriam yang berasal dari kata *cannon*) dan meriam *coak* (meriam yang memiliki tempat mesiu yang terbuka di belakang).

Studi tentang temuan meriam kuno di Indonesia dapat dikatakan belum menjadi perhatian lebih. Hal tersebut dikarenakan banyaknya temuan budaya lainnya di Indonesia. Meskipun begitu, inventarisasi tentang adanya temuan meriam sering di jumpai, baik temuan di permukaan tanah maupun yang terkubur dan tak sengaja

ditemukan warga. Beberapa contoh penelitian tentang temuan meriam adalah Moh. Ali Fadillah (1998: hal. 61-80), dalam Jurnal *Wallenae* terbitan Balai Pelestari Cagar Budaya Makassar. Fadillah dalam tulisannya menerangkan beberapa catatan tentang meriam Nusantara yang mengacu pada temuan dua meriam di desa Galesong Baru, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Lalu ada Wuri Handoko (2016: hal. 69-87), menulis tentang Meriam Nusantara dari Negeri Elpa Putih yang diterbitkan di Jurnal *Kapata Arkeologi*. Namun perlu di garis bawahi, merujuk pada hal yang menjadi latar belakang dan kendala Fadillah menulis adalah ketiadaan spesialis tentang meriam menyulitkan peneliti melakukan analisa lebih mendalam meskipun telah

banyak temuan meriam yang diinventarisasi (Fadillah, 1998: Hal.61). Hal inilah yang semestinya menjadi peluang dalam penelitian lanjutan tentang studi khusus altileri pada masa lampau.

Temuan meriam hampir ditemukan di seluruh kota di Indonesia bahkan pulau-pulau kecil yang pada masanya menjadi medan pertahanan dan jalur perang. Tidak terkecuali Denpasar sebagai kota yang memiliki peran dan nilai penting bagi Provinsi Bali pada masa kolonial. Denpasar tidak hanya pernah kontak perang

**Temuan meriam hampir ditemukan di seluruh kota di Indonesia bahkan pulau-pulau kecil yang pada masanya menjadi medan pertahanan dan jalur perang.**

langsung dengan Belanda, namun jauh kebelakang, Arya-arya dari Majapahit juga singgah dan menjadikan

Denpasar sebagai salah satu tumpuan guna menaklukan Kerajaan Bali. Sehingga posisi Denpasar sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting pada masa lalu

dan memiliki sumbangan besar dalam penulisan sejarah nasional.

Denpasar memang dapat dikatakan kota strategis karena memiliki akses ke pelabuhan seperti Sanur, Benoa, dan Kuta. Inilah yang

menjadikan

kota

Denpasar yang pada awalnya

merupakan sebuah

taman/wilayah kerajaan

Badung, menjadi pusat pemerintahan hingga sekarang. Meskipun demikian pada masa lalu Kota Singaraja Buleleng juga masih memainkan peran pentingnya di laut utara Bali.

Beberapa temuan meriam di Denpasar kemungkinan menjadi kunci tentang periodisasi kolonial di kota ini. Temuan tersebut tersebar di beberapa lokasi dan mudah untuk dijumpai, karena beberapa meriam diletakkan di pintu masuk pura dan puri. Terdapat juga beberapa meriam di Museum Bali sebagai salah satu koleksi benda

cagar budaya yang dilindungi.

Seperti telah dikatakan dalam uraian di atas, maka tulisan ini menekankan pada wacana tinjauan awal tentang meriam di Kota Denpasar sebagai sebuah

pengantar.

Merujuk

pada

informasi

dari portal

Kementerian

an

Kebudayaan,

tentang

daftar

cagar budaya di Indonesia, sedikitnya terdapat 511 meriam yang telah terdaftar sebagai benda cagar budaya. Untuk kasus di Bali, hanya terdapat 2 buah meriam yang telah terinventarisasi dan tercatat dengan no.1/14-08/BND/33 serta 1/14-08/BND/34 terekam pada tahun 2018

<https://cagarbudaya.kemdikbud.go.id/public/pencairan>.

## 2. URAIAN Sebaran Meriam di Denpasar

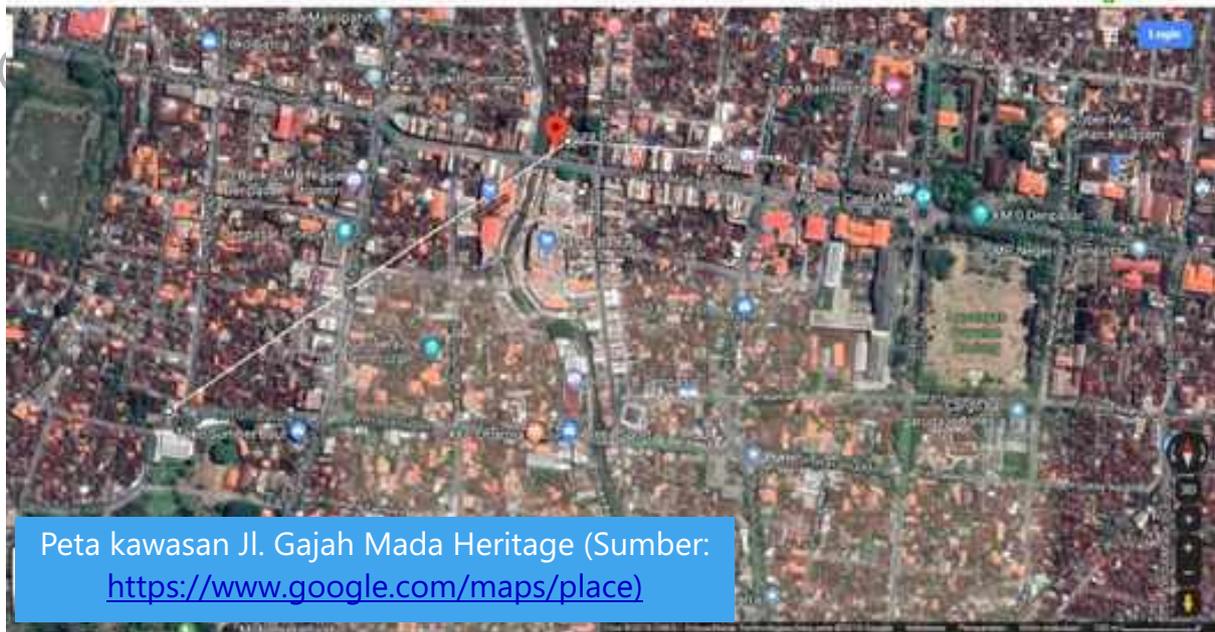
Denpasar merupakan ibu kota dari Provinsi Bali dan sekaligus kota besar

dan sibuk di Provinsi Bali. Posisi Denpasar terletak di sebelah selatan Pulau Bali. Kota ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Samudra Hindia. Nama Denpasar berasal dari kata den dan pasar. Den berarti utara dan pasar adalah tempat bertransaksi jual beli. Denpasar secara harfiah berarti tempat di utara pasar yang merujuk pada taman kerajaan yang menjadi cikal bakal puri (Puri Denpasar) yang terletak persis di utara sebuah pasar (mengacu pada konsep *catuspata*).

Penyebutan untuk pertama kalinya nama Denpasar sebagai sebuah nama tempat/wilayah dimulai setelah peristiwa Puputan Badung, yang mana pada masa tersebut kawasan di sekitar Puri Denpasar menjadi medan pertempuran. Hingga kemudian berlanjut menjadi tempat pemerintahan sementara oleh Asisten Residen Swartz yang membawahi wilayah *Afdeeling Zuid Bali* (Agung, 1986: Hal. 33). Sehingga, Denpasar sejak dahulu tidak terlepas dari

perkembangan tatanan kota dari periode kerajaan menuju modernisasi dengan peran serta Kolonial Belanda yang mengatur beberapa kebijakan, yang sempat diterapkan pada masa tersebut. Mulai adanya pengaturan gedung-gedung administrasi pemerintah sebagai contohnya dan terdapatnya unsur-unsur kolonial yang hingga kini masih dapat ditelusuri beberapa tinggalannya (Agung, 1986: Hal. 2).

Menurut data dari Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala (PSP) Provinsi Bali Nusra maupun Balai Pelestari Cagar Budaya (BPCB) wilayah kerja Bali-Nusra jumlah benda cagar budaya/situs di Denpasar sekitar 36 hingga 38 situs berupa Pura, prasasti, dan Masjid. Khusus kawasan Jl.



Peta kawasan Jl. Gajah Mada Heritage (Sumber: <https://www.google.com/maps/place>)

Gajah Mada dan sekitarnya terdapat beberapa objek yang telah masuk katagori cagar budaya antara lain: Pura Maospahit Gerenceng, Jl. Gajah Mada Heritage, dan Hotel Inna Bali.

**Penyebutan untuk pertama kalinya nama Denpasar sebagai sebuah nama tempat/wilayah dimulai setelah peristiwa Puputan Badung, yang mana pada masa tersebut kawasan di sekitar Puri Denpasar menjadi medan pertempuran.**

Pada kawasan Jl. Gajah Mada Heritage inilah meriam-meriam kuno tersebar di beberapa lokasi. Meriam tersebut adalah meriam yang berlokasi di Pura Dalem Tambang Badung, di Pura

Desa Pakraman Denpasar, dan sebuah rumah di Jalan Nakula, Denpasar.

Adapun deskripsi singkat tentang meriam-meriam di Denpasar (lihat pada tabel 1) diantaranya sebagai berikut;

a. Terdapatnya meriam berukuran besar dan polos yang mencirikan karakter meriam Eropa saat perang seperti yang terlihat dari meriam Ia dan IVa;

b. Terdapatnya meriam dengan ornamen dan motif bunga, motif ikan yang memiliki cap lambang negara seperti terlihat pada meriam III d dan IV d;

c. Terdapat meriam dengan angka tahun yang cukup jelas yakni 1737 seperti terlihat pada meriam Id dan IId;

d. Meriam dengan karakter meriam coak yakni meriam yang memiliki lubang menjorok

pada bagian belakangnya terlihat pada meriam Va;

e. Meriam dengan ukiran naga berkarakter Bali yang ditunjukkan dengan adanya aksara Bali yang terpahat kasar seperti terlihat pada meriam IIIa dan IVa;

f. Meriam polos dengan ukuran kecil seperti terlihat pada meriam Ib, IIb, Ic, dan IIc;

g. Sebuah meriam kecil dengan tulisan LITTLE TOT seperti terlihat pada meriam IIa.

Adapun deskripsi singkat tentang lokasi tempat meriam berada yaitu sebagai berikut:

a. Museum Bali merupakan museum negara yang menyimpan koleksi benda cagar budaya yang terkumpul secara kolektif dari seluruh daerah di Bali. Museum Bali berlokasi di Jalan Mayor Wisnu Nomor 1, Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur (80232). Museum ini berdiri sejak 1932;

b. Pura Dalem Tambang Badung berlokasi di Jalan Gunung Merapi, Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar (80111).

Pura ini adalah pura yang memiliki keterkaitan dengan pura kerajaan Puri Pemecutan. Posisinya berada di samping Pasar Pasah.;

c. Pura Desa Pakraman Denpasar adalah pura tingkat desa sebagai salah satu bentuk persembahyangan dalam konsep trimurti. Pura ini beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 22 Denpasar. Pura ini berada di sisi Sungai (tukad) Badung dan bersebrangan dengan Pasar Badung.

d. Sebuah rumah di Jalan Arjuna, Denpasar adalah kediaman pribadi milik salah seorang warga di daerah Denpasar.

Hal yang menarik dari survei lapangan yang dilakukan penulis adalah adanya beberapa meriam yang kemungkinan telah dipindahkan dari tempat semula. Terkait dengan hal ini, ada keterbatasan yang semestinya menjadi peluang untuk penelitian selanjutnya yakni survei seluruh puri yang ada di Denpasar dengan menarik

genealogi sejarah. Selain lokasi tentang puri juga terdapat pura-pura yang kemungkinan masih memiliki keterkaitan dengan puri atau yang masih masuk dalam katagori pura dari keluarga puri.

Terdapat pula temuan sepasang meriam yang diletakkan berdampingan dengan tugu perjuangan yang ternyata adalah replika meriam berbahan

**Selain lokasi tentang puri juga terdapat pura-pura yang kemungkinan masih memiliki keterkaitan dengan puri atau yang masih masuk dalam katagori pura dari keluarga puri.**

dasar semen. Lokasi replika meriam tersebut yaitu berada di depan Puri Kesiman yang ada di Jalan WR. Supratman, Denpasar. Kemungkinan dahulunya terdapat meriam asli yang menjadi alasan mengapa meriam tersebut dibuatkan replikanya, ataupun ada makna tersendiri sehingga replika tersebut diletakkan

berdekatan dengan tugu perjuangan.

## **Tinjauan Potensi dari Meriam-meriam di Denpasar**

Temuan meriam yang terdapat di depan pura dan puri menjadi tanda bahwa pada zaman dahulu berkaitan dengan masalah pertahanan di Denpasar yang telah mendapat perhatian. Meskipun demikian, jika diteliti lebih lanjut, sebaran meriam ternyata memiliki tipe yang berbeda-beda, namun hampir seluruhnya ditemukan berpasangan. Beberapa hal menarik lainnya yang perlu ditelaah kembali secara mendalam adalah adanya temuan meriam yang memiliki ragam ornamen yang raya dan memiliki cap VOC dan lambang dari Kerajaan Negara Belanda seperti yang terdapat pada temuan meriam di Jalan Arjuna, Denpasar (lihat tabel 1 bagian meriam Id-IVd).

Koleksi meriam lainnya seperti di Museum Bali juga menarik perhatian. Sebagai contoh adalah adanya meriam coak

hingga meriam berukir kepala naga dengan sedikit pahatan kasar beraksara Bali yang menjelaskan nama dari

penting kebudayaan (Polapa, 2015: Hal. 29). Nilai-nilai inilah yang secara mendasar menjadi konsep penentu arah



meriam tersebut (lihat tabel 1 bagian meriam IIIa-IVa). Sehingga berdasarkan hal tersebut, yang sangat potensial untuk lebih ditinjau adalah sejarah dan sebab-sebab mengapa meriam tersebut kini berada di beberapa lokasi di wilayah Denpasar.

Potensi dari meriam-meriam di Denpasar perlu dilihat dari segi nilai penting yang terkandung dari temuan tersebut, antara lain nilai penting sejarah, nilai penting pendidikan, dan nilai

potensi dari temuan arkeologi. Secara singkat terkait nilai penting meriam di Denpasar dapat dijelaskan sebagai berikut;

A. Nilai Penting Sejarah Meriam-meriam yang ada merupakan bukti dan berhubungan erat dengan sejarah Denpasar sebagai sebuah kota. Hal ini juga menjadi sebuah bukti bahwa tempat-tempat tersebut sebagai pusat perlawanan pada masa awal pendudukan Belanda di Bali.

B. Nilai Penting Ilmu Pengetahuan Meriam-meriam di Denpasar memiliki peluang untuk diteliti lebih lanjut dalam rangka menjabarkan dan membuktikan terkait sejarah Denpasar pada masa awal kedatangan kolonial Belanda. Bidang keilmuan yang dapat berperan antara lain seperti ilmu arkeologi terkait karakter dan status cagar budayanya; Arsitektur dan Teknik Sipil sebagai kajian tentang teknologi dan karakteristik tata ruang kota yang bersinggungan langsung tentang mekanisme pertahanan pada masa kolonial; dan khususnya pengetahuan tentang altileri di Indonesai dan Denpasar khususnya dapat menjadi sebuah objek yang penting bagi dalam memperkaya pengetahuan masyarakat luas, khususnya generasi muda dalam memahami pengetahuan masa lalu tentang sejarah nasional.

C. Nilai Penting Kebudayaan Meriam tersebut nyatanya mewakili hasil pencapaian

budaya, khususnya altileri pada masa lalu dan mengandung hal-hal etnik dan estetis yang terpahat pada beberapa temuan. Hingga kini, meriam-meriam tersebut memiliki makna tertentu bagi beberapa masyarakat terkait peranannya sebagai persenjataan

**Nilai Penting Kebudayaan Meriam tersebut nyatanya mewakili hasil pencapaian budaya, khususnya altileri pada masa lalu dan mengandung hal-hal etnik dan estetis yang terpahat pada beberapa temuan.**

perang dan pertahanan (Tanudirjo, 2004; Polapa, 2015: Hal. 29-30).

Berdasarkan uraian di atas, meriam-meriam di Denpasar memiliki potensi, antara lain sebagai berikut;

a. Potensi Sejarah dan Ilmu Pengetahuan Meriam tersebut memiliki potensi/data fakta tentang sejarah Denpasar yang nantinya dapat menjadi identitas sebuah kota. Temuan-temuan meriam di Denpasar nyatanya

memiliki bentuk yang beragam dan beberapa diantaranya memiliki tanda pengenal atau cap yang dapat digunakan untuk menelusuri asal-usul sejarahnya. Seperti contoh meriam yang terletak di Jalan Arjuna, Denpasar (lihat tabel 1 bagian meriam Id-IVd). Meriam tersebut memiliki tanda pengenal berupa cap logo VOC serta angka tahun yang merujuk pada tahun 1737.

Meriam lainnya yaitu koleksi Mesum Bali yang berjumlah 6 buah dan memiliki bentuk yang berbeda-beda. Beberapa diantaranya terdapat meriam ukuran kecil dan memiliki tanda pengenal bertuliskan "LITTLE TOT" (lihat tabel 1 bagian meriam IIa) serta meriam dengan ornamen naga dengan pahatan kasar bertuliskan aksara Bali (lihat tabel 1 bagian meriam IIIa-IVa). Inilah yang menjadi potensi sejarah dari meriam-meriam di Denpasar yang perlu diteliti secara mendalam.

b. Potensi Pariwisata Potensi terkait meriam di Denpasar sebagai objek

wisata adalah keberlanjutan dan dampak potensi sejarah. Hal ini dikarenakan an terkoneksi nya meriam-meriam ini dengan kawasan Gajah Mada Heritage secara tidak langsung menjadikan lokasi ini dikunjungi sebagai bagian sejarah yang tidak bisa terpisahkan. Potensi ini akan menjadikan kawasan Gajah Mada Heritage semakin terkoneksi dengan simpul-simpul tingkat sejarah di Denpasar.

Hampir seluruh potensi pada penerapannya telah terlaksana hanya saja masih dikaitkan dengan situs tempat meriam tersebut berlokasi. Semisal meriam di Pura Dalem Tambang Badung hanya menjadi penghias areal parkir, padahal pura ini menjadi salah satu bukti tentang perkembangan sejarah Puri Pemecutan dan Kerajaan Badung.

**Terdapat pula meriam yang berlokasi di kediaman pribadi, sehingga potensi yang dimiliki temuan tersebut pupus karena belum secara umum terdata sebagai benda cagar budaya yang dapat diakses oleh publik.**

Terdapat pula meriam yang berlokasi di kediaman pribadi, sehingga potensi yang dimiliki temuan tersebut pupus karena belum secara umum terdata

sebagai benda cagar budaya yang dapat diakses oleh publik.

Hal lainnya adalah kemungkinan

masih terdapat nya temuan-temuan sejenis yang masih tersimpan di beberapa

tempat di kediaman warga yang belum terdata oleh pihak.

**Peran dan Perspektif Meriam di Denpasar Sebagai Inventaris Cagar Budaya**

Sejarah Denpasar yang

ditetapkan oleh Bappeda (2011) sebagai landasan sejarah kota dikelompokkan menjadi tiga periode yaitu pra-kolonial, era modern, dan pasca modern (Yudiantini, 2016: Hal. 183). Hal inilah yang menjadi perspektif tentang meriam-meriam di Denpasar sebagai salah satu inventaris cagar budaya. Adanya nilai penting juga menjadi indikator peranan meriam (Muhajid, 2015: Hal. 12).

Sebaran meriam-meriam yang telah disinggung sebelumnya

terkoneksi dengan kawasan Gajah Mada Heritage. Kawasan Gajah Mada Heritage atau Denpasar Heritage City Tour dalam Surat

**Sejarah Denpasar yang ditetapkan oleh Bappeda (2011) sebagai landasan sejarah kota dikelompokkan menjadi tiga periode yaitu pra-kolonial, era modern, dan pasca modern (Yudiantini, 2016: Hal. 183).**

Keputusan Walikota Nomor 188.45/417/HK/2015 menetapkan: Lapangan I Gusti Made Ngurah Agung (alun-alun Puputan Badung); Patung Catur Muka; Pura Jagatnatha;

Museum Bali; Puri Agung Jrokuta; Pura Maospait; Pasar Badung; Hotel Inna Bali; dan Rute sepanjang Jl. Sugianyar, Jl. Pulau Buton, Jl. Sumatera, Jl. Hasanudin, Jl. Gunung Batur, Jl. Gunung Merapi, Jl. Setia Budi, Jl. Sutomo, Jl. Gajah Mada, Jl. Veteran sebagai kawasan cagar

budaya kota. Meskipun tidak seluruhnya yang termuat dalam kawasan ini sebagai benda cagar budaya, namun ini menjadi simpul utama kebudayaan dan perkembangan kota.

Secara umum meriam-meriam tersebut adalah bukti bahwa dahulu Denpasar telah menjadi medan pertempuran. Hal ini dicirikan dari keberadaan meriam yang ditempatkan di depan pintu beberapa pura dan puri, bahkan berdampingan dengan tugu perjuangan (lihat gambar 1). Memori

kolektif ini menjadi pengetahuan umum bagi masyarakat Denpasar. Hanya saja status keberadaan meriam-meriam tersebut belum memiliki kejelasan hingga

**Hanya saja status keberadaan meriam-meriam tersebut belum memiliki kejelasan hingga akhirnya tidak berperan optimalnya sebagai benda warisan budaya.**

akhirnya tidak berperan optimalnya sebagai benda warisan budaya. Mungkin temuan meriam

ini telah masuk daftar calon benda cagar budaya, hanya saja perlu adanya informasi lebih lanjut terkait hal ini.

Terkait perannya saat ini, meriam memiliki status kebanggaan dikarenakan peran pentingnya dahulu sebagai persenjataan. Maka berangkat dari asumsi ini, penelusuran keberadaan meriam dapat ditelusuri dari tradisi tutur di lingkungan kerajaan/puri. Variable lain adalah keberadaan meriam di depan pura yang dapat diduga bahwa meriam tersebut tidak insitu atau memang

dahulu pura menjadi benteng terakhir pertahanan setelah puri berhasil dikuasai.

Peran lainnya adalah penyamaan status antara meriam dengan dwarapala (arca penjaga) yang berfungsi sebagai penjaga. Hal ini pula yang membuat meriam-meriam tersebut lestari hingga sekarang, karena berkaitan dengan masalah religi. Sebagai contoh temuan meriam di Pura Dalam Tambang Badung (lihat tabel 1 meriam Ib dan IIb) diletakkan di depan pintu masuk pura saat ini berfungsi sebagai penjaga areal pura dan bersifat sakral. Hal ini berkaitan dengan tradisi masyarakat Bali yang menganggap meriam tersebut masih bertuah dan patut untuk dihormati selayaknya temuan benda cagar budaya pada umumnya di Bali.

Tinjauan peranan meriam yang dikaitkan dengan model pengelolaan pariwisata adalah hubungan "link and match" (Putra, 2017: Hal. 46). Peran tersebut yakni keberadaan meriam sebagai cagar budaya

dapat menjadi pendukung keberadaan kawasan Gajah Mada Heritage tersebut. Timbal baliknya yakni kawasan Gajah Mada Heritage memberikan suatu persepsi yang berintegrasi dengan nilai sejarah di sekitar kawasan tersebut. Identifikasi potensi menjadi alasan dasar dalam memilah dan mengelompokkan cagar budaya yang ada hubungannya dengan tujuan dan rencana pengembangan kawasan wisata budaya.

Perspektif yang coba dibangun dalam tulisan ini adalah perspektif meriam sebagai

benda cagar budaya. sehingga dalam status tersebut terdapat fungsi dan peran yang wajib dipenuhi oleh benda tersebut. Nilai tambah yakni terjaga dan terawatnya benda warisan budaya sehingga generasi selanjutnya masih dapat

menemukan sisa-sisa budaya pada masa lalu di kota yang telah menuju era modern.

Dengan kata lain, meriam-meriam di Denpasar dapat menjadi media pembelajaran bagi generasi muda untuk menghargai sejarah masa

lalu, dan mengenai perjuangan para pendahulu dalam membela kedaulatan bangsa dan tanah air.

**sebaran meriam-meriam di Denpasar memiliki potensi untuk diteliti lebih lanjut dan menjadi studi kasus yang menarik sebagai referensi tentang altileri pada masa lampau.**

sebagai referensi tentang altileri pada masa lampau. Penelusuran yang mendetail sangat memungkin untuk adanya

data yang lebih menarik dari studi kasus ini.

Sebaran meriam-meriam yang telah disinggung sebelumnya terkoneksi dengan kawasan Gajah Mada Heritage. Terdapat sedikitnya 14 meriam, namun tidak menutup kemungkinan adanya meriam-meriam lain yang belum terlacak secara teliti. Perspektif yang coba dibangun dalam tulisan ini adalah perspektif meriam sebagai benda cagar budaya. sehingga dalam status tersebut terdapat fungsi dan peran yang wajib dipenuhi oleh benda tersebut.

Potensi meriam di Denpasar sebagai benda cagar budaya dapat menunjang dan menjadi bukti relevan tentang kilas

**Nilai tambah yakni terjaga dan terawatnya benda warisan budaya sehingga generasi selanjutnya masih dapat menemukan sisa-sisa budaya pada masa lalu di kota yang telah menuju era modern.**

### 3. PENUTUP

#### Kesimpulan

Dari semua uraian yang telah dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa, sebaran meriam-meriam di Denpasar memiliki potensi untuk diteliti lebih lanjut dan menjadi studi kasus yang menarik

balik sejarah Denpasar. Terkoneksinya benda cagar budaya ini dalam satu kawasan menjadi nilai tambah. Sehingga dengan adanya meriam ini, kekayaan budaya dan sejarah Denpasar menjadi lebih beragam.

## **Saran**

Bertolak dari judul tulisan ini yakni sebuah pengantar tentang tinjauan meriam-meriam di Denpasar maka sangat diharapkan studi-studi sejenis mendapat perhatian dari pihak terkait baik akademisi, peneliti ahli maupun orang-orang yang tertarik dengan masalah sejarah, khususnya masa kolonial. Terkhusus pula untuk para ahli sejarah maupun arkeologi dapat menjadikan meriam-meriam ini sebagai rujukan dalam penulisan sejarah sehingga keberadaannya masih dapat terhubung dengan catatan sejarah. Masih banyak hal yang belum dapat dijabarkan dengan rinci dalam tulisan ini sehingga tinjauan tahap lanjut sangat memungkinkan dilaksanakan.

Diharapkan pula keberadaan meriam-meriam tersebut mendapatkan penanganan dalam hal pelestarian meskipun status benda cagar budaya belum terdata secara resmi. 

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A.A. Gde Putra, I Gde Parimarta, Ida Bagus Gde Budharta, dan Ida Bagus Rama. Sejarah Kota Denpasar 1945-1979. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1986.
- [Artanegara](#). "Uji Petik Pemeliharaan Benda Cagar Budaya/ Situs di Kotamadya Denpasar, Bali pada tanggal 15 sampai dengan 20 Februari 1999." 2016.  
(<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbbali/trashed-3>)
- Fadillah, Moh Ali. "Beberapa Catatan Tentang Dua Meriam Nusantara dari Galesong." *Walennae* Nomor 2/1 (1998): Hal. 61-80.
- Handoko, Wuri. "Meriam Nusantara dari Negeri Elpa Putih: Tinjauan Awal Atas Tipe, Fungsi, dan Derah Asal." *Kapata Arkeologi* Nomor 2 Colume 2 (2016): Hal. 69-87.
- Muhajid, Saiful. "Kawasan Cagar Budaya Nasional Kawasa Strategis Nasional, Keterkaitannya dengan Nominasi Warisan Dunia Dalam Upaya Pelstarian Cagar Budaya." *Umulolo* Nomor 1 Volume IV (2015): 6-16.
- Putra, I Gusti Putu Anindya. 2017. Model Pengelolaan Pariwisata Kota Denpasar. *Prosiding Seminar Nasional Perencanaan Pembangunan Inklusif Desa Kota*. 25 Maret 2017. Hal. 43-50.
- Polapa, Filya C. "Potensi Cagar Budaya Periode Kolonial di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo." *Umulolo* Nomor 1 Volume IV (2015): 29-40.
- Yudantini, Ni Made, Kadek Agus Surya Darma, Wayan Wiryawan. 2017. Sejarah dan Perkembangan Kota Denpasar sebagai Kota Budaya. *Prosiding Seminar Heritage Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia (IPLBI)*. 2017. Hal. 177-184.  
<https://cagarbudaya.kemdikbud.go.id/public/pencarian> diakses pada tanggal 31 Juli 2019.  
<https://www.google.com/maps/place> diakses pada tanggal 30 Juli 2019.  
<https://kbbi.web.id/meriam> diakses pada tanggal 28 Juli 2019.

# SEKOLAH KEBANGSAAN: MENUMBUHKAN NASIONALISME, MENGENALKAN CAGAR BUDAYA



*Artikel ini mengupas tentang program tahunan Sekolah Kebangsaan yang dilaksanakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sejak 2011 hingga tahun ini. Program ini diimplementasikan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, bersinergi dengan Dinas Pendidikan Surabaya, diselenggarakan pada kisaran Hari Sumpah Pemuda (Oktober) dan Hari Pahlawan (November). Isinya, pembekalan tentang pesan-pesan nasionalisme, patriotisme, dan pengenalan terhadap Cagar Budaya yang ada di Surabaya. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang memberikan pembekalan itu dalam bentuk ceramah pada perwakilan siswa sekolah-sekolah negeri maupun swasta di Surabaya. Kegiatan ini mengambil tempat di lokasi-lokasi Cagar Budaya, yang dalam kesempatan itu pula, para veteran perang dihadirkan untuk turut membagikan pengalaman dan semangat mereka pada para pemuda. Pertanyaan yang ingin dijawab melalui artikel ini adalah bagaimana implementasi program, ditelaah dengan analisis kebijakan publik. Juga, bagaimana hubungannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dilakukan kajian terhadap literatur yang selaras dengan topik bahasan, reportase media massa, maupun observasi langsung terhadap program Sekolah Kebangsaan. Hasilnya, program ini telah membentuk momentum pengenalan nasionalisme, patriotisme, dan pengenalan Cagar Budaya bagi para pemuda Surabaya. Di samping itu, program ini selaras dengan sejumlah poin tujuan pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.*

**Rio Febriannur  
Rachman**

**Pascasarjana FISIP  
Universitas  
Airlangga  
Surabaya**

**Kata Kunci:**  
Kebijakan Publik,  
Sekolah  
Kebangsaan,  
Nasionalisme,  
Cagar Budaya



Sebagian pelajar mengenakan pakaian bernuansa kepahlawanan saat mengikuti Sekolah Kebangsaan (sumber: Humas Pemkot Surabaya)

## PENDAHULUAN

Salah satu program yang merupakan kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) adalah Sekolah Kebangsaan. Program inovasi ini berisi pembekalan tentang pesan-pesan nasionalisme, patriotisme, dan pengenalan terhadap Cagar Budaya yang ada di Surabaya. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang memberikan pembekalan itu dalam bentuk ceramah pada perwakilan siswa sekolah-

siswa, karena tidak monoton dilakukan di dalam kelas. Bahkan, beberapa kali dilakukan aksi teatrikal atau drama mengenai perjuangan kemerdekaan sebelum acara inti dimulai. Prosesi ini meningkatkan antusiasme dan sambutan meriah dari para siswa selaku peserta atau hadirin. Ada pula pertunjukkan seni lainnya, seperti menyanyi lagu-

sekolah negeri maupun swasta di Surabaya (Humas Pemkot Surabaya, 2018). Sekolah Kebangsaan menjadi satu acara yang ditunggu-tunggu para

lagu kebangsaan.

Kegiatan ini mengambil tempat di lokasi-lokasi Cagar Budaya, yang dalam kesempatan itu pula, para veteran perang dihadirkan untuk turut membagikan pengalaman dan semangat mereka pada para pemuda. Sekolah Kebangsaan biasanya dilaksanakan sebanyak tiga kali, dalam kisaran peringatan Sumpah Pemuda (Oktober) dan Hari Pahlawan (November) tiap tahun, sejak 2011. Sekolah Kebangsaan dilakukan di tempat-

**Sekolah Kebangsaan menjadi satu acara yang ditunggu-tunggu para siswa, karena tidak monoton dilakukan di dalam kelas. Bahkan, beberapa kali dilakukan aksi teatrikal atau drama mengenai perjuangan kemerdekaan sebelum acara inti dimulai.**

tempat bersejarah di Surabaya. Titik-titik yang pernah disinggahi antara lain, museum WR Supratman, rumah HOS Cokroaminoto, Kantor NU

Surabaya Jalan Bubutan sebagai tempat disuarakannya resolusi jihad, Tugu Pahlawan, Jembatan Merah (Taman

Sejarah Jayengrono), dan lain sebagainya. Pada sejumlah kesempatan, selain memberikan pencerahan tentang nasionalisme dari Wali Kota dan para veteran pada para siswa, dilakukan pula teatrikal untuk memberikan visualisasi peperangan tahun 1945 silam.

Dengan cara ini, para hadirin mendapat gambaran tentang betapa sukarnya meraih serta memertahankan kemerdekaan. Sehingga, mereka selalu mencintai negara ini dan berusaha agar dapat memberi manfaat bagi negara dan lingkungan sekitar.

Sekolah Kebangsaan berkesesuaian dengan konteks kota Surabaya. Selama ini, kota ini mendapat julukan Kota Pahlawan. Bahkan, Surabaya merupakan satu-satunya kota yang memiliki julukan Kota Pahlawan di dunia ini. Apa

latar belakangnya? Jawaban dari pertanyaan inilah yang disampaikan pada kegiatan Sekolah Kebangsaan. Pejuang di Surabaya pada 1945 silam memertahankan kemerdekaan dengan

**Para pemuda harus makin bersemangat dan mencintai negerinya. Sehingga, mereka tidak terbersit untuk merugikan diri sendiri dengan narkoba atau kebiasaan buruk lainnya.**

semangat nasionalisme yang bergelora selama sehari-hari. Para pejuang itu tidak hanya berasal dari Surabaya. Ada juga yang berasal dari kota-kota lain. Mereka sengaja datang ke pertempuran di sini demi menunjukkan para penjajah bahwa negeri ini telah merdeka dan tidak takut mati.

Sekolah Kebangsaan bukan adaptasi dari program lain. Meski demikian, Pemkot Surabaya juga menggagas program lain yang memiliki hubungan dengan Sekolah Kebangsaan. Yakni,

Surabaya Heroic Track, dalam program ini, para siswa sekolah-sekolah di Surabaya, diajak untuk berkeliling menggunakan bus ke tempat-tempat bersejarah dan memiliki nilai nasionalisme di Surabaya. Kegiatan ini digelar nyaris berbarengan momentumnya dengan perhelatan Sekolah Kebangsaan. Para pemuda harus makin bersemangat dan mencintai negerinya. Sehingga, mereka tidak terbersit untuk merugikan diri sendiri dengan narkoba atau kebiasaan buruk lainnya. Mereka disemangati untuk serius dalam belajar agar dapat meneruskan cita-cita para pahlawan mewujudkan negeri yang adil, makmur, dan sejahtera.

## PEMBAHASAN

Kebijakan Publik Aplikatif

Keberlangsungan Sekolah Kebangsaan merupakan salah satu implementasi kebijakan publik yang dijalankan oleh Pemkot Surabaya melalui Disbudpar. Yang pada perjalanannya dibantu pula oleh dinas-dinas lain, seperti Dinas Pendidikan (yang mengoordinasikan



Para pelajar berbaris melingkar dan menyanyikan lagu nasional sebelum pelaksanaan Sekolah Kebangsaan (Sumber: Humas Pemkot Surabaya)

sekolah-sekolah) dan Dinas Sosial (yang mengoordinasikan para veteran). Kebijakan publik adalah apa yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau yang dipilih pemerintah untuk tidak dilakukan, yang hal itu memiliki hubungan dengan kondisi masyarakat (Dye, 1972). Sekolah Kebangsaan merupakan program yang dilakukan oleh pemerintah, yang manfaatnya diharapkan dapat dirasakan oleh para siswa selaku sasaran program.

Kebijakan publik dilakukan pemerintah secara resmi melalui aturan tertentu, bisa melalui Standar Operasional Prosedur yang transparan, regulasi lainnya, dijalankan oleh

struktur-struktur di dalam pemerintahan itu (Anderson, 1984). Pada Sekolah Kebangsaan ini, struktur-struktur yang

**Kebijakan publik dilakukan pemerintah secara resmi melalui aturan tertentu, bisa melalui Standar Operasional Prosedur yang transparan, regulasi lainnya, dijalankan oleh struktur-struktur di dalam pemerintahan itu**

terlibat antara lain Disbudpar, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial. Kebijakan publik adalah tindakan yang memunyai tujuan tertentu sebagai solusi atas masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Bila ditarik garis lurus, kebijakan publik bisa diartikan sebagai tatanan atau aturan mengenai tindakan-tindakan tertentu, untuk tujuan

tertentu, yang dikoordinasikan oleh pemerintah, demi memajukan masyarakat umum.

Pemikir tentang kebijakan publik bernama Bromley merumuskan tiga tingkatan dalam hierarki kebijakan, yaitu: *policy level*, *organizational level*, *operational level* (Tachjan, 2006). Di negara demokrasi seperti Indonesia, *policy level* umumnya diperankan oleh lembaga yudikatif dan legislatif, sedangkan *organizational level* diperankan oleh lembaga eksekutif. Sementara *operational level* dilaksanakan oleh satuan pelaksana seperti kedinasan, kelembagaan atau kementerian.

Di tiap level tadi, kebijakan publik diwujudkan dalam

regulasi, peraturan, atau *institutional arrangement*. Modelnya, bisa disesuaikan dengan ruang lingkup kebijakan yang dimaksud. Misalnya, di tingkat negara, wujudnya bisa dalam bentuk undang-undang atau peraturan pemerintah. Di tingkat kementerian, wujudnya bisa dalam bentuk peraturan pemerintah. Di tingkat provinsi, wujudnya bisa dalam bentuk peraturan gubernur, perda, atau yang lain yang selevel. Begitu pula di tingkat daerah, wujudnya bisa peraturan walikota, peraturan bupati, perda, atau yang lain yang selevel.

Dalam siklus kebijakan publik, terdapat konsep

*pattern interaction*

adalah

pola

interaksi

antara

pelaksana

kebijakan

paling

bawah

(*street*

*level bureaucrat*) dengan

kelompok sasaran (*target*

*group*) kebijakan yang

menunjukkan pola pelaksanaan kebijakan yang menentukan dampak

**Para pemuda harus makin bersemangat dan mencintai negerinya. Sehingga, mereka tidak terbersit untuk merugikan diri sendiri dengan narkoba atau kebiasaan buruk lainnya.**

(*outcome*) dari kebijakan tersebut. Hasil suatu kebijakan dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan akan ditinjau kembali (*assesment*) untuk menjadi umpan balik (*feedback*) bagi semua level kebijakan yang diharapkan terjadi sebuah perbaikan atau peningkatan kebijakan.

**Para pemuda harus makin bersemangat dan mencintai negerinya. Sehingga, mereka tidak terbersit untuk merugikan diri sendiri dengan narkoba atau kebiasaan buruk lainnya.**

Pada tahap itulah evaluasi mengenai suatu kebijakan diterapkan. Evaluasi ini

bisa dilaksanakan para kurun paling sempit, misalnya harian, hingga paling panjang, misalnya lima tahunan. Pada kebijakan pelaksanaan program Sekolah

Kebangsaan, peran di policy level dimainkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku legislatif. Sedangkan peran di organizational level dijalankan oleh Pemkot Surabaya. Yang di operational level dilaksanakan oleh Disbudpar Surabaya. Sedangkan institutional arrangement diwujudkan melalui Perda APBD tahunan, yang berjalan sejak 2011 hingga saat ini, yang di dalamnya terdapat pos anggaran untuk program Sekolah Kebangsaan. Sementara itu, pattern interaction bisa dilihat, antara lain, melalui model evaluasi yang dilakukan Wali Kota Surabaya pada para

petugas lapangan Disbudpar yang melaksanakan program ini. Sebagai narasumber utama, Wali Kota Surabaya menjadi pengawas langsung semua tahapan dan melihat langsung proses pelaksanaannya

Bisa dilihat pula berdasarkan interaksi para petugas lapangan Disbudpar yang melaksanakan Sekolah

Kebangsaan

dengan para siswa.

Petugas dari

Disbudpar

selama ini

berupaya

keras

untuk

berkomuni

kasi dengan para siswa

dengan baik sehingga

acara bisa berlangsung

dengan lancar. Sumber

Daya Manusia (SDM) pada

suatu institusi, sebagai

contoh petugas

Disbudpar, memiliki peran

sentral dalam kemajuan

institusi tersebut.

Termasuk, memiliki

pengaruh terhadap semua

kebijakan yang dijalankan

institusi (Maula, 2018).

Sedangkan outcome bisa

dilihat dari aspek kebermanfaatannya. Dapat pula dianalisa dari kondisi sebelum dan sesudah program-program dijalankan.

Secara umum, SDM yang diaktifkan untuk menjalankan inovasi ini berasal dari internal maupun eksternal Pemkot Surabaya. Yang internal, antara lain dari Disbudpar, Dinas Pendidikan, maupun

**Kebijakan publik dilakukan pemerintah secara resmi melalui aturan tertentu, bisa melalui Standar Operasional Prosedur yang transparan, regulasi lainnya, dijalankan oleh struktur-struktur di dalam pemerintahan itu**

Dinas Sosial. Ada pun SDM dari eksternal berasal dari para seniman, budayawan dan para pecinta sejarah kota Surabaya. Mereka memberi masukan pada Pemkot Surabaya untuk merumuskan konten Sekolah Kebangsaan yang sesuai dan tepat sasaran bagi para siswa. Dalam prosesi teatrikal, drama, atau pertunjukkan kesenian sebelum acara,

mereka bersumbangsih menyutradarai dan melatih sebagian siswa yang menjadi pemainnya. Sumber pembiayaan secara umum berasal dari APBD Surabaya. Program ini dapat berlanjut karena memang dibutuhkan oleh masyarakat dan aplikatif sehingga diterima serta diapresiasi secara positif oleh semua kalangan.

**Kenalkan Sejarah dan Cagar Budaya**

Dalam pembahasan kebijakan publik, ada konsep lain yang menarik untuk diteropong lebih jauh. Yakni, proses dari muncul dan diterapkannya kebijakan publik tersebut. Ada setidaknya mengemukakan sebelas tahapan yang dilakukan pemerintah dalam proses kebijakan publik (Jones, 1984), antara lain, perception/definition, aggregation, organization, representation, agenda setting, formulation, legitimation, budgeting, implementation, evaluation and adjustment/termination. Pandangan tadi bisa dirangkum menjadi tiga tahapan pokok kebijakan publik, yakni, perumusan,

implementasi, serta pengawasan dan penilaian (hasil) pelaksanaan kebijakan (Tachjan, 2006).

Efisiensi dan efektivitas suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh proses kebijakan yang



Para Veteran di Sekolah Kebangsaan (sumber: Humas Pemkot Surabaya)

terdiri dari perumusan atau formulasi, implementasi serta evaluasi. Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2005) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik atau pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Penetapan yang dimaksud adalah tahapan formulasi

Pada tahap formulasi

itu, mesti ditentukan tujuan dan sasaran program. Implementasi kebijakan terjadi hanya setelah peraturan atau bisa berwujud perintah atasan keluar. anggaran pun disediakan dan dapat

dikeluarkan membiayai proses implementasi tersebut. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan. Di dalamnya, terdapat interaksi langsung antara pelaksana kebijakan, program, dan sasaran kebijakan tersebut

Sekolah Kebangsaan dilaksanakan oleh Pemkot Surabaya dipimpin langsung Wali Kota melibatkan semua elemen penting, khususnya di Disbudpar sebagai *leading sector*. Sedangkan, evaluasi dilakukan oleh Wali Kota

Surabaya dan DPRD sebagai legislatif. Evaluasi dilaksanakan dengan melihat dampak atas kebijakan atau keberadaan program Sekolah Kebangsaan.

Sekolah Kebangsaan dievaluasi secara berjenjang. Mulai jenjang di bawah, yang dilakukan oleh Kepala Disbudpar, hingga Wali Kota Surabaya. Evaluasi juga dilakukan oleh para wakil rakyat di DPRD Surabaya, yang selalu menerima masukan dari masyarakat. Pelaksanaan evaluasi dijalankan dengan melihat dampak-dampak yang dirasakan oleh kelompok sasaran, yakni, para siswa sekolah-sekolah di Surabaya. Juga, dilihat dari bagaimana tingkat antusiasme masyarakat

**Sejauh ini, secara umum, masyarakat memberi atensi positif. Antara lain, masyarakat dari kalangan seniman, budayawan, dan**

terhadap program inovasi ini. Sejauh ini, secara umum, masyarakat memberi atensi positif.

Antara lain, masyarakat dari kalangan seniman, budayawan, dan

pemerhati sejarah. Umumnya, evaluasi dilaksanakan melalui analisis dengan mengukur dua poin utama. Yakni, seberapa baik kebijakan ini berjalan dan seberapa besar perubahan yang dihasilkan dari inovasi ini.

Faktanya, sejak 2011, Sekolah Kebangsaan memberikan gambaran/informasi sejarah tentang perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan di Kota Surabaya. Tujuannya, mewariskan rasa cinta tanah air dan menanamkan perasaan menghargai pengorbanan para pejuang kepada generasi muda millennial. Agenda tahunan ini dihadiri oleh ribuan pelajar Kota Surabaya dari tingkatan Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperingati Sumpah Pemuda (Oktober) dan Hari Pahlawan (November).

**Sekolah Kebangsaan menggelorakan semangat kepahlawanan pada generasi muda sebagai penerus pembangunan. Dengan cara ini, mereka lebih siap mewujudkan tranformasi nilai kepahlawanan dan cinta tanah air untuk membentuk karakter yang baik dan mewariskan semangat cinta tanah air kepada Generasi Muda.**

Yang perlu digarisbawahi, julukan Surabaya sebagai Kota Pahlawan perlu dikuatkan kembali dalam menumbuhkan nilai-nilai kepahlawanan. Maka itu, perlu menggelorakan kembali semangat kepahlawanan untuk menumbuhkan jiwa berbakti kepada bangsa dan negara.

Sekolah Kebangsaan menggelorakan semangat kepahlawanan pada generasi muda sebagai penerus pembangunan. Dengan cara ini, mereka lebih siap mewujudkan tranformasi nilai

kepahlawanan dan cinta tanah air untuk membentuk karakter yang baik dan mewariskan semangat cinta tanah air kepada Generasi Muda. Mereka bisa menjaga semangat dan memperingati jasa para pahlawan. Sekolah Kebangsaan memberikan pendidikan karakter pada pelajar dari tingkat SD sampai dengan SMP agar dapat memaknai sejarah.

Apalagi, dalam pelaksanaannya, tempat-tempat bersejarah dengan status Cagar Budaya dijadikan jujukan lokasi. Menurut UU RI Nomor 11 tahun 2010, yang dimaksud cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan baik berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan. Bisa jadi berada di darat maupun di air, memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan serta kearifan lokal Indonesia. Oleh karena substansinya yang kompleks dan perlu dikenali oleh para pemuda sebagai generasi penerus bangsa, adanya Sekolah Kebangsaan yang turut

memromosikan Cagar Budaya merupakan kebijakan brilian di level pemerintah daerah. Cagar budaya yang dikemas dengan baik dan diperkenalkan secara optimal pada masyarakat potensial menjadi tempat wisata berbasis sejarah. Melalui cara itu, ada aspek pendidikan yang digali, karena pas dengan ungkapan: bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah. Artinya, ada makna belajar dari sejarah. Sekolah Kebangsaan mengakomodasi hal-hal tersebut.

## **Jamin Keberlanjutan Kota**

Kebijakan publik bisa dianalisis secara objektif (Dunn, 2000). Terdapat banyak cara untuk menganalisis suatu kebijakan publik, antara lain dengan melihat kondisi masyarakat yang ada sekarang, dan mememikirkan apa yang akan terjadi apabila kebijakan dilaksanakan. Analisis bisa dilakukan dengan cara melihat apa saja yang sudah terjadi setelah kebijakan publik

diterapkan. Dapat pula melalui penjabaran masalah yang ada sebelum kebijakan dilaksanakan, lalu

## **adanya Sekolah Kebangsaan yang turut memromosikan Cagar Budaya merupakan kebijakan brilian di level pemerintah daerah.**

menjawabnya dengan kebijakan aplikatif yang dipilih.

Analisis kebijakan publik merupakan metode untuk menghasilkan pengetahuan sehubungan dengan adanya kebijakan tertentu dari pemerintah. Analisis kebijakan publik bisa dilakukan terhadap program Sekolah Kebangsaan dengan melihat problem awal yang dihadapi Surabaya di era kekinian

sehubungan dengan upaya membentuk generasi muda berkarakter dan cinta tanah air.

Surabaya merupakan kota besar yang kerap menghadapi problem sosial khususnya bagi warga di usia sekolah. Makin hari mereka makin gampang mengakses informasi. Perkembangan teknologi membuat referensi mereka dalam berinteraksi bahkan mengaplikasikan gaya hidup tidak gampang untuk diarahkan. Mereka

## **Budaya yang mereka hadapi tiap hari beraneka ragam termasuk yang berasal dari pengaruh luar negeri. Imbasnya, terdapat pemuda-pemudi yang gampang terpengaruh budaya luar negeri yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa.**

memiliki banyak pilihan tontonan, contohnya, melalui gawai yang terhubung dengan internet. Budaya yang mereka hadapi tiap hari beraneka ragam termasuk yang berasal dari pengaruh luar negeri.

Imbasnya, terdapat

pemuda-pemudi yang gampang terpengaruh budaya luar negeri yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Sebagian lagi terjebak pada kecanduan game online yang tidak mendidik. Mereka kerap terbawa emosional yang berlebih ketika terjadi perselisihan antar individu. Mereka kekurangan wadah atau sarana untuk mengekspresikan diri sebagai pemuda yang mempunyai jiwa kepahlawanan. Dalam kondisi itu, mereka kekurangan pengalaman dalam bersosialisasi sesama komunitas sekolah.

Fakta itu menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkot Surabaya.

Disbudpar merasa perlu ada inovasi agar para pemuda di Surabaya tetap ingat terhadap budaya, sejarah, dan masa lalu kota ini. Pendidikan karakter dan kepahlawanan

**Sebagian lagi terjebak pada kecanduan game online yang tidak mendidik. Mereka kerap terbawa emosional yang berlebih ketika terjadi perselisihan antar individu.**

mesti diaplikasikan sejak dini. Sehingga, di tengah arus informasi dan pertumbuhan teknologi seperti sekarang ini, para pemuda tetap ingat terhadap jasa-jasa para pahlawan yang sudah memerdekakan mereka dari penjajahan.

Di sisi lain, Sekolah Kebangsaan memberikan ruang yang terbuka lebar bagi para pemuda-pemudi masyarakat Surabaya untuk berekspresi di luar jam sekolah.

Mereka dilibatkan untuk melakukan teatrikal, drama, dan seni pertunjukan tentang kepahlawanan pada momentum

Sekolah Kebangsaan. Selain itu, hal itu bisa

menambah ilmu dan pengalaman. Juga, bisa saling bertoleransi sesama siswa-siswi dengan

sekolah lain serta menghindari dari segala kegiatan negatif. Karena pada saat itu, ada banyak sekolah yang terlibat.

**Negara-negara di dunia, melalui kebijakan-kebijakan di level pusat maupun daerah, diharapkan ikut merumuskan program-program yang selaras dengan tujuan poin tersebut.**

Ada tujuh belas poin tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2015 lalu. Negara-negara di dunia, melalui kebijakan-kebijakan di level pusat maupun daerah, diharapkan ikut merumuskan program-program yang selaras dengan tujuan belas poin tersebut. Poin pertama adalah *No Poverty* atau mengakhiri kemiskinan di mana pun dan bagi siapapun. Jadi, kebijakan yang diambil pemerintah secara keseluruhan, mesti ada yang berpihak pada

pemberantasan kemiskinan.

Poin kedua adalah *Zero Hunger* atau mengakhiri kelaparan dan mencapai ketahanan pangan serta nutrisi yang lebih baik untuk semua masyarakat. Termasuk di dalamnya, mendukung pertanian, perkebunan, dan budidaya air berkelanjutan. Paling tidak, ada kementerian atau dinas atau program-program tertentu yang secara khusus menangani ini. Poin ketiga, *Good Health and Well-Being* atau memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua orang. Kebijakan publik mesti memikirkan hajat hidup orang banyak. Tidak boleh ada ketimpangan layanan kesehatan dan kesejahteraan. Poin keempat, *Quality Education* atau memastikan pendidikan yang berkualitas. Artinya, harus ada upaya untuk mendukung kesempatan belajar bagi semua orang dengan pendidikan bermutu. Baik pendidikan yang bersifat inklusif atau pun pendidikan pada umumnya.

Poin kelima adalah *Gender Equality* atau mencapai kesetaraan gender, sehingga laki-laki dan perempuan tidak

**Poin kelima adalah *Gender Equality* atau mencapai kesetaraan gender, sehingga laki-laki dan perempuan tidak merasakan diskriminasi satu sama lain.**

merasakan diskriminasi satu sama lain. Baik laki-laki maupun perempuan mesti merasa terlindungi dalam satu komunitas yang sama. Mereka dilindungi oleh regulasi dan kebijakan, sehingga

**Tenaga kerja melakukan pekerjaan yang sesuai dengan pendapatannya, sekaligus aman bagi dirinya atau tidak terancam dirinya dari bahaya.**

merasa nyaman dan aman untuk beraktifitas di ruang publik. Poin keenam, *Clean Water and Sanitation* atau mewujudkan ketersediaan air bersih dan sanitasi yang sehat. Biasanya,

lingkup yang dimaksud tidak di luar seputar Mandi Cuci Kakus (MCK) yang higienis. Mesti bisa pula menyentuh hal lain yang masih setema dengan itu.

Poin ketujuh, *Affordable and Clean Energy* atau memastikan akses terhadap energi yang terjangkau dan berkelanjutan. Kehidupan sehari-hari membutuhkan energi, semisal dari minyak bumi, tenaga surya, batu bara, dan lain sebagainya. Kawasan yang baik adalah yang mampu mencetuskan regulasi soal energy terbarukan. Poin kedelapan, *Decent Work and Economic Growth* atau memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Di sisi lain, tenaga kerja yang ada dalam kondisi produktif dengan pekerjaan yang layak. Tenaga kerja melakukan pekerjaan yang sesuai dengan pendapatannya, sekaligus aman bagi dirinya atau tidak terancam dirinya dari bahaya. Maka itu, akan ada korelasinya dengan keselamatan dan keamanan kerja.

Poin kesembilan,

*Industry, Inovation and Infrastructure* atau merealisasikan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat, mendukung industrialisasi inklusif, berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi demi kesejahteraan sosial yang merata. Pada titik ini, kebijakan publik dituntut berinovasi dengan perspektif menjalankan industri dan infrastruktur. Poin kesepuluh, *Reduced Inequalities* atau mengurangi kesenjangan sosial antar manusia pada semua sektor kehidupan. Dengan demikian, masing-masing warga merasa setara di mata hukum yang berlaku. Poin kesebelas, *Sustainable Cities and Communities* atau membangun kota dan komunitas yang berkelanjutan. Sebuah komunitas di suatu kota harus bisa hidup layak dari berbagai aspek, misalnya, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Masing-masing individu di komunitas itu mesti

mendapat hak yang sama satu sama lain.

Poin kedua belas, *Responsible Consumption and Production* atau mewujudkan pola konsumsi dan produksi yang baik, seimbang, dan berkelanjutan. Jangan sampai ada pihak-pihak yang mengeksploitasi

**Sebuah komunitas di suatu kota harus bisa hidup layak dari berbagai aspek, misalnya, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Masing-masing individu di komunitas itu mesti mendapat hak yang sama satu sama lain.**

konsumen, sehingga ada proses konsumsi maupun produksi yang berlebihan. Poin ketiga belas, *Climate Action* atau mengambil peran untuk menyikapi perubahan iklim dan dampak buruk yang terjadi karena hal tersebut. Hal ini tengah menjadi perhatian bersama penduduk dunia. Terlebih, kondisi planet ini makin hari makin menguatirkan akibat dampak pemanasan global.

Poin keempat belas,

*Life Below Water* atau memanfaatkan dan mengelola sumber daya air, baik danau, sungai, laut, samudra dan segala sektor kemaritiman, sekaligus melestarikannya. Sehingga, masih bisa dimanfaatkan oleh generasi selanjutnya. Poin ini berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan. Senada dengan poin kelima belas, *Life on Land* atau memanfaatkan dan mengelola sumber daya di daratan. Termasuk, pepohonan, hasil pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya.

Tidak berlebihan dalam pemanfaatannya, dan tetap menjaga keberlanjutannya.

Poin keenam belas, *Peace, Justice, and Strong Institutions* atau mewujudkan masyarakat yang damai, adil, yang diperkuat kelembagaan yang kuat berkeadilan. Jadi, kebijakan publik tidak boleh menimbulkan keresahan apalagi ketertindasan bagi pihak-pihak tertentu. Di sinilah pentingnya ada diskusi

publik atau bahkan *hearing* baik yang dilakukan di eksekutif maupun legislative. Poin terakhir atau ketujuh belas, *Partnership for The Goals* atau menguatkan kemitraan baik antar institusi dalam satu negara, maupun antar institusi global. Tujuannya, merealisasikan pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Kemitraan ini erat kaitannya dengan sinergitas antar elemen masyarakat.

Sekolah Kebangsaan selaras dengan sejumlah poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut. Salah satunya, di aspek *Sustainable Cities and Communities*. Sebuah kota mesti layak huni dan berkualitas. Kota yang baik adalah yang membanggakan bagi masyarakatnya, sehingga lini psikologis tiap warga merasa kalau ia merupakan bagian penting dari kota tersebut. Dengan terus menerus menggelorakan

kesejarahan dan nilai-nilai positif dari kepahlawan di Surabaya, warga kota akan merasa bangga pada para pejuang. Pada gilirannya,

**Kota yang baik adalah yang membanggakan bagi masyarakatnya, sehingga lini psikologis tiap warga merasa kalau ia merupakan bagian penting dari kota tersebut.**

mereka merasa menghargai jasa para pahlawan serta bertanggungjawab untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan tersebut.

Kelestarian nilai-nilai sejarah di kota, termasuk di dalamnya kewibawaan Cagar Budaya, terus

terjaga.

Tidak hanya pemerintah setempat yang punya perhatian terhadapnya. Para

pemuda sebagai generasi penerus juga diajak untuk mencintai Cagar Budaya tersebut. Mereka juga

menjadi lebih kenal dengan kota tempat dia hidup. Langkah-langkah tersebut di atas bisa mendukung keberlanjutan kota.

Sekolah Kebangsaan juga selaras dengan poin *Partnership for The Goals*. Sinergitas dan kemitraan yang dilakukan melalui program ini relatif banyak. Para pemangku kepentingan saling mendukung keberlangsungan kegiatan. Wali Kota Surabaya sebagai inisiator dan narasumber utama memberi atensi atau perhatian secara maksimal. Sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan optimal. Kepala Disbudpar sebagai

mengawasi seluruh petugas pelaksana. Pihak Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial yang selalu diajak berkoordinasi

si memainkan peran dengan proporsional. Dinas Pendidikan mengumpulkan sekolah-sekolah agar para siswa

**Sekolah Kebangsaan juga selaras dengan poin *Partnership for The Goals*. Sinergitas dan kemitraan yang dilakukan melalui program ini relatif banyak.**

bisa ikut serta dalam pelaksanaan Sekolah Kebangsaan. Sedangkan Dinas Sosial mengajak para veteran perang untuk datang dalam momentum ini. Para

veteran yang diajak untuk datang pada setiap gelaran berkesempatan untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman dengan para siswa. Sedangkan para seniman, budayawan, dan pecinta

sejarah, yang turut merumuskan acara. Mereka ikut mengonseptualisasikan, drama, maupun pertunjukkan yang dilakukan para siswa.

Tiap tahun, semakin banyak siswa-siswi yang terlibat dalam proses kegiatan ini. Ada banyak dampak positif dari Sekolah Kebangsaan. Para siswa menjadi lebih paham tentang arti

kepahlawan. Di sisi lain, para veteran yang diajak untuk ikut serta merasa senang karena dapat secara langsung mentransfer pengetahuan

dan semangat mereka. Adanya teatrikal membuat para siswa mendapat visual tentang kejadian di masa lampau yang heroik. Sehingga, mereka lebih mensyukuri kemerdekaan bangsa.

Motivasi mereka untuk belajar dipompa agar dapat bermanfaat bagi bangsa dan masyarakat luas di masa datang. Yang tak kalah penting, semua guru yang ikut mendampingi kegiatan Sekolah Kebangsaan ini mesti aktif menceritakan pengalaman dan pengetahuan mereka tentang nasionalisme,

patriotisme, dan Cagar Budaya. Khususnya, yang terkait dengan materi Sekolah Kebangsaan yang turut mereka ikuti kegiatannya. Dengan demikian, pesan-pesan moral di Sekolah Kebangsaan bisa tersebar lebih luas di kalangan pelajar.

## Kesimpulan

Bertolak dari pendapat Ripley dan Franklin (1986) keberhasilan implementasi kebijakan publik setidaknya dibuktikan oleh tiga elemen, yakni, kepatuhan (*compliance*) objek melaksanakan kebijakan terhadap pencetus kebijakan atau insiator, kelancaran rutinitas dan ketiadaan halangan atau komplain terhadap kebijakan tersebut, dan hasil atau kinerja yang memuaskan bagi semua pihak. Khususnya, kelompok penerima manfaat dari kebijakan tersebut.

Ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari keberadaan program ini. Pertama, tentang pentingnya sinergitas. Sekolah Kebangsaan mensinergikan sejumlah instansi, selain Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata, ada pula Dinas Pendidikan (yang mengoordinasikan para pelajar) dan Dinas Sosial (yang mengoordinasikan para veteran perang). Juga, sinergitas dengan para seniman, budayawan, serta pecinta sejarah kota. Sinergitas dan penghilangan ego sektoral membuat sebuah program menjadi konsisten dan berlanjut secara baik dalam tiap tahun.

Kedua, hal positif yang bisa dipetik oleh para siswa sebagai sasaran program. Para siswa menjadi paham bahwa untuk meraih kemerdekaan dibutuhkan kerja keras dan kerjasama. Mereka tidak boleh bermalas-malasan dan bersikap individual. Dengan cara itu, para pemuda dapat mewujudkan cita-cita bangsa secara bersama-sama. Ketiga, ada pula hal positif yang bias dipetik oleh masyarakat Surabaya secara umum. Pelaksanaan Sekolah Kebangsaan memang dikhususkan bagi para siswa. Meski

demikian, bila masyarakat umum ingin hadir dan menyaksikan, tentu tidak dilarang. Selain itu, mereka juga dapat

**Artinya, secara tidak langsung, mereka juga turut diingatkan tentang nilai-nilai kepahlawan dan sejarah kota Surabaya yang penuh nilai nasionalisme atau cinta tanah air.**

menyaksikan reportasenya di media massa maupun media sosial Pemkot Surabaya. Artinya, secara tidak langsung, mereka juga turut diingatkan tentang nilai-nilai kepahlawan dan sejarah kota Surabaya yang penuh nilai nasionalisme atau cinta

tanah air.

Dengan demikian, semangat untuk mengabdikan dan

berkorban buat kesejahteraan bangsa makin terpujuk.

Program ini memiliki potensi untuk direplikasi daerah lain. Sebab, pelaksanaannya tidak

membutuhkan anggaran yang besar. Bahkan, dimungkinkan untuk menggandeng pihak-pihak dari luar swasta yang berkenan untuk mendukung kegiatan.

Artinya, mereka diperbolehkan memberikan dukungan, misalnya untuk konsumsi acara untuk peralatan tearikal maupun drama. Sebab, acara ini jelas memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sehingga, elemen warga dari mana pun latar belakangnya, pasti akan siap untuk berpartisipasi. Partisipasi tidak hanya dalam bentuk pembiayaan. Namun juga, merumuskan tentang seperti apa konsep Sekolah Kebangsaan. Di

dalamnya, ada teatrikal yang fomulanya didukung penuh oleh seniman, budayawan,

serta pecinta sejarah kota. Berangkat dari fakta itu, bisa disimpulkan kalayu Sekolah Kebangsaan bukanlah program yang mahal. Meski demikian,

**Partisipasi tidak hanya dalam bentuk pembiayaan. Namun juga, merumuskan tentang seperti apa**

Disbudpar harus bisa mensinergikan semua pihak sesuai dengan kapasitasnya.

Tentu saja, ada sejumlah saran yang perlu dilakukan ke depan demi membenahi program ini. Antara lain, bias dengan memerbanyak frekuensi kegiatan ini. Yang awalnya hanya tiga kali dalam rentang Oktober dan November, menjadi tiap bulan. Sehingga, yang bisa menikmati kegiatan ini lebih banyak lagi. Selama ini, yang hadir adalah perwakilan sekolah, dengan harapan perwakilan itu menularkan pengalamannya pada kawan-kawan yang lain. Bila pihak sekolah, dalam hal ini para pelajar yang dapat mencecap Sekolah Kebangsaan lebih banyak, dampaknya tentu lebih banyak pula. Untuk membuat kegiatan yang lebih masif diperlukan komitmen yang kuat dan sinergitas atau kemitraan yang lebih solid. 

## DAFTAR PUSTAKA

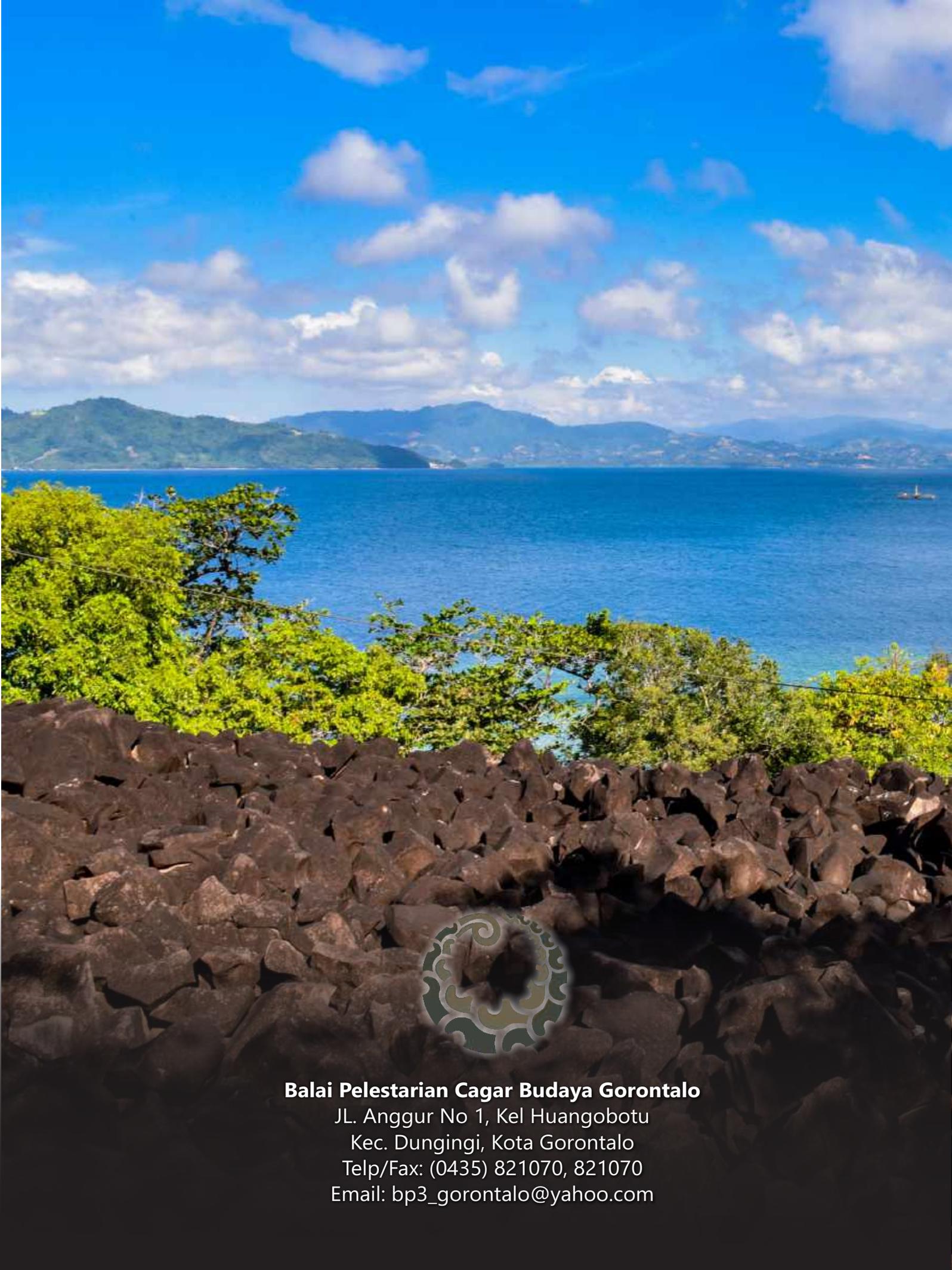
- Anderson, James E. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston. 1984.
- Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2000.
- Dye, Thomas R. *Understanding Public Policy*. New Jersey : Prentice Hall. 1972.
- Jones, Charles O. *An Introduction To The Study of Public Policy*. California: Brook/Cole Publishing Company. 1984.
- Maula, Nurkholifatul. "Strategi Sumber Daya Manusia". *Khazanah Intelektual..*, Volume 2:1, April 2018: 94-108.
- Ripley, Randall B. & Grace A. Franklin. *Policy Implementation and Bureaucracy*. Chicago: The Dorsey Press. 1986.
- Tachjan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI. 2006
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik:Teori dan Proses*. Yogyakarta: Med Press. 2007.
- "About the Sustainable Development Goals." 2015. United Nations. Tersedia di <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>. Diakses pada 11 September 2018.
- "Sekolah Kebangsaan bersama Pelajar Surabaya". 2018. Humas Pemkot Surabaya. Tersedia di <https://www.humas.surabaya.go.id/2018/10/31/sekolah-kebangsaan-bersama-pelajar-surabaya/>. Diakses pada 25 Juli 2019.





# KALEIDOSKOP BPCB GORONTALO 2019





**Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo**

Jl. Anggur No 1, Kel Huangobotu

Kec. Duingingi, Kota Gorontalo

Telp/Fax: (0435) 821070, 821070

Email: [bp3\\_gorontalo@yahoo.com](mailto:bp3_gorontalo@yahoo.com)